

# KONFLIK DI DARFUR, SUDAN

**SKRIPSI**

Fu.HI 39/06

Les  
k



**Disusun Oleh**

**KARTIKA PEMILIA LESTARI  
070016276**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2006**

# **KONFLIK DI DARFUR, SUDAN**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Studi pada  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga**

**Oleh**

**KARTIKA PEMILIA LESTARI  
070016276**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GENAP 2005/2006**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setuju untuk diujikan  
Surabaya, 1 Februari 2006

Dosen Pembimbing,



I Gede Wahyu Wicaksana, SIP, MS

NIP. 139 050 635

## HALAMAN PENGESAHAN

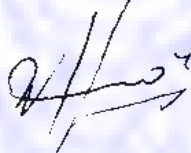
Skripsi berjudul :

### KONFLIK DI DARFUR, SUDAN

Telah dipertahankan di depan Komisi Penguji  
pada hari Rabu, 13 Maret 2006 jam 10.00-12.00 WIB

Komisi Penguji,

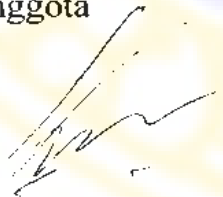
Ketua



Dra. Lilik Salamah MSI

NIP. 131 569 360

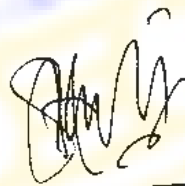
Anggota



Drs. Djoko Sulistyono, MS

NIP. 131 453 807

Anggota



Siti Rochmawati Susanto, SIP, MIR

NIP. 132 255 147

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini  
kepada

*Bapak dan Ibu atas Segala  
Cinta, Kasih Sayang dan Kesabarannya  
dan Semua Orang yang Mencintai Ilmu dan Kebenaran*

## MOTTO

*Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudah kering, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan Ilmu Allah...*

*(QS Luqman : 27)*

*Tuhan telah Mengatakan bahwa pengetahuan adalah berkah yang paling agung, dimana engkau, menemuinya, renggutlah dengan cepat, karena pengetahuan memberkahi sayap-sayap dengan kata-kata dan senandung, pada yang lemah ia menganugerahi kemurnian mutiara.*

*(Mohammad Iqbal)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat pertolongan-Nya peneliti akhirnya dapat merampungkan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Eksternal Penyebab Konflik Etnis di Darfur, Sudan ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap Studi Perdamaian yang termasuk baru dalam Ilmu hubungan Internasional. Konflik menjadi isu utama yang banyak menghiasi *headline* media cetak harian, mingguan maupun bulanan di seluruh dunia.

Konflik yang pecah di Darfur, Sudan pada Februari 2003 merupakan akibat dari sebuah proses panjang selama puluhan tahun. Proses panjang yang banyak memakan biaya politik serta biaya sosial ini dipicu oleh beberapa sebab, yang memiliki dimensi internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi akar konflik adalah struktur social Sudan, kesenjangan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan konfigurasi kepentingan kelompok-kelompok yang ada di Sudan. Sedangkan factor eksternal yang menjadi akar konflik adalah keterlibatan pihak asing serta Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet.

Ketidakselarasan yang menandai hubungan antara Utara dan Selatan di Sudan memiliki berbagai latar belakang yang kompleks. Salah satu diantaranya adalah pengalaman traumatis. Di abad lalu, daerah Selatan adalah tempat berburu budak untuk dijadikan tentara atau diperdagangkan di Mesir dan Turki. Perdagangan budak meningkat pada zaman Muhammad Ali, orang Albania yang menjadi gubernur Kekhalifahan Usmaniyah di Mesir.

Melalui berbagai proses, kolonialisme Inggris turut melanggengkan dan meningkatkan perpecahan tersebut. Pada masa kolonialisme, daerah Selatan dan Utara berkembang secara terpisah dan timpang sebagai efek kebijakan Inggris. Di wilayah Utara Inggris membuka perkebunan kapas, membangun jalur kereta api, dan mendirikan sekolah-sekolah pemerintah. Penduduk di Utara juga dipandang sebagai pasar potensial bagi produk-produk ekspor Inggris.

Pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, para pemimpin agama, para kepala suku dan para pedagang datang ke wilayah bagian Barat Sudan guna memperoleh pengaruh yang besar di dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Mereka mendominasi parlemen dan senat yang dibentuk pertama kali serta mendominasi keanggotaan dalam badan legislatif dan lembaga pusat. Kemunculan mereka, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, disebabkan karena faktor-faktor historis yang berkaitan dengan dominasi kehidupan religius oleh ajaran Muslim sufi dan juga karena akibat tidak langsung dari kebijakan yang diterapkan oleh Inggris sebagai negara kolonial. Pada masa itu pula, Darfur diperintah oleh komisioner-komisioner yang mengabaikan kebutuhan dasar warga Darfur dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pemerintah pusat

Sebagian besar negara-negara yang paling melarat termasuk Sudan selama bertahun-tahun berada di bawah pengaruh program “penyesuaian structural” yang dicanangkan oleh Washington. Kebijakan itu sungguh-sungguh telah membawa malapetaka bagi negara-negara tersebut. Kini, perekonomian mereka menjadi jauh lebih buruk ketimbang tiga puluh atau empat puluh tahun lalu. Kebijakan *Structural Adjustment Program* (SAP) yang disertakan dalam pinjaman IMF/Bank Dunia boleh jadi membantu negara-negara dalam membayar hutang mereka terdahulu, dan boleh jadi juga menciptakan sejumlah jutawan. Namun, mayoritas penduduklah yang jadi tumbalnya : upah yang rendah, berkurangnya pelayanan social, dan minimnya akses demokratis pada proses pembuatan kebijakan.

Institusi-institusi keuangan global yang dikendalikan oleh Amerika Serikat seperti IMF dan Bank Dunia, telah menghambat pembangunan di Sudan. Kepentingan negara-negara Barat di Sudan memberi kesan bahwa motivasi utama negara-negara Barat untuk “*care*” pada Sudan adalah motivasi yang sifatnya strategis, bukan kemanusiaan.

Sejak merdeka tahun 1956 kelompok-kelompok yang ada di Utara saling bersaing untuk mengendalikan negara dan mendominasi Selatan. Pemberian bantuan senjata dari AS dan Uni Soviet secara besar-besaran memperbesar perpecahan etnis dan politik. Kekuatan pemberontak di Selatan dipersenjatai (melalui Etiopia) oleh Israel tahun 1960-an dan Uni Soviet tahun 1970-an dan



1980-an. Kekuatan pemberontak ini kemudian dibenturkan dengan pemerintah Utara yang diberi bantuan persenjataan secara berturut-turut oleh Uni Soviet pada tahun 1960-an dan AS pada tahun 1970-an & 1980-an. Pada saat Numeiri memperoleh kekuasaan tahun 1969, dukungan yang pertama kali datang dari Uni Soviet dan kemudian AS turut memberikan dukungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanasi dengan menghubungkan dua variabel atau lebih sehingga membentuk satu kesatuan rumusan masalah yang utuh. Berdasarkan hipotesis yang sudah dibuat kemudian peneliti berusaha membuktikan kebenaran hipotesis.

Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa faktor internal berupa struktur sosial, kebijakan pemerintah, kesenjangan ekonomi serta konfigurasi kepentingan antar kelompok menjadi akar konflik secara internal. Sedang keterlibatan pihak asing dan Perang Dingin AS-Uni Soviet menjadi faktor eksternal penyebab konflik di Darfur. Kemudian peneliti juga melakukan prediksi ke depan terkait dengan prospek penyelesaian damai yang dilakukan pihak-pihak yang bertikai.

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengakui bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan serta kelemahannya. Oleh karena itu, peneliti akan senantiasa terbuka terhadap masukan dan kritik ilmiah yang bisa dijadikan tambahan pengetahuan dan menjadikannya sebagai bagian dari proses untuk selalu belajar serta tidak cukup merasa puas dengan karya yang dihasilkan, untuk memacu peneliti lebih meningkatkan kualitas keilmuan yang telah ada.

Perlu penulis sampaikan, bahwa proses penyusunan penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang turut membantu, baik secara moril maupun material. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat sedalam-dalamnya kepada:

- ❖ Allah SWT atas hidup yang telah Kau Beri, limpahan nikmat yang tidak pernah lupa Kau Curahkan dan atas sejuta lampu yang Kau Beri untuk menuntunku di jalan panjang. Shalawat dan Salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW.

- ❖ Bapak dan Ibu di Cilacap yang selalu memberi kasih sayang doa serta *support*. Kuhaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak yang tiap hari menelpon ke HP hanya untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Dan juga kepada Ibu, *that always giving but never asking in return*. Ibu yang ikhlas berikan segenap jiwa dan raga demi mengurus anak-anaknya, sampai-sampai rela jauh-jauh datang ke Surabaya ketika aku sakit. Ibu yang doanya tiada pernah putus untuk anakmu ini. Kurasa hanya sececil baktiku yg dapat kupersembahkan padamu. Ibu, untuk semua kebaikan untukmu.. insyaAllah selalu teriring dalam doaku.
- ❖ Dosen Pembimbing Skripsi, Drs. I Gde Wahyu Wicaksana, MA yang dengan sabar bersedia membimbing saya, mahasiswa bimbingannya.
- ❖ Terima kasih kepada seluruh dosen program studi Ilmu Hubungan Internasional : Drs. I. Basis Susilo, MA selaku dosen wali; Drs. T. Soedjadino MA, Drs. Wahyudi Poernomo M. Phil, Drs. Adjar Triharso MA, Drs. Vinsensio MA Dugis MA, Dra. Lilik Salamah MS, Drs. Djoko Sulisty, MA, Dra. Sartika Susilowati MA, Dra. BLS Wahyu Wardhani MA, Dra. Suhartatie Hidayat MA, M. Muttaqien S.ip, Joko Susanto S.ip, dan Siti Rohkmawati Susanto S.ip atas segala ilmu yang beliau berikan selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unair.
- ❖ Teman-teman HI 2000. Nina, Nanny, Ginanjar, Alex, Tika Chandra, Imam, Wawa', Endah, Ruli, Wulan, Nita, Indah, Rere, Dicky, Yudith, Tiroi, Cicil, Leni, Dina Lestari, Dina Novianti, Yono, Fahmi, Nona, Titus, Robertus, Robby, TL, Iwon, Antony, Retno, Emmy.
- ❖ Teman-teman HI 2001. Desy, Hani, Sugiani, Nanang, Lana, Yeni, Dina Safitri, Udin, Titi, Windy, Jufri, Widhi, Iyok.
- ❖ Teman-teman HI 2002. Nana, Wina, Krisna, Fian, Widhi.
- ❖ Teman-teman HI 2003. Irfi, Ica, Wisnu.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul Depan.....	i
Halaman Judul Dalam.....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Motto .....	vi
Kata Pengantar .....	vii-viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstrak .....	xiv
<b>Bab I: Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Permasalahan .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kerangka Analisis .....	
1.4.1. Level Analisis.....	6
1.4.2. Teori.....	8
1.4.2.1. Teori Konflik Domestik.....	8
1.4.2.1.1. Faktor Struktural.....	8
1.4.2.1.2. Faktor Politik.....	10
1.4.2.1.3. Faktor Sosial Ekonomi.....	11
1.4.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	12
1.5. Perumusan Hipotesis .....	14
1.6. Metodologi .....	15
1.6.1. Definisi Konseptual .....	15
1.6.2. Definisi Operasional .....	16
1.6.3. Tipe Penelitian .....	19
1.6.4. Jangkauan Penelitian .....	19
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data .....	19
1.6.6. Teknik Analisis Data .....	20
1.6.7. Sistematika Penulisan .....	20
<b>Bab II: Latar Belakang Konflik Di Darfur, Sudan .....</b>	<b>23</b>
1. Faktor Internal.....	23
1.1. Struktur Sosial.....	23
1.2. Kesenjangan Ekonomi.....	35
1.3. Kebijakan Pemerintah.....	42
1.4. Konfigurasi Kepentingan.....	55
2. Faktor Eksternal.....	71
2.1. Keterlibatan Pihak Asing.....	71
2.2. Perang Dingin AS-Uni Soviet.....	83
<b>Bab III : Prospek Penyelesaian Perdamaian.....</b>	<b>87</b>
<b>Bab IV: Kesimpulan .....</b>	<b>93</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Populasi Wilayah-Wilayah di Sudan.....	46
Tabel 2. Posisi Menteri 1954 – 1964.....	47
Tabel 3. Sudan Population Distribution 1986.....	47
Tabel 4. Pemerintahan Nasional 1954-1964.....	48
Tabel 5. Distribusi Menteri, 1964-1969.....	48
Tabel 6. Distribusi Menteri, 1969-1985.....	49
Tabel 7. Lembaga Militer Transisional, 1985-1986.....	50
Tabel 8. Distribusi Menteri pada Kabinet Al-Mahdi 1986-1989.....	51
Tabel 9. Dewan Komando Revolusioner, Juni 1989.....	52
Tabel 10. Posisi Konstitusional/Kementerian Juli 1989-Desember 1999.....	52
Tabel 11. Staf Istana Republik (Desember 1999).....	53
Tabel 12. Menteri-Menteri Pemerintah Federal.....	54
Tabel 13. Representasi Regional Pemerintah Federal, 1999.....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. *Sudan Charter*

Lampiran 2. *NDA Conference on Fundamental Issues: Final Communique*

Lampiran 3. *The Black Book*



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Konflik di Darfur, Sudan”. Secara garis besar latar belakang permasalahan adalah pada Februari 2003 di Darfur, sebuah wilayah yang terletak di barat Sudan, yang merupakan negara Afrika terbesar terjadi sebuah bencana kemanusiaan. Bencana kemanusiaan tersebut dipicu oleh konflik etnis yang melibatkan kegiatan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah oleh para pemberontak yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *Sudan People’s Liberation Army (SPLA)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)*. Kedua gerakan pemberontak ini menyatakan bahwa pemerintah Sudan menekan kelompok hitam Afrika demi keuntungan warga Arab. Isu etnis dan agama pun mencuat. Faktor internal serta eksternal banyak memegang peranan sebagai penyebab konflik di Darfur. Peneliti juga mencoba memprediksikan prospek penyelesaian perdamaian yang masih berjalan di Darfur, Sudan.

Oleh karena itu maka rumusan permasalahan yang peneliti ingin jawab adalah apa yang menjadi penyebab konflik di Darfur, Sudan.

Level analisis difokuskan pada level analisis perilaku kelompok, negara bangsa serta sistem internasional.

Variabel yang dijadikan unit eksplanasi untuk menjelaskan bagaimana konflik di Darfur bisa terjadi adalah kondisi sosial, politik, budaya serta ekonomi negara Sudan.

Dari data-data yang ada di lapangan, ditambah dengan latar belakang historis (*historical background*) Darfur, menunjukkan fakta bahwa semua hipotesis terbukti. Struktur social Sudan yang merupakan hasil politik segregasi membawa persoalan rumit untuk persatuan bangsa. Kebijakan pemerintah yang pro Utara dan kesenjangan ekonomi yang terjadi akibat penerapan system ekonomi pembangunan dan SAP membangkitkan gerakan pemberontakan dari Selatan. Konfigurasi kepentingan antar kelompok makin memperkeruh persoalan di Darfur, Sudan. Keterlibatan pihak asing dalam bentuk militer maupun dana serta Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet menjadi faktor eksternal penyebab konflik di Darfur, Sudan. Prospek penyelesaian perdamaian yang sekarang masih berlangsung tidak dimasukkan dalam hipotesis karena merupakan prediksi ke depan. Di prediksi prospeknya suram sebab pihak pemberontak belum bersedia menandatangani *Darfur Peace Agreement*. Mereka meminta konsesi yang lebih besar daripada yang ditawarkan pemerintah.

Kata kunci : Darfur, Sudan, konflik, faktor internal, faktor eksternal, penyelesaian perdamaian

## KONFLIK DI DARFUR, SUDAN

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### I. 1. Latar Belakang Masalah

Bencana kemanusiaan di Darfur, Sudan, sebuah negara yang terletak di Afrika dengan luas wilayah kira-kira 2,5 juta kilometer persegi serta terdiri dari 400 etnis saat ini menjadi perhatian dunia. PBB menggambarkan bencana kemanusiaan di sana sebagai yang terburuk, sekitar 50.000 orang tewas, dan 2,2 juta orang hidup dalam kesulitan mendapatkan makanan, minuman, bahkan kondisi kesehatan yang sangat menyedihkan.<sup>1</sup>

Bencana kemanusiaan tersebut dipicu oleh konflik yang terjadi di Darfur. Konflik di Darfur pecah sejak Februari 2003 setelah kelompok pemberontak mulai menyerang fasilitas-fasilitas pemerintah. Para pemberontak yang kemudian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *Sudan People's Liberation Army (SPLA)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)* menyatakan pemerintah Sudan menekan kelompok Afrika demi keuntungan warga Arab. Dalam sejarahnya, ketegangan di Darfur memang telah berlangsung lama antara warga Arab nomaden dan para petani dari etnis Fur, Massalet, serta Zagawa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Sudan Hadapi Tantangan Besar dalam Membangun Nasionalisme*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/19/utama/1217161.htm>, diakses tanggal 5 Januari 2005.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Menghadapi aksi pemberontakan di Darfur tersebut, pemerintah Sudan memobilisasi milisi Janjaweed untuk membela diri meski pemerintah Sudan selalu menolak keterkaitannya dengan milisi tersebut. Berdasarkan data di lapangan, menyusul serangan melalui udara oleh pasukan pemerintah, anggota milisi Janjaweed kemudian menyerbu kampung-kampung yang ada di Darfur, membunuh para lelaki, memperkosa perempuan, merampok apa saja yang bisa mereka ambil. Akibatnya, ribuan orang dari berbagai kampung di Darfur pun kemudian memutuskan untuk mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Arus pengungsian terbesar adalah yang menuju ke Chad, negara yang berbatasan langsung dengan Sudan di sebelah Barat. Tuduhan telah melakukan genosida pun dilontarkan kepada milisi Janjaweed, kemudian tuduhan itu pun menular kepada pemerintah Sudan akibat kuatnya dugaan keterkaitan milisi Janjaweed dengan pemerintah Sudan.<sup>3</sup>

Beberapa pihak menyatakan bahwa akar penyebab konflik adalah perubahan besar yang disebabkan oleh bencana kekeringan sejak tahun 1980-an, yang menimbulkan ketegangan antara orang-orang Afrika di bagian barat Sudan dan di bagian timur Sudan. Bencana kekeringan makin menambah ketegangan diantara bermacam suku di daerah tersebut, yang memang sudah ada sejak dulu. Secara spesifik, ketegangan tersebut terjadi antara komunitas petani yang hidupnya menetap dan komunitas nomaden yang hidupnya berpindah-pindah.<sup>4</sup>

Menurut sejarahnya, orang-orang nomaden, terkonsentrasi di daerah barat Sudan yang kering, hingga ke Darfur. Mereka membawa ternak-ternaknya ke

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *How Did Darfur Happen?*, <http://www.sudantribune.com/article.php?id.article=6003> diakses tanggal 26 Juni 2005



daerah selatan selama musim kering lalu kembali ke daerah barat untuk memburu hujan. Tapi sumber mata air dan sungai-sungai yang ada di daerah barat telah kering sehingga mereka akhirnya kembali ke selatan guna mencari padang rumput untuk menggembalakan ternak-ternak mereka. Di daerah selatan, mereka bersaing dengan komunitas petani dalam mendapatkan sumber daya alam seperti air, padang rumput, dan tanah subur yang mulai menyusut. Dan konflik pun akhirnya meningkat.<sup>5</sup>

Awalnya, suku-suku yang ada di Darfur mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan selalu melakukan negosiasi antar komunal (*intercommunal negotiation*). Jika ternak-ternak milik orang-orang nomaden menginjak lahan para petani atau sebaliknya, para kepala suku dari kedua belah pihak akan mengadakan rapat guna menghasilkan satu perjanjian. Biasanya akan diadakan pembayaran ganti rugi bagi para korban. Bagi para petani yang lahannya rusak diinjak-injak oleh ternak milik para peternak, akan diberi ganti rugi yang sepadan, dan sebaliknya. Pada pertengahan 1980-an, tata cara lama ini diubah oleh pemerintah Khartoum, yang menggunakan hukum formal kenegaraan untuk mengganti mediasi antarsuku (*tribal mediation*) yang berlaku selama ini diantara suku-suku yang ada di Darfur.<sup>6</sup>

Peraturan yang baru ini sebenarnya cukup adil. Namun kemudian timbul masalah ketika pada kenyatannya yang menjadi komunitas petani yang menetap adalah orang-orang Afrika di Darfur, sementara yang mengganggu keamanan mereka adalah orang-orang Arab nomaden. Dan orang-orang Arab nomaden ini

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*,

terus-menerus datang dan mendominasi birokrasi pemerintahan Sudan. Dengan ini muncul sedikit keraguan apakah pertikaian antara orang-orang Arab dan Afrika ini bisa diselesaikan dengan baik. Hasilnya tentu saja berlawanan dengan yang diinginkan oleh pemerintah Khartoum. Orang-orang Arab dan Afrika yang ada di sana berpandangan sama, bahwa pertikaian yang terjadi diantara mereka harus ditangani sendiri oleh mereka, dengan cara mereka sendiri walaupun harus dengan jalan kekerasan dan perang.<sup>7</sup>

Pemerintah Khartoum mengabaikan persoalan ini dengan alasan banyak hal lain yang harus diutamakan. Perlahan-lahan persoalan ini menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Kemudian pemberlakuan hukum Islam oleh pemerintah Sudan menimbulkan banyak protes dari pihak Selatan, walaupun pemerintah Sudan menjamin bahwa pemberlakuan hukum Islam ini hanya berlaku bagi pemeluk Islam.<sup>8</sup> Salah satu bentuk protes yang muncul terhadap pemerintah Khartoum adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) yang dipimpin oleh John Garang.

Selanjutnya ketegangan di Darfur pun berlanjut dengan intensitas yang makin meningkat. Bertumpuknya persoalan di wilayah yang menjadi tempat peleburan antar ras (*melting pot*), seperti yang sudah dijelaskan di atas, akhirnya menjadi konflik terbuka besar-besaran. Derajat kekerasan meningkat dan

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sejak kudeta militer pertama pada tahun 1969 pemerintah Sudan, di bawah Nimeiri condong ke Islam dan memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara. Namun saat itu hukum Islam diberlakukan karena legitimasi terhadap pemerintahan Nimeiri makin lemah. Lalu pada masa pemerintahan Omar Al-Bashir pada tahun 1989, hukum Islam kembali diberlakukan namun dengan model baru berdasarkan Piagam Sudan yang diformulasikan oleh Hasan Al-Turabi. Turabi berusaha menemukan titik temu antara umat Islam dan komunitas non-Muslim di Sudan Selatan dan ingin membuktikan bahwa sikap yang demikian itu bisa sejalan dengan dan bahkan menyokong gagasan demokrasi dan pluralisme. Penjelasan ini dapat dilihat dalam artikel *Belajar Dari Sudan, Islamika-Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, Nomor 6 Tahun 1995, hal.2-3.

pemerintah Khartoum mengabaikannya. Hingga pada awal tahun 2003, *Sudan People's Liberation Army (SPLA)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)* melakukan serangan terhadap kantor-kantor pemerintah Khartoum yang ada di Darfur. Para pemberontak ini terdiri dari bermacam etnis dan merupakan komunitas petani menetap. JEM sendiri adalah gerakan yang diduga dimotori oleh Dr. Hasan Thurabi.<sup>9</sup> Mereka menuntut agar pemerintah Khartoum tidak mengabaikan urusan politik dan ekonomi Darfur. Dari segi ekonomi, kondisi Darfur amat menyedihkan karena terjadi kelangkaan air akibat ekosistem yang berubah. Pemerintah Khartoum sudah sekian lama kurang memberi perhatian terhadap masalah krusial yang menyangkut kesejahteraan penduduk Darfur. Distribusi sumber daya yang adil, terutama distribusi sumber daya minyak di tiga wilayah yakni Abyei, Blue Nile dan pegunungan Nuba juga menjadi konsen kedua gerakan pemberontakan ini.<sup>10</sup>

## I. 2. Rumusan Masalah

Dengan munculnya kasus seperti ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Apa yang menyebabkan terjadinya konflik di Darfur, Sudan?

<sup>9</sup> Bertentangan dengan yang selama ini diisukan, Dr. Hasan Thurabi bukan *the man behind the recent uprising in Darfur*. Dia berposisi dengan pemerintah sejak akhir 1990-an. Namanya mencuat dalam konflik Darfur karena JEM (*Justice and Equality Movement*) memberikan dukungan moral dalam pertentangannya dengan pemerintah Sudan. Secara struktural, JEM dipimpin oleh Dr. Khalil Ibrahim, salah seorang kolega Turabi. *Darfur-The Logic Behind The Conflict*. <http://www.mumbai.risq.org/article362.html>, diakses tanggal 3 Juli 2005.

<sup>10</sup> *The Dilemmas of Darfur-The Politics of Disintegration, Oil, and Foreign Intervention*, [http://www.islamonline.net/English/In\\_Depth/Darfur/articles/10/article01.shtml](http://www.islamonline.net/English/In_Depth/Darfur/articles/10/article01.shtml), diakses tanggal 3 Juli 2005.

### **I. 3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan temuan kasus tersebut di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menjelaskan apa saja factor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya konflik di Darfur, Sudan?
2. Menjelaskan bagaimana konfigurasi kepentingan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Sudan.

### **I. 4. Kerangka Analisis**

Untuk keperluan analisis, perlu penulis rumuskan alat analisis yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membuat eksplanasi se-komprehensif mungkin, diantaranya menetapkan level analisis dan teori.

#### **I. 4. 1. Level Analisis**

Dalam studi Hubungan Internasional, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para analis adalah persoalan menetapkan level analisis, yaitu menetapkan apa yang harus ditelaah atau diamati. Hal ini dikarenakan fenomena hubungan internasional sangatlah kompleks, sehingga para analis tidak mungkin menjelaskan fenomena hubungan internasional dalam berbagai perspektif untuk menemukan jawaban yang komprehensif.

Peneliti menetapkan level analisis sebagai berikut<sup>11</sup> :

#### **I. Perilaku kelompok**

---

<sup>11</sup> Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional : Metodologi dan Analisis*, (Jakarta : LP3ES, 1990), hal. 41-42.

Ilmuwan yang menekankan tingkat analisa ini berasumsi bahwa individu umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional sebetulnya adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Artinya, peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu, tetapi oleh kelompok kecil (seperti cabinet, dewan penasehat keamanan, politburo, dan sebagainya) dan oleh organisasi. Dengan demikian, dalam memahami hubungan internasional kita harus mempelajari perilaku kelompok-kelompok kecil dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. Di Sudan terdapat segregasi geografi berdasarkan kelompok komunal, dengan memuat identitas agama dan suku di dalamnya. Hal ini membawa persoalan ketika pemerintah tidak mampu mengakomodasi semua kelompok.

## 2. Negara-Bangsa

Analisis yang menekankan tingkat ini berasumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Perilaku unit negara-bangsa menjadi objek kajian. Dalam hal ini, perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga dan proses perpolitikan mereka hanya akan diperhatikan sejauh perilaku mereka itu berkaitan dengan tindakan internasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, kita harus mempelajari proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa sebagai suatu unit yang utuh.

Sudan sebagai sebuah negara-bangsa memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Kebijakan pemerintah Sudan yang pro Utara dan berlakukan system ekonomi pembangunan juga merupakan bagian dari kedaulatannya.

### 3. Sistem internasional

Analisis yang menckankan tingkat ini berasumsi bahwa bangsa-bangsa di dunia ini dan interaksi diantara mereka merupakan suatu sistem. Struktur sistem itu dan perubahan-perubahan yang dialaminya selama ini telah menentukan perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat di dalamnya. Sistem sebagai lingkungan telah menentukan perilaku negara-bangsa. Pengetahuan tentang dinamika sistem yang beranggotakan berbagai negara-bangsa bisa dipakai untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat di dalamnya.

Sudan merupakan anggota Uni Afrika sehingga terikat system organisasi regional tersebut. Dalam penyelesaian perdamaian konflik di Darfur, Uni Afrika banyak berperan dalam menjembatani pihak-pihak yang bertikai agar bisa duduk bersama.

#### 1.4.2. Teori

##### 1. 4. 2. 1 Teori Konflik Domestik

Studi yang dirangkum oleh Michael E. Brown mengenai fenomena konflik domestik di berbagai negara Afrika dan Asia yang meliputi kompetisi antara masyarakat dengan kekerasan, kudeta militer, perang antarsuku, kampanye ideologi melalui praktek militerisasi, insurgensi, perang sipil, dan revolusi menunjukkan adanya suatu permasalahan yang secara umum mencakup upaya pembangunan masyarakat sipil, tertib politik, dan hubungan konfliktual antara

pemerintah pusat dan daerah.<sup>12</sup> Dari hasil studi tersebut, Brown mengidentifikasi empat kelompok faktor penyebab terjadinya konflik domestik, yaitu faktor struktural, faktor politik, faktor sosial ekonomi, faktor budaya dan persepsi.<sup>13</sup>

**Faktor struktural.** Yang dapat digolongkan sebagai faktor struktural penyebab konflik domestik adalah *weak state*, *intra state security cocern*, dan *ethnic geography*. *Weak state* merupakan titik awal bagi terjadinya dua faktor yang lain. *Weak state* adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya legitimasi kekuasaan pemerintah tidak cukup kuat untuk menjadi landasan hukum operasionalisasi seluruh regulasi yang mengantar berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Legitimasi yang lemah ini mengakibatkan tidak efektifnya kontrol terhadap wilayah perbatasan, disfungsi berbagai institusi politik dan pemerintahan, serta mendorong destabilisasi sistem politik secara keseluruhan. *Weak state* terjadi karena korupsi yang membudaya di setiap level birokrasi, ketidakefektifan dari aparat pemerintah, dan kegagalan pembangunan ekonomi. Para ilmuwan seringkali menyebut kondisi seperti itu sebagai *collapse state*.<sup>14</sup>

Ketika negara dalam keadaan lemah dan tidak mampu memberi pelayanan keamanan yang efektif bagi seluruh kelompok ekonomi sosial dalam masyarakatnya, biasanya suatu kelompok sosial yang merasa eksistensinya terancam oleh aktivitas kelompok sosial lain, cenderung untuk menciptakan aparat keamanannya sendiri. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat

<sup>12</sup> Michael E. Brown, "Introduction", dalam Michael E. Brown, ed, *The International Dimentions of Internal Conflict* (Cambridge, MA and London : The Mit press, 1996) hal 29.

<sup>13</sup> *Loc.Cit.*,

<sup>14</sup> *Loc.Cit.*, hal 19.

terhadap aparat keamanan negara yang diwujudkan dalam pembentukan berbagai pasukan paramiliter. Ketidakpastian keamanan dan munculnya kelompok paramiliter disebut sebagai *intra state security concern*.<sup>15</sup>

Faktor ketiga yang juga tergolong dalam faktor struktural adalah *ethnic geography*. Konsep ini mengacu pada komposisi etnik dalam suatu wilayah tertentu yang meliputi heterogenitas etnik dan hubungan antara etnik mayoritas dengan etnik minoritas. Ada kecenderungan bahwa semakin heterogen suatu komposisi etnik di suatu wilayah, akan semakin besar pula potensi konflik di daerah tersebut. Namun beberapa kasus menunjukkan bahwa suatu wilayah yang tingkat heterogenitasnya rendah tidak menunjukkan kohesi antarkelompok etnik. Oleh karena itu, heterogenitas menjadi faktor potensial bila ditunjang oleh faktor lain, misalnya sikap dan perlakuan kelompok etnik mayoritas terhadap kelompok etnik minoritas.<sup>16</sup>

**Faktor politik.** Brown mengidentifikasi 4 kondisi yang dapat digolongkan sebagai faktor politik penyebab konflik domestik, yaitu institusi politik yang diskriminatif, ideologi nasional yang eksklusif, perpolitikan antarkelompok, dan elit politik. Rasa ketidakpuasan dapat muncul apabila institusi politik dalam suatu negara tidak merepresentasikan seluruh kelompok politik yang ada. Suatu sistem politik hanya didominasi oleh sekelompok kecil individu atau golongan yang memonopoli seluruh proses dan keputusan politik serta bertindak represif kepada berbagai kelompok yang menjadi oposisinya. Ketidakpuasan terhadap sistem politik yang diskriminatif tersebut kerap kali direalisasikan melalui cara-cara non-

---

<sup>15</sup> *Loc. Cit.*, hal 19-20.

<sup>16</sup> *Loc. Cit.*, hal 20.



konvensional seperti demonstrasi dan pemogokan serta tindakan-tindakan kekerasan.<sup>17</sup>

Selain institusi politik yang diskriminatif, nasionalisme yang menjadi identitas sosial politik suatu negara juga tidak berasal dari perpaduan antara berbagai paham sosio-kultural dan politik dari seluruh komponen bangsa, melainkan terbentuk dari dominasi paham nasional suatu etnik tertentu. Dalam kondisi demokrasi yang labil dan belum mapan, nasionalisme etnisitas berkembang dengan subur sebagai reaksi atas paham kebangsaan yang eksklusif tersenut. Tidak jarang terjadi keinginan untuk keluar dari eksklusifitas ideologi nasional yang dianggap sempit tersebut oleh berbagai kelompok etnik yang merasa identitasnya terpinggirkan. Kompetisi politik antarkelompok dalam suatu sistem demokrasi yang masih labil dan belum mapan biasanya disertai oleh aksi kekerasan di kalangan media massa. Politik kekerasan antarkelompok dapat semakin parah bila disusupi oleh kepentingan elit politik oportunistis.

**Faktor sosial ekonomi.** Brown menyebutkan bahwa krisis ekonomi, system ekonomi yang diskriminatif, serta ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan dan modernisasi dapat mendorong terjadinya konflik domestik. Krisis ekonomi berkepanjangan yang melumpuhkan perekonomian negara menimbulkan ketidaktertiban sosial dalam masyarakat, misalnya inflasi tinggi dan pengangguran yang dapat memicu peningkatan kriminalitas. Sementara itu pemerintah tidak memiliki sumber keuangan yang cukup untuk membiayai upaya penegakan keamanan, sehingga terjadi keresahan sosial yang pada akhirnya

---

<sup>17</sup> *Loc.Cit.,*

menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan negara. Kebangkrutan ekonomi tersebut semakin memperkuat upaya-upaya kelompok etnik atau daerah tertentu untuk memisahkan diri.<sup>18</sup>

Perekonomian negara yang dikelola secara despotis yang menyebabkan tidak meratanya distribusi hasil pembangunan menimbulkan ketimpangan pembangunan dan aksi-aksi protes untuk memperjuangkan akses yang lebih besar terhadap pengelolaan perekonomian. Protes yang keras muncul dari kelompok-kelompok sosial di daerah yang memiliki sumber daya ekonomi besar namun mendapat hasil yang tidak sebanding dengan sumber daya yang mereka miliki. Sentralisasi dan nepotisme ditengarai sebagai sebab utama separatisme di berbagai daerah.

Di banyak negara berkembang, modernisasi justru menghasilkan dampak yang kontraproduktif. Kemajuan teknologi dianggap sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan tradisi budaya masyarakat lokal. Modernisasi semakin menimbulkan rasa kesadaran terhadap identitas pribadi dan identitas orang lain, sehingga semakin tampak perbedaan di antara mereka. Perbedaan-perbedaan tersebut dianggap ancaman terhadap identitas pribadinya. Modernisasi yang semakin memisahkan ideologi kebangsaan dari masyarakatnya merupakan ruang kosong yang mengundang hadirnya paham fundamentalis. Bagi negara, fundamentalisme ini merupakan ancaman terhadap integrasi nasional yang harus ditindak secara represif.

---

<sup>18</sup> Michael E. Brown, *op.cit.*, hal. 20.

#### 1. 4. 2. 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori ini dicetuskan oleh W.W. Rostow. Teorinya mempengaruhi model pembangunan di hampir semua negara Dunia Ketiga. Pikiran Rostow pada dasarnya dikembangkan dalam konteks Perang Dingin serta membendung pengaruh sosialisme. Teori pertumbuhan adalah suatu bentuk teori modernisasi yang menggunakan metafora pertumbuhan, yakni tumbuh sebagai organisme. Rostow melihat perubahan sosial, yang disebutnya sebagai pembangunan, sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Asumsinya adalah bahwa semua masyarakat termasuk masyarakat Barat pernah mengalami 'tradisional' dan akhirnya menjadi 'modern'. Sikap manusia tradisional dianggap sebagai masalah. Seperti pandangan Rostow dan pengikutnya, *development* akan berjalan secara hampir otomatis melalui akumulasi modal (tabungan dan investasi) dengan tekanan bantuan dan hutang luar negeri. Dia memfokuskan pada perlunya elit wiraswasta yang menjadi motor proses itu.<sup>19</sup>

Ada lima tahapan pembangunan ekonomi. Tahap pertama adalah masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lantas diikuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan, yakni masyarakat industri yang disebutnya sebagai masyarakat konsumsi masa tinggi (*high mass consumption*). Bagaimana masyarakat modern yang dicita-citakan dapat dicapai, Rostow mengajukan persyaratan utamanya yakni tersedianya modal. Beberapa saran diajukan untuk mendapatkan modal. Modal

---

<sup>19</sup> *Op.Cit.*, hal. 20.

harus diusahakan melalui penggalan investasi dengan cara pemindahan sumber dana atau kebijakan pajak. Selain itu modal juga didapat melalui lembaga-lembaga keuangan atau obligasi pemerintah untuk tujuan produktif. Selebihnya modal juga dapat dihimpun melalui devisa dari perdagangan internasional. Saran Rostow terakhir, dan nampaknya yang terpenting untuk mendapatkan modal adalah melalui penarikan investasi modal asing. Di antara tahapan yang penting adalah tahapan tinggal landas. Baginya tahapan ini merupakan tahapan krusial dan oleh karena itu harus diusahakan kemampuan melakukan investasi sampai 10 % dari pendapatan nasional untuk bidang yang menguntungkan seperti industri.

### **1. 5. Hipotesis**

Merujuk pada latar belakang masalah, perumusan masalah serta penetapan kerangka analisis, maka kesimpulan sementara yang dapat peneliti rumuskan dalam mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal penyebab konflik di Darfur adalah sebagai berikut :

- Sejak merdeka tahun 1956, Sudan mengalami permasalahan internal, salah satunya adalah beberapa kali pergantian pemerintahan. Hal ini diakibatkan oleh legitimasi yang lemah. Legitimasi yang lemah ini mengakibatkan tidak efektifnya kontrol terhadap wilayah perbatasan, disfungsi berbagai institusi politik dan pemerintahan, serta mendorong destabilisasi sistem politik secara keseluruhan.

- Permasalahan internal Sudan yang lain adalah krisis ekonomi, sistem ekonomi yang diskriminatif, serta ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan dan modernisasi. Hal ini mulai dirasakan ketika pemerintah Sudan menerapkan SAP (*Structural Adjustment Program*) dari IMF. Dan terbukanya Sudan terhadap modal asing justru mematikan sector local.
- Sudan yang pernah dijajah Inggris mendapatkan warisan colonial yang pahit, yakni rusaknya sistem kearifan local akibat penerapan sistem administrasi local oleh Inggris.
- Adanya gangguan dari negara-negara tetangga seperti Chad dan Libya makin menambah persoalan bagi Sudan.
- Dengan masuknya kepentingan 2 negara adidaya, AS dan Uni Soviet yang menjadikan Sudan sebagai *pivotal state*, maka keamanan sistem suku di Sudan pun terganggu. Kedua negara mempersenjatai, tidak hanya pemerintah Sudan, namun juga suku-suku yang ada di Sudan.

## 1.6. Metodologi

### 1. 6. 1. Definisi Konseptual

Untuk kejelasan dalam memahami sebuah konsep diperlukan definisi konseptual yaitu definisi yang menggambarkan konsep dengan menggunakan konsep-konsep lain<sup>20</sup>.

#### 1. 6. 1. 1. Konflik

---

<sup>20</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan nternasional-Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES, 1990), hal. 98.

Definisi konseptual yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini adalah definisi konflik. Konflik didefinisikan oleh Ross Stagner sebagai berikut<sup>21</sup>:

.....*Conflict is a situation in which two or more human beings desire goals which they perceive as being obtainable by one or the other but not both. This compact definition can be opened out and clarified by saying that there must be at least two parties; each parties is mobilizing energy to obtain a goal, a desired object or situation; and each party perceives the other as a barrier or threat to that goal...*

Pada prinsipnya, konflik adalah suatu situasi dimana ada dua atau lebih pihak yang ingin mencapai suatu tujuan dan mereka merasa bahwa hanya ada satu pihak yang dapat memperolehnya. Dalam definisi ini, setidaknya harus ada dua pihak dan masing-masing pihak mengerahkan tenaganya untuk memperoleh suatu tujuan, suatu objek yang diinginkan atau suatu situasi dan masing-masing pihak merasa bahwa pihak lain merupakan penghalang atau ancaman dalam pencapaian tujuan tersebut.

#### **1.6.1.2. Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan tujuan yang mendasar serta factor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan politik luar negeri. Hans J. Morgenthau menjelaskan tujuan-tujuan kebijakan luar negeri harus didefinisikan dalam kerangka kepentingan nasional. Atau dengan kata lain kepentingan nasional adalah hal yang mendasari kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> C.R. Mitchell, *The Structure of International Conflict* (London : The MacMillan Press Ltd, 1981) hal 15.

<sup>22</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations : The Struggle for Power Fourth Revised Edition*, (New York : Alfred A. Knof, 1978), hal. 33

## **1. 6. 2. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mencandra (mendeskripsikan) kegiatan yang harus dilakukan kalau kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep.<sup>23</sup>

### **1. 6. 2. 1. Konflik**

Pada prinsipnya, konflik adalah suatu situasi dimana ada dua atau lebih pihak yang ingin mencapai tujuan dan mereka merasa bahwa hanya ada satu pihak yang dapat memperolehnya. Dalam definisi ini setidaknya harus ada dua pihak dan masing-masing pihak mengerahkan tenaganya untuk memperoleh suatu tujuan, suatu objek atau situasi dan masing-masing pihak merasa bahwa pihak yang lain merupakan penghalang atau ancaman dalam pencapaian tujuan tersebut.

Konflik yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada ketidakcocokan antara nilai social dan struktur social. Kegagalan struktur social dalam menciptakan relasi yang adil antara kelompok menjadi sumber utama konflik.

### **1. 6. 2. 2. Kepentingan Nasional**

Dalam menganalisis permasalahan yang ada, penelitian ini berpijak pada asumsi dasar bahwa kebijakan suatu negara, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri, selalu ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional negara yang bersangkutan secara maksimal. Menurut Hans. J. Morgenthau, perilaku negara dalam hubungan internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, dan

---

<sup>23</sup> Mohtar Mas'oe'd (1990), *op.cit.* hal. 100.

kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan atau memperbesar kekuatan negara.<sup>24</sup>

Dalam hubungan internasional, hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih banyak didasarkan pada kepentingan nasional dari masing-masing negara yang terlibat. Kepentingan nasional suatu negara timbul dari interaksi sejumlah factor, sebagaimana yang dinyatakan oleh Charles O. Lerche :

*National interest arises out of interaction of factors whose precise effect varies from state to state; geographics and strategic position; the level of political economic and social development; national history, tradition, and culture; the over "weltansthung" of the people.*<sup>25</sup>

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional dapat diukur berdasarkan dua kerangka yaitu<sup>26</sup> :

a. Dari keselamatan dan keamanan nasional.

b. Dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa; dimana kedua hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional yang mendasar, yaitu *national survive value*.

Kepentingan nasional yang merupakan kebutuhan-kebutuhan nasional yang menjadi dasar dari kebijakan nasional, oleh Donald E. Nuchterlein, dibagi ke dalam empat kepentingan fundamental, yaitu<sup>27</sup> :

---

<sup>24</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 1994), hal. 35.

<sup>25</sup> Charles O. Lerche, Jr. *Principles of International Politics*, (London : Oxford University Press, 1996) hal. 34.

<sup>26</sup> Hans J Morgenthau, *op.cit* hal. 103.

<sup>27</sup> David D. Nuchterlein, *The Concepts of National Interest : A Time for New Approaches*, dalam *Orbis : A Journal of World Affairs*, Vol. 23 No. 1, Spring 1976, hal. 76.



a. *Defence Interest*

Adalah kepentingan untuk melindungi negara-bangsa dan rakyatnya dari ancaman fisik yang dilakukan oleh negara lain atau suatu ancaman yang berasal dari luar terhadap system politik nasional.

b. *Economic Interest*

Kepentingan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain.

c. *World Order Interest*

Merupakan kepentingan untuk memelihara suatu system politik dan ekonomi internasional dimana di dalamnya negara dan rakyatnya dapat merasa aman, serta perdagangan dapat beroperasi secara aman di luar batas wilayahnya.

d. *Ideological Interest*

Yaitu kepentingan untuk melindungi dan memajukan seperangkat nilai yang dianut oleh masyarakat negara-bangsa yang percaya akan kebenarannya secara universal.

### 1. 6. 3. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

### 1. 6. 4. Jangkauan Penelitian

Kajian yang membahas tentang factor-faktor penyebab konflik Darfur ini dimulai sejak masa pra kemerdekaan hingga tahun 2003, saat konflik Darfur pecah.

#### 1. 6. 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang ditekankan lewat eksplorasi terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, majalah, koran, sumber naskah pidato, otobiografi, dokumen.<sup>28</sup> Data-data yang diperoleh melalui internet juga menjadi sumber rujukan yang cukup penting dalam penelitian ini.

#### 1. 6. 6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>29</sup> Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, proses analisis data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Dr. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 103.

<sup>30</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi), Cet 1, (Jakarta : UI Press, 1992), hal. 15-20, dikutip dari Catur Prayitno, *Perubahan Kebijakan Luar Negeri RI Dalam Penyelesaian Status Timor-Timur – Studi Perbandingan Terhadap Kebijakan Luar Negeri RI Masa Pemerintahan Soeharto dan B.J. Habibie*, (FISIP UNAIR, 2001), hal.47.

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.<sup>31</sup>

#### **1. 6. 7. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I. Pendahuluan**

Dalam Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka analisis, perumusan hipotesis dan metodologi.

##### **BAB II. Latar Belakang Konflik Darfur**

Dalam Bab ini memuat latar belakang yang mendasari terjadinya konflik Darfur yang terdiri dari factor internal serta eksternal.

##### **BAB III. Prospek Penyelesaian Konflik Darfur**

Dalam Bab ini memuat bagaimana prospek penyelesaian konflik Darfur ditinjau dari upaya penyelesaian damai yang digagas oleh pihak-pihak yang bertikai.

##### **BAB IV. Kesimpulan**

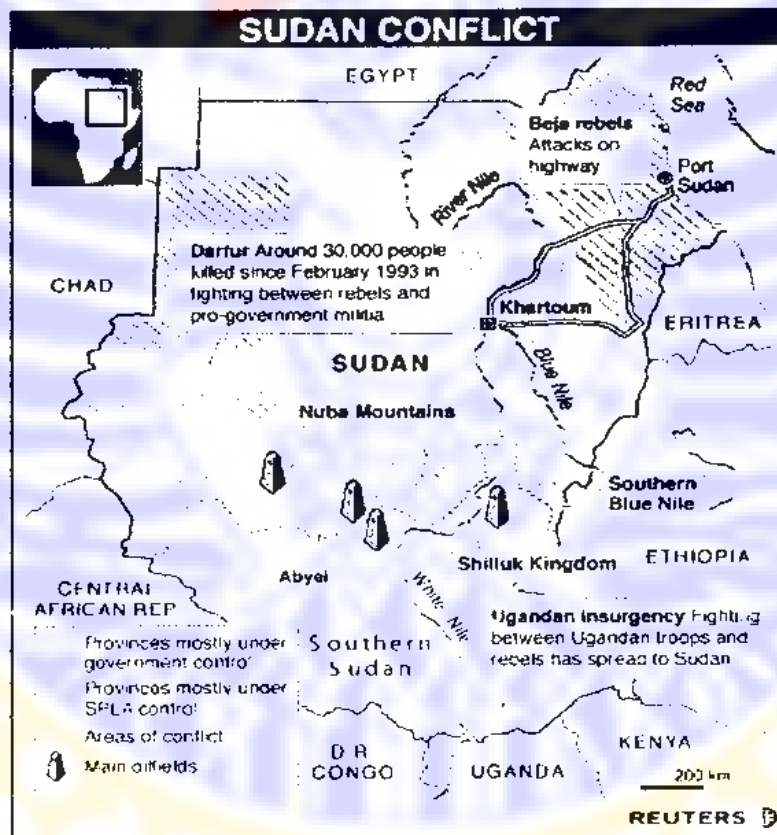
---

<sup>31</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hal. 4-5.

## BAB II

### LATAR BELAKANG KONFLIK DI DARFUR, SUDAN

Dalam BAB II ini akan dibahas faktor-faktor internal serta eksternal yang menjadi akar konflik di Darfur. Penjelasan dalam BAB II ini cenderung memakai kajian historis sejak awal Sudan merdeka sampai terjadinya konflik di Darfur.



[www.reuters.com](http://www.reuters.com)

## 1. Faktor Internal

### 1.1. Struktur Sosial

Ketidakselarasan yang menandai hubungan antara Utara dan Selatan di Sudan memiliki berbagai latar belakang yang kompleks. Salah satu diantaranya adalah pengalaman traumatis. Di abad lalu, daerah Selatan adalah tempat berburu budak untuk dijadikan tentara atau diperdagangkan di Mesir dan Turki. Perdagangan budak meningkat pada zaman Muhammad Ali, orang Albania yang menjadi gubernur Kekhalifahan Usmaniyah di Mesir.<sup>32</sup>

Perdagangan budak terus berlangsung walaupun sentimen anti perdagangan budak meningkat sejak pertengahan abad ke-19. Persepsi kedua belah pihak, yaitu antara suku-suku Arab-Muslim di Utara dengan suku-suku di Selatan, dipengaruhi oleh perburuan dan perdagangan budak adalah suku-suku Arab-Muslim dari wilayah Utara Sudan, Mesir atau Turki. Yang menjadi budak adalah suku-suku di Selatan. Di kalangan mereka, kecurigaan, kekuatiran, dan ketidakpercayaan terhadap Utara yang lebih dominan sudah lama terasa.<sup>33</sup>

Melalui berbagai proses, kolonialisme Inggris turut melanggengkan dan meningkatkan perpecahan tersebut. Pada masa kolonialisme, daerah Selatan dan Utara berkembang secara terpisah dan timpang sebagai efek kebijakan Inggris. Di wilayah Utara Inggris membuka perkebunan kapas, membangun jalur kereta api, dan mendirikan sekolah-sekolah pemerintah. Penduduk di Utara juga dipandang sebagai pasar potensial bagi produk-produk ekspor Inggris.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Samsurizal Panggabean, *Politik dan Agama di Sudan : Turabi dan Masalah Selatan*, ISLAMIKA-Jurnal Dialog Pemikiran Islam, hal. 48.

<sup>33</sup> *Op.cit* hal. 49.

<sup>34</sup> Samsurizal Panggabean, *Op.Cit.*,

Di Selatan, Inggris cenderung menelantarkan persoalan-persoalan pemerintahan, ekonomi, social, dan pendidikan. Berbeda dengan wilayah Utara, Selatan tidak dipandang sebagai sumber bahan mentah atau mineral, dan bukan pasar potensial. Pendidikan layanan social di Selatan diserahkan kepada misionaris-misionaris Katholik. Belakangan, pemerintah colonial mensubsidi sekolah-sekolah misionaris tersebut, tapi tetap tidak membangun sekolah pemerintah. Sementara itu, penduduk di Selatan harus berganti agama supaya bisa sekolah dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Di Utara sekolah pemerintah tetap menggunakan bahasa Arab dan tidak ada keharusan berganti agama bagi calon murid.<sup>35</sup>

Lebih jauh lagi, pada 1922 Inggris mulai menetapkan wilayah Selatan sebagai “distrik tertutup”. Penduduk Muslim dari Utara dilarang memasuki wilayah Selatan atau berdagang di sana, dengan alasan melindungi Selatan dari eksploitasi Utara. Kemudian, pengaruh budaya Arab, seperti nama, bahasa, pakaian, dan adat-istiadat, diberantas dan suku-suku di Selatan dianjurkan supaya kembali ke tradisi kesukuan mereka. Usaha-usaha melindungi Selatan ini berubah menjadi politik segregasi yang belakangan terbukti berbahaya.<sup>36</sup>

Lantas, pada 1946, sepuluh tahun sebelum kemerdekaan, Inggris secara total menghentikan kebijakan segregasi. Pejabat dari Utara mulai ikut memerintah di selatan, larangan berdagang dan keluar masuk selatan dihapuskan, dan upah pekerja selatan disamakan dengan pekerja Utara. Selain itu, berbagai larangan dan rintangan terhadap para penganut Islam yang tinggal di Selatan dihilangkan dan

---

<sup>35</sup> *Op.Cit.*,

<sup>36</sup> *Op.Cit.*,

penggunaan bahasa Arab kembali diperkenalkan. Perubahan drastis ini dimaksudkan Inggris untuk menyiapkan penduduk wilayah Selatan dan Utara menjadi bangsa dan warganegara yang dapat hidup berdampingan secara rukun dalam satu negara.<sup>37</sup>

Tapi terlambat. Lagi pula, satu dasawarsa terlalu singkat untuk menghilangkan trauma lama zaman perbudakan dan efek berbagai kebijakan kolonialisme Inggris. Keduanya, yaitu trauma perbudakan dan efek kolonialisme, sudah memperlebar berbagai jurang pemisah yang sudah ada antara suku-suku animis dan Kristen di selatan; antara wilayah Utara yang relative maju secara social dan ekonomi dengan Selatan yang tertinggal.<sup>38</sup>

*Idara ahlia (Native Administration/Pemerintahan Lokal)* yang dikembangkan oleh pemerintah kondominium Inggris selama awal abad ke-20 guna menyelesaikan masalah administrasi local untuk sebuah negara yang wilayahnya luas. Pada saat pemerintah kondominium Inggris mengambil alih Sudan, nyaris tidak terdapat struktur pemerintahan dalam administrasi Sudan. Oleh karena itu Inggris kemudian memindahkan kekuasaan yang signifikan kepada para pemimpin suku, mengikuti pola-pola yang sudah ada sebelumnya.<sup>39</sup>

Inggris menggunakan semacam peraturan langsung berdasarkan pada sebuah model yang dikembangkan oleh Frederick Lugard, Komisioner Tinggi Inggris di Nigeria. Model Lugardian merupakan bentuk praktis dari pemerintahan dan kontrol yang akan memungkinkan penduduk lokal untuk secara bebas

<sup>37</sup> Samsurizal Panggabean, *Op.Cit.*,

<sup>38</sup> *Op.Cit.*,

<sup>39</sup> *Conflict in Darfur- A Different Perspective*, [www.htsps.com/pdfs/ConfDar.pdf](http://www.htsps.com/pdfs/ConfDar.pdf), diakses tanggal 22 Agustus 2005

mengelola urusan-urusannya sendiri menggunakan peraturan yang mereka buat sendiri, di bawah arahan staf pemerintah Inggris, subjek hukum serta kebijakan pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada hal-hal fundamental sebagai berikut<sup>40</sup>:

1. Sebuah hierarki politik yang ada dalam pemerintahan lokal dimana para pemimpin di tingkat lokal akan memperoleh kekuasaan dari pemerintah pusat dan memiliki wewenang untuk memelihara hukum dan peraturan, organisasi-organisasi buruh serta pajak-pajak lokal.

2. Sebuah hierarki parallel yang terdapat dalam peradilan lokal yang akan menghadapi kasus kriminal ringan, kasus-kasus sipil dan personal yang berkaitan dengan hukum adat serta prinsip-prinsip umum keadilan.

3. Perbendaharaan/bunga rampai lokal yang akan melakukan pengelolaan terhadap penghasilan lokal dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan oleh otoritas lokal serta pelayanan-pelayanan social

4. Sebuah tim yang terdiri dari staf lokal yang akan melaksanakan tugas-tugasnya di bawah arahan para pejabat Inggris, subjek hukum serta kebijakan pemerintah.

Aplikasi dari model semacam ini di Sudan diartikan bahwa Inggris memilih penyatuan antara kesukuan yang sifatnya tradisional dengan para pemimpin desa dalam struktur pemerintahan. Pemerintahan lokal atau pemerintahan berdasarkan kesukuan didasarkan pada sistem yang sudah ada sebelumnya yang membagi wilayah dalam 'dar-dar' atau wilayah-wilayah suku.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> *Conflict in Darfur- A Different Perspective, Op.Cit.,*

<sup>41</sup> *Conflict in Darfur- A Different Perspective, Op.Cit.,*



Oleh karena itu maka para Nazir, Omdas serta Sheikh dipercaya untuk mengurus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan, peradilan serta kebijakan di wilayahnya masing-masing. Sistem tersebut secara bertahap berkembang dan akhirnya dilegalkan setelah berlakunya serangkaian peraturan pada tahun 1922, 1925, 1927 dan 1928 dan akhirnya dikonsolidasikan dalam Peraturan Peradilan Lokal tahun 1932, yang meregulasi pemerintahan dan kekuasaan untuk menetapkan kebijakan yang dimiliki oleh para Sheikh serta menentukan hierarki dalam peradilan-peradilan lokal di Sudan masa pemerintahan Inggris-Mesir. Sistem semacam itu menyediakan/memberi keamanan dengan jumlah staf yang minimal serta finansial. Model tersebut terus mengalami modifikasi, kerangka kerja pemerintahan lokal diperkenalkan tahun 1932, dan kotamadya, kotapraja serta perkotaan didirikan tahun 1937. Bagaimanapun juga, para pemimpin suku tradisional dengan kekuasaan eksekutif, finansial serta legislative yang mereka miliki merupakan bagian yang integral dalam kerangka kerja pemerintahan lokal.<sup>42</sup>

Perkembangan selanjutnya terjadi di tahun 1951 dengan terbentuknya Peraturan Pemerintahan Lokal yang baru. Menurut susunan yang baru tersebut para Nazir ambil peranan dalam pembentukan lembaga-lembaga lokal yang mengambil alih kekuasaan finansial dan eksekutif yang diberikan pada para Sheikh dan Omdas.

Peranan Pemerintahan Lokal adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

<sup>42</sup> *Op. Cit.*,

<sup>43</sup> *Conflict in Darfur- A Different Perspective ,loc.cit.*,

1. Menjamin terbentuknya manajemen yang baik dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan komunitas lokal kesukuan.
2. Mengalokasikan lahan untuk agrikultur dan penggembalaan (*hakura*)
3. Menjaga keamanan.
4. Berkomunikasi dengan lembaga-lembaga di tingkat lokal, propinsi serta nasional.
5. Mengumpulkan pajak dan pungutan-pungutan lain.
6. Menyelesaikan konflik di tingkat lokal.
7. Memobilisasi masyarakat
8. Mengetuai peradilan-peradilan lokal kesukuan/sub suku.

Untuk Fur, Pemerintahan Lokal mengurangi status mereka sama seperti kelompok etnis yang lain, dan sebagian hak-hak istimewa dalam bidang ekonomi dan pemerintahan dihilangkan. Tapi bagi banyak kelompok etnis hal tersebut meningkatkan pengaruh serta otoritas mereka. Pemerintahan Lokal (*Native Administration*) menyediakan sebuah sistem pemerintahan lokal yang mengelola penggunaan sumber daya alam dan mengizinkan berbagai macam kelompok untuk hidup berdampingan secara damai serta kondisi yang stabil. Shazali dan Abdel Ghaffar (1999) mendiskusikan peranan pemerintahan lokal dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan alokasi sumber daya serta mengatur aktivitas penggembalaan bermacam suku yang berbeda serta orang luar untuk mencegah terjadinya konflik antara petani dan peternak. Hal ini termasuk penentuan batas-batas penggembalaan yang membuat batas demarkasi antara wilayah penggembalaan dan pertanian; regulasi gerakan musiman dari para peternak

dalam hal penentuan waktu dan rute dari musim kering hingga ke musim basah di wilayah-wilayah penggembalaan; pembatasan dan penahanan bercampurnya suku-suku di wilayah-wilayah penggembalaan dan membuka serta menutup sumber-sumber air<sup>44</sup>.

Walaupun peran vital Pemerintahan Lokal adalah sebagai peraturan tidak langsung, hal tersebut menjadi persoalan yang mengundang perdebatan yang cukup intens serta mengundang kecaman di Sudan. Salah satu aspek yang diperdebatkan adalah penciptaan dikotomi yang tidak sehat antara orang-orang Sudan yang terdidik dan para kepala suku. Hal itu menciptakan ketegangan antara dua kelompok ini dengan menyisakan/memberikan *stereotype* pada para kepala suku sebagai antek rezim kolonial. Di sisi lain para pemimpin suku memandang orang-orang Sudan yang terdidik sebagai sebuah ancaman yang potensial yang bisa mengurangi kekuasaan serta *prestise* yang mereka miliki. Kritikan lain muncul berkaitan dengan persoalan orisinalitas konsep dan posisinya dalam pembangunan. Banyak ilmuwan Sudan yang percaya bahwa Pemerintahan Lokal (*Native Administration/Tribal Administration/idara ahlia*) merupakan sebuah sistem yang bersifat langsung, terpusat serta birokratis yang berbeda dengan model tidak langsung yang diadopsi di Nigeria dan jajahan Inggris lain yang ada di Afrika<sup>45</sup>. Abdullah Ahmad An-Na'im, seorang Profesor hukum pada Emry University, mengemukakan analisisnya tentang hal ini, bahwa ide atau gagasan penjajah Inggris untuk membentuk *Native Administration (idara ahlia)* pada masyarakat Afrika, yang dilakukan dengan memberikan kekuasaan serta

---

<sup>44</sup> Conflict in Darfur- A Different Perspective *loc.cit.*,

<sup>45</sup> *Loc.Cit.*,

kewenangan yang tinggi pada para kepala suku telah mengganggu atau merusak kemudahan dan fleksibilitas sistem tradisional yang selama ini berlaku dan merusak sistem mediasi konflik informal yang selama ini dijalankan oleh suku-suku yang eksis di Darfur. Sehingga, dari sini dapat disimpulkan bahwa sejak awal, pembentukan Pemerintahan Lokal (*Native Administration/idara ahlia*) oleh kolonial Inggris ini sebenarnya sudah menimbulkan masalah, walaupun ada konflik suku yang relative mampu diselesaikan menggunakan sistem ini, dibandingkan dengan revisi terhadap sistem ini yang dilakukan oleh pemerintah Sudan pasca kemerdekaan. Revisi terhadap sistem ini membuat situasi di Darfur, yang sebelumnya sudah buruk, menjadi semakin buruk dengan semakin banyaknya perselisihan dan konflik yang terjadi diantara berbagai suku yang eksis di Darfur.<sup>46</sup>

Pada akhir 1960-an, perang etnis yang terus berlangsung di Selatan telah memakan banyak korban. Para pemberontak yang terlibat dalam perang ini kemudian bersembunyi di hutan-hutan atau melarikan diri ke kam-kam pengungsi yang ada di negara-negara tetangga. Kemudian pada tahun 1969 para pemberontak mengadakan kontak dengan negara-negara lain guna mendapatkan bantuan persenjataan serta peralatan. Hasilnya, mereka mendapatkan bantuan senjata dan *supply* peralatan dari Israel, yang dikirim via Etiopia dan Uganda. Di samping memberikan persenjataan serta peralatan, Israel juga memberikan pelatihan kepada pemberontak Anya Nya. Anya Nya juga membeli persenjataan dari para pemberontak Congo. Operasi-operasi yang dilakukan pemerintah Sudan

---

<sup>46</sup> *Causes and Solutions for Darfur*,  
[http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20040815/news\\_lz1e15darfur.html](http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20040815/news_lz1e15darfur.html), diakses 19 November 2005

melawan para pemberontak mengalami penurunan setelah *coup* tahun 1969, dan berakhir dengan *Addis Ababa Accord* tahun 1972 yang memberikan jaminan otonomi bagi pihak Selatan<sup>47</sup>.

Di Sudan, terdapat ketegangan yang akut antara pendukung nasionalisme etnis, yang mempunyai paradigma bahwa orang Arab yang Islam sudah melakukan dominasi terhadap kehidupan politik sejak kemerdekaan Sudan pada tahun 1956 dengan para pendukung nasionalisme territorial, yang mencoba melakukan restrukturisasi sistem dalam rangka menghormati hak-hak minoritas dan menciptakan sebuah identitas politik yang umum. Ketegangan tersebut makin diperbesar oleh adanya gangguan yang diakibatkan diterapkannya *control model*, bukan *pluralist model*, dimana nasionalis etnis yang berkuasa mempertahankan agama utama serta bahasa yang paling banyak digunakan sebagai alat pendefinisian identitas negara dan diekspresikan pada sistem legal serta sistem politik mereka. Dalam pengertian ini, mereka menuntut dan mendesak agar negara Sudan adalah negara Muslim dan Arab adalah karakter negara Sudan. Mereka melihat bahwa bahasa Arab dipelajari oleh sebagian besar anak muda di sekolah dan digunakan sebagai *lingua franca* dalam perdagangan dan pemerintahan pusat. Dalam pandangan mereka, orang-orang minoritas yang berbicara dengan bahasa lokal atau menganut agama Kristen atau sistem kepercayaan pribumi harus terasimilasi secara kultural ke dalam mayoritas Arab yang Islam atau tetap berada dalam daerah-daerah kantong yang terpisah dimana mereka dibebaskan dari penerapan hukum-hukum agama tertentu atau syarat-

<sup>47</sup> *SPLA/SPLM*, <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/images/ssudan2.gif>, diakses 12 Desember 2005

syarat linguistic (*linguistic requirement*). Perspektif semacam ini berpendapat bahwa berkompromi dengan identitas Arab yang Islam merupakan suatu keniscayaan, karena hal itu akan dapat melepaskan citra Sudan sebagai negara yang mencoba untuk menjadi homogen dalam hal bahasa dan agama serta pada hakekatnya berkaitan dengan peradaban Arab-Islam<sup>48</sup>.

Versi yang benar-benar asimilasionis dari model *ethnic nation state* menyebabkan perpecahan politik di seluruh negara. Di wilayah Sudan Utara, Fur dan Beja mencoba untuk mempertahankan sistem budaya mereka yang berbeda : mereka ingin memelihara dan tetap memakai bahasa asli mereka dan karakteristik khusus dari ritual-ritual Islam yang mereka miliki selama ini. Mereka mengadopsi beragam model atau cara akomodasi, asimiliasi dan melakukan perlawanan terhadap sistem yang dominan. Perlawanan yang lebih signifikan kemudian muncul di Sudan Selatan, yang orang-orangnya memiliki budaya, bahasa serta sistem kepercayaan yang amat berbeda dengan Sudan Utara yang Arab dan Islam. Nasionalis etnis melihat bahwa Sudan Selatan dan pegunungan Nuba merupakan lahan yang subur untuk penyebaran Islam. Mereka juga menekankan digunakannya bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa dalam administrasi dan pengajaran di seluruh wilayah<sup>49</sup>.

Tekanan semacam ini pernah diterapkan saat periode Turkiyya dan Mahdiyya pada abad ke-19, ketika para pedagang Muslim dan budak-budak mendominasi sektor perekonomian di wilayah Selatan dengan asumsi bahwa

<sup>48</sup> *The Sudan—Contested National Identities*, <http://iupress.indiana.edu/textnet/0-253-33432-2/0253108713.htm>, diakses 10 Juli 2005

<sup>49</sup> *Ibid.*

budaya mereka lebih superior daripada budaya yang dimiliki orang-orang Selatan. Ketika kolonial Inggris tetap menjadikan wilayah Sudan terbagi menjadi dua bagian, yakni wilayah Utara dan wilayah Selatan pada tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an, banyak politisi dari wilayah Utara menganggap orang-orang yang berada di wilayah Selatan sebagai “*lost brother*” yang diambil dari tangan kolonial Inggris : mereka memeliharanya, tanpa menerapkan separasi artificial seperti yang dilakukan oleh kolonial Inggris, melakukan penyebaran (*diffusion*) bahasa Arab dan Islam yang akan mengarah pada hilangnya kekhususan budaya orang-orang Selatan. Dengan bergulirnya momen kemerdekaan, pengikut nasionalisme etnis mencoba untuk mempromosikan identitas Muslim-Arab. Jenderal Ibrahim Abbud (1958-1964) melakukan arabisasi dalam pemerintahan dan sistem pendidikan di wilayah Selatan dan mengeluarkan secara paksa para misionaris Kristen asing. Partai-partai yang berbasis gerakan Islam diperbaharui agar menjadi homogen pada pertengahan 1960-an seperti yang juga dilakukan oleh Ja'far Numeiri (1969-1985), ketika Numeiri memberlakukan hukum Islam (*Syariat*), hukum perdagangan serta undang-undang pajak pada tahun 1983.<sup>50</sup>

Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi (1986-1989) mencoba untuk tetap memberlakukan hukum Islam, dan hukum Islam ini tidak berlaku bagi kaum non-Muslim di Sudan Selatan. Omar Hasan al-Bashir yang kemudian menggantikan

<sup>50</sup> Sudan dan AS menjalin hubungan yang dekat selama akhir 1970-an dan awal 1980-an. Wakil Presiden George Bush pernah mengadakan sebuah kunjungan resmi ke Khartoum hanya satu bulan sebelum Numeiri digulingkan pada April 1985 dan selama Numeiri berkuasa, dia sering meminta bantuan AS ketika terjadi puncak demonstrasi massa yang hendak menggulingkan dirinya. *Sudan-United States*, [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?fd/cstdy:@field\(DOCID+sd0132\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?fd/cstdy:@field(DOCID+sd0132)), diakses 7 September 2005

Sadiq al-Mahdi lewat sebuah revolusi yang amat bersejarah, yakni Revolusi Penyelamatan Nasional (*Revolutionary Command Council for National Salvation*) pada 30 Juni 1989, memperlihatkan bahwa dia berjuang bagi eksistensi Arab-Islam Sudan. Hanya sebagian kecil dari *Islamic punishment* yang berlaku bagi orang-orang non-Muslim. Semuanya ini berada di bawah paradigma yang absolute, dan arabisasi budaya mesti diteruskan secara komprehensif.<sup>51</sup>

Tuntutan yang berasal dari nasionalisme etnis mengarah pada reaksi yang berbeda-beda dari sebagian pihak lain di Sudan. Pada dasarnya, reaksi-reaksi tersebut terdiri dari permintaan untuk melepaskan diri atau permintaan agar diadakan restrukturisasi terhadap sistem politik. Para pendukung pendekatan pemisahan diri menuntut adanya hak untuk *self determination*<sup>52</sup> yang bisa memungkinkan mereka untuk memilih melepaskan diri dari pemerintah Sudan dan membentuk *independent state*. Mereka menolak asimilasi ke dalam budaya mayoritas dan menolak status terbatas sebagai kelompok minoritas. Beberapa orang yang *concern* ke masalah ini menekankan bahwa formasi awal negara Sudan bersifat *illegitimate* dan memaksa. Yang lainnya berpendapat bahwa separasi merupakan hasil yang dibutuhkan setelah bertahun-tahun terjadi diskriminasi serta *ethnic conflict*, yang telah menghilangkan kemungkinan diperolehnya hak-hak yang sama serta status politik yang setara. Tuntutan-

<sup>51</sup> *The Sudan—Contested National Identities*, <http://iupress.indiana.edu/textnet/0-253-33432-2/0253108713.htm>, *Op.Cit.*, diakses 10 Juli 2005

<sup>52</sup> *Self determination* telah mengalami perluasan makna sehingga tidak hanya diartikan sebagai *irredentism*, *secession* dan *violent renegotiation of territorial frontiers*. *Self determination* merupakan kegiatan mempromosikan hak-hak minoritas, *devolution*, *federalism*, serta pengakuan terhadap adanya legitimasi untuk mengekspresikan budaya yang dimiliki oleh suatu kelompok identitas.

*International Relations : The Key Concepts*, Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, (London : Routledge, 2002) hal. 295.



tuntutan pihak-pihak yang pro pemisahan diri bergaung keras di wilayah Sudan selatan, terutama pada tahun 1960-an. Kemudian tuntutan-tuntutan mereka kembali bergaung pada tahun 1983. Seorang pemimpin politik secara terang-terangan menyatakan : “Jika salah satu *nationality* (dalam negara yang multinational) menetapkan dirinya sebagai *state nationality*, dimana kedudukan *nationality* yang lain?”. Dia berpendapat bahwa setelah *coup* yang dilakukan Omar al-Bashir tahun 1989, negara teokrasi yang coba dibentuk olehnya tidak menghasilkan asimilasi namun lebih mengarah pada disintegrasi dan pemisahan. Kenyataan ini meningkatkan permintaan terhadap *self determination* selama tahun 1990-an dan membuka peluang terjadinya opsi bagi pihak Selatan. Bahkan beberapa orang Islam mempunyai kesimpulan bahwa polarisasi Utara-Selatan amatlah *intense* dan hanya ada satu solusi yaitu membagi teritori dalam dua negara bagian, sehingga dengan cara demikian akan dapat mengakhiri “ilusi” dari sebuah kesatuan negara yang homogen.<sup>53</sup>

## 1.2. Kesenjangan Ekonomi

Berkaitan dengan produk hasil pertanian, hingga awal tahun 1970-an hasil pertanian Sudan sebagian besar digunakan untuk konsumsi internal. Pada tahun 1972 pemerintah Sudan menjadi lebih cenderung pro Barat dan membuat rencana-rencana untuk mengekspor makanan dan *cash crops*. Bagaimanapun juga, harga barang-barang komoditas mengalami kemerosotan sepanjang tahun 1970-an sehingga menyebabkan permasalahan ekonomi bagi Sudan. Pada saat yang sama,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

pengeluaran yang digunakan untuk membayar hutang yang berasal dari uang pinjaman program *mechanizing agriculture* meningkat. Pada tahun 1978 IMF<sup>54</sup> mengadakan perundingan dengan pemerintah Sudan terkait dengan rencana pengadaan *Structural Adjustment Program*<sup>55</sup>.

Kemudian program pertanian yang berorientasi ekspor dengan menggunakan tenaga mekanis segera dirilis sebagai kelanjutan *Structural Adjustment Program*. Namun implementasi program ini justru menimbulkan permasalahan ekonomi yang cukup besar bagi para penggembala di Sudan.<sup>56</sup>

Pendapatan yang diperoleh dari korporasi-korporasi public, tidak mencukupi sesuai dengan proyeksi-proyeksi yang diharapkan, dan perkembangan dalam pengeluaran pemerintah sangat melebihi perkembangan dalam perolehan pendapatan. Akibatnya, tidak hanya tidak ada surplus di sektor public, pemerintah malah terpaksa meminjam dana dari Bank Sudan guna menutupi rekening pengeluaran. Modal asing, walalupun tersedia melimpah, tidak bisa digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, dan berkebalikan

<sup>54</sup> IMF merupakan lembaga hasil bentukan *Bretton Woods Conference* tahun 1944 yang memiliki 2 tujuan utama yakni stabilisasi nilai uang dan mempromosikan perdagangan internasional. Peran IMF mengalami perubahan sejak tahun 1970-an. IMF kemudian lebih memfokuskan perannya pada membantu negara-negara yang sedang dilanda krisis keuangan. IMF menawarkan bantuan keuangan serta bantuan teknis untuk negara-negara yang memiliki permasalahan moneter. Bantuan IMF tersebut tidak tanpa kompensasi. IMF memperoleh otoritas yang besar untuk menentukan perputaran roda perekonomian negara-negara yang sedang mengalami permasalahan dalam keseimbangan neraca pembayaran.

*International Relations : The Key Concepts*, Martin Griffiths and Terry O'Callaghan, Routledge: London, 2002, hal. 161.

<sup>55</sup> *Struktural Adjusment Program* (SPA) merupakan sebuah paket dari berbagai kebijakan yang disusun di Washington dan Wall Street dan dipaksakan kepada pemerintahan pengutang Dunia Ketiga sebagai sebuah prasyarat untuk memperoleh pinjaman lebih. Fungsi utama kebijakan ini adalah untuk membuat perekonomian nasional tetap terbuka bagi penetrasi transnasional. Lihat Kevin Danaher, *10 Alasan Membubarkan IMF dan Bank Dunia* (Yogyakarta : Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas), terj, hal. xliii.

<sup>56</sup> *Economy of Sudan*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Economy\\_of\\_Sudan](http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Sudan), diakses 4 Desember 2005

dengan harapan para pembuat konsep rencana tersebut sehingga pemerintah terpaksa melakukan pinjaman guna meneruskan implementasi proyek<sup>57</sup>

Di awal 1977, pemerintah mempublikasikan pengganti *Six-Year Plan of Economic and Social Development*, tahun 1977-1982. Tujuan serta proyeksi dari semuanya itu terlihat terlalu optimis mengingat makin memburuknya situasi ekonomi domestik, yang ditandai dengan inflasi yang terus berlangsung. Inflasi ini sebagian besar berasal dari deficit pembiayaan pembangunan (pencetakan uang), peningkatan biaya-biaya pembangunan karena peningkatan harga di seluruh dunia, serta peningkatan biaya-biaya modal eksternal. Selama tahun kedua pelaksanaan rencana, *fiscal years* 1978, tidak terjadi deficit dalam pembiayaan pembangunan pada pertengahan dan akhir 1970-an yang menggiring Sudan dalam krisis ekonomi yang parah. Pada saat yang sama, tekanan-tekanan untuk segera membayar hutang eksternal memuncak, dan Sudan gagal membayar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pengurangan yang substansial dalam pengeluaran pembangunan selanjutnya tidak dapat dielakkan. Akibatnya pemerintah menghentikan penggarapan proyek *Six-Year Plan*, pembatasan terhadap pengeluaran yang biasanya dibolehkan guna menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan, peningkatan hasil proyek-proyek operasional yang masih ada, mengurangi pembatasan yang diberlakukan untuk transportasi, dan serangkaian program-program jangka pendek yang khususnya menekankan ekspor<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Sudan-Economic Development, Op.Cit.*,

<sup>58</sup> *Op.Cit.*,

Pada akhir 1970-an korupsi mulai terlihat. Walaupun korupsi selalu terjadi, hal ini tidak pernah menjadi karakteristik utama iklim ekonomi di Sudan. Pemasukan dana yang sangat besar mengalir masuk ke Sudan pada akhir 1970-an dari Negara-negara pengeksport minyak, Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa yang bagaimanapun memberikan kesempatan bagi kelompok kecil di sekeliling Numeiri untuk memperkaya diri mereka sendiri. Korupsi semacam ini dibagi dalam tiga kategori : penggelapan dana public yang sebagian besar pelakunya melarikan diri ke luar negeri; kecurangan dalam bidang pertanian; serta investasi dalam bidang perdagangan<sup>59</sup>

Pada Oktober 1983, pemerintah mengumumkan program tiga tahun investasi terbuka untuk umum (investasi public), namun upaya-upaya Islamisasi ekonomi tahun 1984 menghalangi implementasinya, dan setelah Numeiri digulingkan pada April 1985, implementasi tersebut ditunda. Pada Agustus 1987, sebuah *recovery* ekonomi digagas oleh pemerintah. Program *recovery* ini pada tahun Oktober 1988, diikuti oleh program *recovery* tiga tahun untuk mereformasi kebijakan perdagangan dan mengatur tariff kurs, mengurangi deficit anggaran dan subsidi-subsidi, serta memperbesar volume ekspor ekspor dan privatisasi. Terdapat sedikit kemungkinan untuk *recovery* ekonomi awal yang ditawarkan oleh pemerintahan militer Jenderal Omar al-Bashir yang mulai bertugas 30 Juni 1989. Kebijakan-kebijakan pemerintah diarahkan untuk membentuk sistem bank yang Islami, namun kepentingan-kepentingan bisnis asing memandang langkah-langkah ini sebagai sesuatu hal yang justru membuat para pebisnis enggan untuk

---

<sup>59</sup> *Op. Cit.*,

berbisnis di Sudan, karena tidak ada bunga pinjaman yang akan dibayarkan pada pinjaman-pinjaman baru (dalam sistem ekonomi Islam, tidak dikenal istilah “bunga pinjaman” karena hal itu dilarang). Lagipula, bank-bank Islam dan pendukung-pendukung ekonomi lainnya diberi proporsi pengaruh yang tidak seimbang di bidang ekonomi, yang menyebabkan kemarahan diantara sektor-sektor yang ada di Sudan. Akhirnya, pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup berarti untuk memuaskan IMF atau kreditor utama lainnya yang telah melakukan pengurangan subsidi terhadap komoditas-komoditas dasar, kemudian mengurangi deficit anggaran pemerintah. Bashir telah mengumumkan sebuah program *recovery* ekonomi pada pertengahan 1990-an, namun pada tahun 1991 hasilnya masih ditunggu<sup>60</sup>

Antara tahun 1978 dan 1985, produksi pertanian dan industri telah mengalami penurunan tiap per capita. Impor-impor yang terjadi selama tahun 1980-an adalah sebanyak tiga kali level ekspor. Tahun 1991 nilai mata uang Sudan dibanding dolar merosot tajam kurang dari 10 % dari nilai pada tahun 1978, dan hutang luar negeri telah mengalami peningkatan hingga US\$13 miliar, dimana bunga pinjaman tersebut bisa dibayar hanya dengan cara melakukan pinjaman baru<sup>61</sup>.

Dua alasan bagi terjadinya kemerosotan ini adalah kekeringan yang diikuti oleh kelaparan yang terjadi tahun 1981 dan 1991, dan terjadinya gelombang arus pengungsi dari Eritrea, Etiopia, Chad dan Uganda, ditambah dengan orang-orang terlantar akibat berlanjutnya perang di selatan Sudan yang

<sup>60</sup> *Sudan-Economic Development, Op.Cit.,*

<sup>61</sup> *Op.Cit.,*

diperkirakan berjumlah antara 1,5 juta hingga 3,5 juta. Meskipun demikian, kemerosotan di sektor pertanian dan industri yang telah dimulai sebelum terjadinya krisis ini. Beberapa proyek pembangunan berhasil diselesaikan tepat waktu namun mengalami kegagalan dalam pencapaian target produksi sesuai dengan proyeksi. Setelah tahun 1978, GDP yang diperoleh dirasa tidak cukup untuk membayar pinjaman dalam jumlah besar meskipun produktivitas sudah meningkat. Sudan terjebak dalam lingkaran peningkatan hutang dan kemerosotan produksi<sup>62</sup>.

Permasalahan-permasalahan ekonomi semacam ini mempunyai dua penyebab fundamental. *Pertama*, dalam perencanaan, pemikiran atau gagasan kecil yang diberikan memiliki pengaruh yang kuat terhadap proyek yang digarap di seluruh lini kehidupan perekonomian dan bahkan mengurangi beban seperti proyek-proyek besar yang dilaksanakan di tempat-tempat yang memiliki infrastruktur yang rapuh. Beberapa menteri menggarap proyek dengan pinjaman-pinjaman yang dinegosiasikan secara sepihak tanpa rekomendasi atau referensi dari *Central Planning Agency*. *Kedua*, pengiriman uang yang dilakukan oleh para pekerja Sudan di Teluk Persia (ribuan pekerja Sudan ini berada di Kuwait dan Irak, hingga banyak dari mereka yang dikeluarkan) menyebabkan ekonomi Sudan dilanda krisis, karena pemerintah terpaksa memperlunak kontrol terhadap mata uangnya yang semula ketat guna membujuk para pekerja ini untuk mengirim pulang penghasilan mereka. Dana (penghasilan) semacam ini sebagian besar

---

<sup>62</sup> *Sudan-Economic Development, Op.Cit.,*

diinvestasikan dalam bentuk barang-barang konsumsi dan perumahan, daripada diinvestasikan untuk proyek-proyek pembangunan<sup>63</sup>.

Modal asing telah memainkan peran yang utama dalam pembangunan. Kepercayaan yang besar terhadap modal asing merupakan faktor utama yang memberi kontribusi terhadap terjadinya permasalahan keuangan yang amat parah yang menyerang Sudan pada pertengahan 1970-an. Sudan memperoleh pinjaman dari sektor public untuk pembiayaan pembangunan. Pinjaman tersebut berasal dari bermacam agen internasional dan pemerintah suatu negara<sup>64</sup>.

Hingga pertengahan 1970-an, sumber terbesar satu-satunya adalah dari Bank Dunia, termasuk *International Development Association* (IDA) dan *International Finance Corporation* (IFC). Pada tahun 1975 Bank Dunia dan organ-organnya telah memberi pinjaman senilai US\$300 juta. Sebagian dikeluarkan untuk membayar kembali hutang yang belum lunas, pada tahun 1981 jumlah hutang yang baru meningkat menjadi US\$786 juta, sebagai komitmen utama untuk menggarap proyek termasuk proyek pertanian, transportasi, dan tenaga listrik (diketuai oleh IDA, yang tercatat terlaksana tahun 1981 untuk lebih dari US\$594 juta hutang yang belum terlunasi)<sup>65</sup>.

Selama akhir tahun 1970-an dan tahun 1980-an IMF, Bank Dunia dan para donatur utama bekerja dengan teliti mempromosikan reformasi –dalam rangka *counter* efek dari kebijakan-kebijakan ekonomi dan pelaksanaannya. Tahun 1984, kombinasi dari beberapa faktor, termasuk kekeringan, inflasi, dan

<sup>63</sup> *Op.Cit.*,

<sup>64</sup> *Sudan-Foreign Aid*, [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0073\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0073)), diakses 7 September 2005.

<sup>65</sup> *Op.Cit.*,

pelaksanaan syariat Islam yang kacau dan membingungkan telah menyebabkan berkurangnya jumlah uang yang dikeluarkan oleh para donatur serta mengurangi aliran modal yang selanjutnya mengarah pada krisis kurs mata uang asing dan terjadinya penurunan terhadap jumlah barang-barang impor serta barang-barang komoditas. Yang lebih signifikan lagi, revolusi yang terjadi pada tahun 1989 menyebabkan banyak donatur di Eropa, AS dan Kanada menanggukkan pemberian bantuan pembangunan (*development assistance*), walau pemberian bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*) tetap berjalan<sup>66</sup>

### 1.3. Kebijakan Pemerintah

Pada masa pra kemerdekaan, Inggris memberlakukan kebijakan yang memperbesar kepentingan bisnis kelompok-kelompok yang berpengaruh dari daerah Lembah Nile pusat dengan memberikan perlakuan istimewa terhadap mereka. Perlakuan istimewa tersebut diantaranya adalah memberikan alokasi terhadap aset-aset yang produktif (sebagian besar yang ada di daratan), kontrak-kontrak bisnis, dan memberikan pinjaman bank, dengan tujuan untuk mengurangi resiko perlawanan terhadap rezim kolonial. Kelompok-kelompok yang berpengaruh tersebut termasuk para pemimpin agama, para kepala suku dan para pedagang.

Kelompok-kelompok yang berpengaruh tersebut muncul sebagai faktor-faktor historis pra-kolonial yang berkaitan dengan dominasi kehidupan religius di kalangan masyarakat di wilayah Utara oleh ajaran religius Muslim sufi dan juga

<sup>66</sup> *Economy of Sudan, Op.Cit.*



sebagai akibat tidak langsung dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Di era pasca kemerdekaan, kelompok-kelompok sosial yang berpengaruh tersebut memegang otoritas dan memiliki pengaruh politik. Hal tersebut mempersulit situasi mengingat perkembangan yang ada di wilayah Utara dan perkembangan yang terkait dengan relasi Utara dan Selatan sebab di kedua wilayah ini, komposisi masyarakatnya sangat plural dan hal ini sudah eksis sejak dahulu kala<sup>39</sup>.

Berkaitan dengan latar belakang historis di atas, maka sejak masa kolonial, Darfur, sama seperti wilayah Selatan Sudan, harus berjuang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Terjadi ketidakseimbangan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta pendidikan di Darfur. Sejak tahun 1939 hingga tahun 1952, sedikit sekali sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang dibangun di Darfur, jika dibandingkan dengan yang dibangun di daerah-daerah yang berada di wilayah Utara maupun Tengah Sudan. Dan selama masa kolonial pula peraturan yang dibuat oleh Inggris membiarkan Darfur mengalami marginalisasi dalam bidang politik dan pengabaian serta kemandekan dalam bidang ekonomi<sup>40</sup>.

Kemudian pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, para pemimpin agama, para kepala suku dan para pedagang datang ke wilayah bagian Barat Sudan guna memperoleh pengaruh yang besar di dalam kehidupan politik,

---

<sup>39</sup> *The History And Origins Of The Current Conflict In Darfur*, [www.sarpn.org.za/documents/d0001277/PNADC475\\_Darfur\\_Febr2005\\_Chap2.pdf](http://www.sarpn.org.za/documents/d0001277/PNADC475_Darfur_Febr2005_Chap2.pdf), diakses 12 Juli 2005.

<sup>40</sup> *Loc. Cit.*,

sosial dan ekonomi. Mereka mendominasi parlemen dan senat yang dibentuk pertama kali serta mendominasi keanggotaan dalam badan legislatif dan lembaga pusat. Kemunculan mereka, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, disebabkan karena faktor-faktor historis yang berkaitan dengan dominasi kehidupan religius oleh ajaran Muslim sufi dan juga karena akibat tidak langsung dari kebijakan yang diterapkan oleh Inggris sebagai negara kolonial. Pada masa itu pula, Darfur diperintah oleh komisioner-komisioner yang mengabaikan kebutuhan dasar warga Darfur dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pemerintah pusat<sup>41</sup>.

Masalah selanjutnya adalah terdapatnya “anggota-anggota yang diekspor”- yaitu para anggota parlemen dari Khartoum yang mewakili Darfur dalam *National Assembly* namun hanya memberikan sedikit perhatian terhadap keberlangsungan kehidupan di Darfur. Terkait dengan masalah ini, maka ada semacam sistem yang memungkinkan itu semua terjadi<sup>42</sup>.

Otoritas negara merupakan salah satu sumber dan alat untuk mencapai kemakmuran bagi semua orang dalam sebuah negara, tak terkecuali Sudan. Sejak merdeka tahun 1956, Sudan mendeklarasikan dirinya sebagai negara yg berdaulat dan mengibarkan benderanya bersamaan dengan pencanangan slogannya yg berjanji untuk berkomitmen penuh untuk bekerja demi kebaikan semua pihak dalam sebuah negara yg baru. Namun terjadi ketidaksesuaian antara slogan dan kenyataan<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> *Loc. Cit.*,

<sup>42</sup> *Loc. Cit.*,

<sup>43</sup> *The Black Book : Imbalance of Power and Wealth in Sudan, Op.Cit.*,

Penjelasan di atas tentang masalah pendidikan pada masa kolonial sedikit banyak sudah menyinggung masalah ketidakseimbangan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Darfur. Pasca kemerdekaan, perbedaan yang mencolok terjadi dalam hal pelayanan pendidikan. Sementara daerah-daerah lain sudah merasakan dampak positif kemajuan pendidikan, yaitu dengan banyaknya jumlah anak yang memperoleh pendidikan tingkat menengah, anak-anak yang berasal dari wilayah terpencil hanya bisa sampai tingkat dasar. Di wilayah Darfur Barat, sekolah dasar yang ada ditutup selama dua tahun dan kekurangan buku dan dana untuk menggaji pegawai. Faktanya, disana tidak ada dana untuk membeli buku-buku. Ada lebih dari 1,5 juta orang di wilayah Darfur Barat, namun hanya 4.211 anak yang bisa mengikuti ujian akhir di sekolah tingkat menengah. Jumlah ini kurang dari jumlah lulusan sekolah dasar di sebuah Wilayah Administratif Lokal di wilayah Utara. Perbandingannya menjadi agak “menakjubkan” ketika kita menyadari salah satu Wilayah Administratif Lokal di Darfur mempunyai populasi yang sama dengan seluruh populasi yang ada di Darfur Barat<sup>46</sup>.

Pada level yang berbeda, wilayah-wilayah yang termarjinalkan juga menderita ketika tersedia dana untuk mendanai proyek pengembangan wilayah-wilayah yang ada di Sudan. Sesuai dengan keputusan pemerintah, tidak ada yang boleh memperoleh dana tersebut tanpa membuat suatu penelitian. Untuk sementara hal ini masuk akal dan bisa diterima, namun fakta berbicara lain ketika wilayah Utara memegang kendali atas kekuasaan tertinggi di Sudan. Wilayah-wilayah miskin tidak diberi dana untuk penelitian dan tidak memperoleh

---

<sup>46</sup> *Loc. Cit.*,

kesempatan untuk bersaing dalam kompetisi yang kredibel untuk memperoleh dana proyek tersebut. Hasilnya sudah jelas, *The National State Support Fund* menyalurkan seluruh dana tersebut untuk mendanai proyek-proyek yang ada di wilayah Utara ketimbang yang ada di wilayah Barat, Selatan, maupun Timur<sup>47</sup>.

**Table 1**  
**Populasi Wilayah-Wilayah di Sudan**

Wilayah	Nama Daerah	Populasi	%
Timur	Kasala, Gadharif, Red Sea	3,051,958	12.2%
Utara	Utara, Sungai Nil	1,291,620	5.3%
Tengah	Gezira, Sinar, Nil Putih Nil Biru, Khartoum	8,829,367	35.4%
Barat	Kordofan, Darfur	7,912,285	31.7%
Selatan	Nil Atas, Bahr Alghazal Equatorial	2,845,480	11.4%
Total	-	24,940,703	100%

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

Dalam hal ini, Khartoum dikategorikan ke dalam wilayah Tengah. Namun kita juga bisa memasukkannya dalam wilayah Utara sebab secara geografis wilayah ini memang dekat dengan Utara. Total populasi Kahartoum mencapai 3.413.034. Lebih dari setengahnya berasal dari migrasi penduduk di wilayah Barat dan Selatan, terutama para penduduk yang migrasi karena kurangnya kegiatan pembangunan dan terjadinya perang.<sup>67</sup>

<sup>47</sup> *Loc. Cit.*,

<sup>67</sup> *The Black Book : Imbalance of Power and Wealth in Sudan.*

[http://www.sudanjem.com/english/books/blackbook\\_part1/20040422\\_bbone.htm](http://www.sudanjem.com/english/books/blackbook_part1/20040422_bbone.htm)

Dari periode 1954 hingga 1964, 73 posisi menteri disediakan oleh Pemerintah Pusat yang berada di Khartoum. Pembagian posisi disajikan dalam Tabel 2.

**Table 2**  
**Posisi Menteri 1954 – 1964.**

No	Wilayah	Jumlah Posisi	%
1	Wilayah Timur	1	1.4%
2	Wilayah Utara	58	79%
3	Wilayah Tengah	2	2.8%
4	Wilayah Selatan	12	16%
5	Wilayah Barat	0	0%

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

Sekarang mari kita tinjau populasi Sudan beberapa dekade kemudian. Sensus 1986 merupakan data yang paling bisa dijadikan dasar analisis.

**Table 3**  
**Sudan Population Distribution, 1986**

No	Wilayah	Populasi	%
1	Wilayah Timur	2,212,779	11.8%
2	Wilayah Utara	1,016,406	5.4%
3	Wilayah Tengah	4,958,038	26.5%
4	Wilayah Selatan	4,407,450	23.7%
5	Wilayah Barat	6,072,872	32.6%

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

Tercatat bahwa 5,4 % populasi Sudan terwakilkan dalam lembaga eksekutif atau posisi menteri sebanyak 79,5 % (yang menduduki kursi di

parlemen). Selama periode ini, 5 pemerintahan yang berbeda berkuasa, namun pola yang ada sama saja.<sup>68</sup>

**Table 4**

**Pemerintahan Nasional 1954-1964**

No	Pemerintahan	Tahun	Pemimpin
1	Pemerintahan Nasional Pertama	Januari 1954	Alazhari
2	Pemerintahan Nasional Kedua	1955	Alazhari
3	Pemerintahan Nasional Ketiga	1956	Alazhari
4	Pemerintahan Khaleel	1958	Khaleel
5	Pemerintahan Militer Pertama	1958-1964	Jenderal Aboud

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

Seiring dengan naiknya pemerintahan nasional pada Oktober 1964, Aboud dilengserkan, kemudian tunduk pada pemerintahan demokratis 1964-1969. Di bawah ini terdapat table yang menunjukkan posisi Menteri-menteri pada masa pemerintahan demokratis 1964-1969.

**Table 5**

**Distribusi Menteri, 1964-1969**

Wilayah	Jumlah Posisi	%
Timur	2	2.05%
Utara	55	67.9%
Tengah	5	6.2%
Selatan	14	17.3%
Barat	5	6.2%

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

<sup>68</sup> *The Black Book : Imbalance of Power and Wealth in Sudan., Op.Cit.,*

Total pos-pos konstitusional untuk periode ini adalah 18 posisi. Cukup aneh, bahwa wilayah Barat dan Selatan memberikan kontribusi yang cukup besar pada pemerintahan sementara di bawah Presidensial Sir Alkatim yang mempersiapkan pemilu tahun 1964. Yang menduduki pos-pos menteri berasal dari wilayah Utara.<sup>69</sup>

### **Pemerintahan Numeiri, 1969-1985**

Pemerintahan Numeiri yang bercorak militer dicirikan oleh instabilitas internal yang mengarah pada *reshuffle* cabinet. Secara total terdapat 115 menteri di kabinetnya dengan distribusi regional sebagai berikut :

**Table 6**

#### **Distribusi Menteri, 1969-1985**

Wilayah	Jumlah Posisi	%
Timur	4	2.5%
Utara	79	68.7%
Tengah	19	16.5%
Selatan	9	7.8%
Barat	4	3.5%

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

Walaupun terdapat perbedaan yang besar antara perpolitikan di era Numeiri dan sebelum pemerintahannya, dominasi wilayah Utara tetap eksis. Situasi ini kian memperbesar hegemoni wilayah Utara dan menghancurkan seluruh upaya untuk melakukan pembangunan di wilayah non-Utara. Contoh yang bagus misalnya penutupan jalanKafra yang menghubungkan Libya dengan el-Fashir yang merupakan ibukota Darfur di wilayah Barat. Jalan lintas padang pasir ini sebagian dibiayai oleh Libya. Upaya perintangan yang dilakukan oleh

<sup>69</sup> *Op.Cit.*,

pemerintah Sudan terhadap pembangunan jalan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan wilayah Barat terhadap pemerintah Sudan di Utara.<sup>70</sup>

Seiring dengan lengsernya Numeiri, sebuah pemerintahan militer transisional mengambil alih selama setahun guna mempersiapkan pemilu. Pemerintahan yang baru bertugas di bawah sebuah dewan yang dikenal dengan nama Dewan Militer Transisional yang dipimpin oleh Swar Aldahab.<sup>71</sup>

**Table 7**  
**Lembaga Militer Transisional, 1985-1986**

Wilayah	Jumlah Posisi	%
Timur	0	0%
Utara	21	70%
Tengah	3	10%
Selatan	5	16.7%
Barat	1	3.3%

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

Angkatan Bersenjata Sudan merupakan sebuah institusi nasional. Lembaga Militer Transisional diberi bantuan oleh anggota-anggota senior dalam Pemerintahan Transisional namun ketimpangan masih tetap terlihat, sama seperti di masa-masa yang lalu.

#### **Era Demokrasi Kedua 1986-1989 :**

Lembaga Militer Transisional menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menjadi tim suksesi bagi Perdana Menteri terpilih Sadiq al-Mahdi.

Susunan kabinet Sadiq al-Mahdi adalah sebagai berikut :

<sup>70</sup> *Op.Cit.*,

<sup>71</sup> *Op.Cit.*,



**Table 8**  
**Distribusi Menteri pada Kabinet Al-Mahdi 1986-1989**

Wilayah	Jumlah Posisi	%
Timur	3	2.6%
Utara	55	47.4%
Tengah	17	14.7%
Selatan	15	12.9%
Barat	26	22.4%

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

Al-Mahdi adalah satu-satunya pemimpin yang menciptakan formasi pemerintahan dengan susunan yang relatif mampu merepresentasikan seluruh wilayah di Sudan, meskipun wilayah Utara masih relatif dominan. Meskipun dengan susunan kabinet yang masih mencerminkan dominasi pihak Utara dan distribusi populasi yang adil terhadap seluruh wilayah di Sudan belum bisa dilakukan oleh pemerintahan al-Mahdi, namun harus diakui bahwa susunan kabinet Al-Mahdi sudah selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan para pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Al-Mahdi juga presiden yang pertama kali mengizinkan jabatan penting Menteri Keuangan dan Ekonomi dipegang oleh orang dari wilayah Barat dan Tengah. Mereka adalah Ibrahim Mansour dan Omar Bashir dari wilayah Barat dan Omar Nur Aldayim dari wilayah Tengah.<sup>72</sup>

#### **Pemerintahan Omar al-Bashir 1989**

Al-Mahdi digulingkan dalam sebuah kudeta damai pada tahun 1989 dan sebuah pemerintahan barupun terbentuk di bawah nama "Revolusi Penyelamatan Nasional". Dengan terlibatnya orang-orang dari wilayah Barat dalam formasi ideologi yang menjadi inspirasi Omar al-Bashir untuk melakukan kudeta, maka orang-orang dari wilayah Barat diberi penghargaan namun tanpa ditarik menjadi anggota kabinet yang baru. Hal ini terefleksi dalam undang-undang Dewan

<sup>72</sup> *Op.Cit.*,

Komando Militer yang mengontrol Sudan pada awal kepemimpinan Omar al-Bashir.<sup>73</sup>

**Table 9**

**Dewan Komando Revolusioner, Juni 1989**

Wilayah	Jumlah Posisi	%
Timur	0	0%
Utara	10	66.7%
Tengah	0	0%
Selatan	2	13.3%
Barat	3	20%

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

Ketika kekuatan berpihak pada pemerintahan yang baru, dominasi wilayah Utara dipulihkan sesuai dengan tradisi politik sebelumnya. Pemerintahan yang baru melaksanakan tugasnya di bawah slogan : Proyek Peradaban, Islamisasi kehidupan, persamaan dan keadilan serta prinsip kewarganegaraan. Sayangnya, slogan-slogan ini tidak dapat menyelamatkan pemerintah Sudan dari menciptakan ketimpangan. Buktinya bisa dilihat pada tingginya jumlah jabatan resmi yang didominasi wilayah Utara sampai *reshuffle* kabinet terakhir tahun 1999.<sup>74</sup>

**Table 10**

**Posisi Konstitusional/Kementerian, Juli 1989-Desember 1999**

Wilayah	Jumlah Posisi	%
Timur	6	3%
Utara	120	59.4%
Tengah	18	8.9%
Selatan	30	14.9%
Barat	28	13.8%

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

<sup>73</sup> *Op.Cit.*,

<sup>74</sup> *Op.Cit.*,

Seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 10, representasi wilayah Utara mencapai 59,4% untuk populasi yang hanya 12,2%. Table 10 juga mengindikasikan bahwa pemerintahan yang baru mengalami perpecahan. Pemerintah menunjukkan ketidakmampuannya untuk meruntuhkan dinding ketidakadilan yang selama ini terjadi pada pemerintahan periode sebelumnya.<sup>75</sup>

Pada Desember 1999, seiring dengan perselisihan yang terjadi antara Presiden Omar al-Bashir dengan ideologinya Hasan al-Turabi, pemerintah dengan terburu-buru membuat sejumlah Dekrit Presiden yang isinya merupakan upaya yang minimal untuk menghindari terjadinya tribalisme dan regionalisme sebagai janji awal slogannya. Namun ini semua masih mencerminkan tingginya perwakilan dari Istana Republik dalam jabatan menteri dan gubernur.<sup>76</sup>

**Table 11**

**Staf Istana Republik (Desember 1999)**

No.	Nama	Posisi	Wilayah
1	F. Marshall Omer A. Albashir	Presiden	Utara
1	Ali Osman M. Taha	Deputi Pertama Presiden	Utara
3	George Kangoor Arop	Deputi Presiden	Selatan
4	Dr. Riak Mashar	Asisten Presiden	Selatan
5	Dr. Ibrahim Ahmed Omer	Asisten Presiden	Utara
6	Lt General Bakri Hasan Salih	Menteri Kepresidenan	Utara
7	Dr. Ahmed Ali Imam	Penesehat Presiden	Utara
8	Dr. Nafayi Ali Nafayi	Urusan Perdamaian	Utara
9	Dr. Altayib Mohamed Kheir	Urusan Keamanan	Utara
10	Dr. Suaad Alfatih	Urusan Wanita dan Anak-Anak	Utara
11	Abdel Basit Sabdarat	Urusan Politik	Utara
12	Salah Mohamed Salih	Somber Daya Air	Utara

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

<sup>75</sup> *Op.Cit.*,

<sup>76</sup> *Op.Cit.*,

Seiring dengan masuknya Riak Mashar ke SPLM, di Istana Republik tersisa 11 anggota yang satu dari mereka berasal dari wilayah Selatan.

Di bawah ini nama-nama Menteri Pemerintah Federal setelah Periode Turabi :

**Table 12**

**Menteri-Menteri Pemerintah Federal**

Nama	Wilayah
F. Marshall Omer Ahmed Albashir	Utara
Ali Osman Taha	Utara
George Kangoor Arobe	Selatan
Dr. Riak Mashar	Selatan
Ibrahim Ahmed Omer	Utara
Dr. Mustafa Osman Ismael	Utara
Lt. general Abdel Rahman Siralkhatim	Utara
Dr. Mohamed Kheir Alzibair	Utara
Dr. Awad Ahmed Aljaz	Utara
Dr. Zibair Bashir Taha	Utara
Dr. Abdalla Hasan Ahmed	Utara
Dr. Qutbi Almahdi	Utara
Abdel Basit Sabdarat	Utara
Dr. Abdalla Mohamed Seed Ahmed	Utara
Ali Ganmar Osman Yasin	Utara
Kamal Ali Ahmed	Utara
Badria Sulaiman	Utara
Abdel Haleem Almuaafi	Tengah
Abul Gasim Mohamed Ibrahim	Tengah
Dr. Ghazi Salah Aldin Atabani	Tengah
Ahmed Ibrahim Altahir	Barat
Lt. General Tigani Adam Tahir	Barat

F. Marshall Ibrahim Sulaiman	Barat
Mekki Ali Bilal	Barat
Dr. Alhaj Adam Yousif	Barat
Mohamed Tahir Bilal	Timur
Dr. Lam Akol	Selatan
Alison Manafi Magaya	Selatan
Joseph Malwal	Selatan

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

**Table 13**  
**Representasi Regional Pemerintah Federal, 1999**

Wilayah	Jumlah Posisi	%
Timur	1	3.3%
Utara	18	60.1%
Tengah	2	6.6%
Selatan	4	13.3%
Barat	5	16.7%

Sumber : <http://www.sudanjem.com>

### 1. 3. Konfigurasi Kepentingan

Sudan merdeka dari kekuasaan Inggris-Mesir pada 1 Januari 1956. Sejak itu, keinginan mengadakan “Islamisasi” sering muncul dari kalangan umat Islam, terutama para pemimpin mereka. Pada dasarnya, Islamisasi dalam hal ini merujuk kepada penggunaan negara dan lembaga-lembaganya untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan pengorganisasian ekonomi serta politik Sudan. “Islamisasi” yang lain, yaitu proses sejarah, kultur, dan linguistic penyebaran Islam di Sudan dan Afrika Utara pada umumnya, sudah berlangsung

lama. Tapi, bukan proses sosio-kultural ini yang dimaksudkan oleh tema Islamisasi.<sup>77</sup>

Walaupun demikian, berbagai kelompok umat Islam, yang keseluruhannya merupakan 73% populasi, tidak selalu sepakat mengenai kandungan dan proses Islamisasi tersebut. Ikhwan al-Muslimin, atau yang sekarang diwakili oleh Front Islam Nasional pimpinan Hasan al-Turabi, Republikan Brothers and Sisters yang didirikan Mahmud Muhammad Thaha, kelompok Tarekat Khatmiyyah yang berpengaruh di bawah pimpinan keluarga Mirghani, atau kelompok Mahdi dengan tokohnya Sadiq al-Mahdi, menawarkan perspektif berbeda-beda. Program Islamisasi yang belakangan dimotori oleh front Islam Nasional dan Hasan al-turabi. Itu berarti ada pendukung maupun penentangannya di kalangan umat Islam Sudan.<sup>78</sup>

Lebih lanjut, di wilayah Selatan Sudan ada berbagai kelompok yang menentang keras Islamisasi, bila perlu dengan memberontak. Komunitas Kristen di Khartoum dan di Selatan (kurang lebih 5% dari penduduk Sudan) sudah pasti menentang setiap usaha Islamisasi yang disponsori negara. Begitu pula halnya para penganut agama tradisional (22% dari populasi Sudan). Penolakan mereka terhadap Islamisasi adalah bagian dari konflik yang lebih luas antara pemerintah pusat dengan wilayah Selatan.<sup>79</sup>

Perpolitikan di Sudan adalah politik aliran dan didominasi oleh dua kelompok agama, Mahdi dan Mirghani. Dua kelompok keagamaan ini identik dengan dua partai politik penting di Sudan, *Umma Party* identik dengan Mahdi dan *Democratic Unionist Party* identik dengan Mirghani. Dua kelompok keagamaan ini mendapatkan kekuasaan dari warisan kolonial. Untuk memonopoli kekuasaan di Sudan, kedua partai ini memberikan kepemimpinan partainya pada masing-masing kelompok agama mereka. Oleh karena itu pemimpin partai sekaligus merupakan pemimpin kelompok keagamaan. Strategi yg digunakan adalah pemimpin-pemimpin kelompok keagamaan harus berasal dari keluarga

<sup>77</sup> *Politik dan Agama di Sudan-Turabi dan Masalah Selatan*, ISLAMIKA-Jurnal Dialog Pemikiran Islam, Nomor 6 Tahun 1995, hal 47.

<sup>78</sup> *Op.Cit.*,

<sup>79</sup> *Op.Cit.*,

pendiri kelompok keagamaan tersebut. Selain itu, strategi berikutnya adalah dengan mengirim kandidat untuk mengikuti pemilu. Anggota-anggota partai yang penting yang berada di pusat diberikan dukungan untuk menjadi calon dalam pemilu di wilayah yang bukan wilayah mereka. Strategi ini terbukti secara efektif berhasil melahirkan wakil-wakil politik di tingkat lokal. Strategi semacam ini juga bisa menjamin adanya dominasi suara di wilayah Utara dan seluruh wilayah lain dan menjamin terbentuknya pola-pola yg mapan untuk berhubungan dengan daerah-daerah pinggiran. Pola-pola tersebut juga bisa berarti bahwa kekuasaan legislatif menyisakan orang-orang yang utamanya ditarik dari wilayah Utara. Pola-pola mapan yang sudah dijelaskan di atas memiliki percabangan yang banyak dalam perwakilan politik di Sudan. Perwakilan yang kuat dari wilayah Utara di pemerintah pusat menyisakan pengabaian terhadap kekuasaan yang diperoleh di wilayah-wilayah lain dan mengubah lingkungan politik<sup>44</sup>.

Sepanjang sejarahnya, wilayah Utara memiliki perwakilan dalam pemerintah pusat lebih dari 50 %. Bahkan perwakilannya bisa mencapai 70 %. sejak kemerdekaan hingga saat ini, tidak ada satupun Perdana Menteri atau Presiden yang berasal dari daerah lain kecuali dari wilayah Utara. Seperti banyak negara dunia ketiga, Sudan memiliki beberapa pemerintahan yg terbentuk dari hasil proses kudeta. Bagaimanapun juga, beberapa upaya untuk menggulingkan pemerintahan dengan mudah dapat digagalkan karena para pemimpinnya bukan berasal dari wilayah Utara<sup>45</sup>.

Salah satu factor pemicu konflik adalah perubahan besar yang disebabkan oleh bencana kekeringan sejak tahun 1980-an, yang menimbulkan ketegangan antara orang-orang Afrika di bagian Barat Sudan dan di bagian timur Sudan. Bencana kekeringan makin menambah ketegangan diantara bermacam suku di daerah tersebut, yang memang sudah ada sejak dulu. Secara spesifik, ketegangan

<sup>44</sup> *The History and Origins of The Current Conflict in Darfur*, [www.sarpn.org.za/documents/d0001277/PNADC475\\_Darfur\\_Febr2005\\_Chap2.pdf](http://www.sarpn.org.za/documents/d0001277/PNADC475_Darfur_Febr2005_Chap2.pdf) diakses tanggal 12 Juli 2005.

<sup>45</sup> *Op. Cit.*,

tersebut terjadi antara komunitas petani yang hidupnya menetap dan komunitas nomaden yang hidupnya berpindah-pindah.<sup>80</sup>

Menurut sejarahnya, orang-orang nomaden, terkonsentrasi di daerah barat Sudan yang kering, hingga ke Darfur. Mereka membawa ternak-ternaknya ke daerah selatan selama musim kering lalu kembali ke daerah barat untuk memburu hujan. Tapi sumber mata air dan sungai-sungai yang ada di daerah barat telah kering sehingga mereka akhirnya kembali ke selatan guna mencari padang rumput untuk menggembalakan ternak-ternak mereka. Di daerah selatan, mereka bersaing dengan komunitas petani dalam mendapatkan sumber daya alam seperti air, padang rumput, dan tanah subur yang mulai menyusut. Dan konflik pun akhirnya meningkat.<sup>81</sup>

Di tingkat elit, konflik di Darfur dipicu oleh pertentangan antara Omar Al-Bashir dan Hasan Al-Turabi. Omar Al-Bashir dan Hasan Al-Turabi berkonflik pada tahun 1999 setelah Hasan Al-Turabi, yang menjadi juru bicara parlemen, dianggap tengah melakukan percobaan untuk merebut kekuasaan dan menggoyang posisi Omar Al-Bashir sebagai Presiden Sudan yang sah pada waktu itu. Dalam melaksanakan manuver politiknya itu, Turabi membentuk *Popular Congress* (PC) yang merupakan gerakan di luar *National Islamic Front* (NIF), partai yang selama ini menjadi afiliasi politiknya dan juga menerbitkan surat kabar *Rai Al-Shaab* (*People's Opinion*) yang menjadi corong opini gerakan politiknya. Dia dikenakan tahanan rumah setelah *Popular Congress* menandatangani perjanjian damai dengan *Sudan People's Liberation Army* (SPLA)<sup>35</sup>. Turabi sendiri tidak terkait secara langsung dengan konflik Darfur sebab dia bukanlah pendiri dan pemrakarsa JEM, hanya mungkin punya hubungan emosional yang kuat dengan para pendirinya, seperti Dr. Khalil Ibrahim, yang dalam melakukan manuvernya, sedikit banyak dipengaruhi oleh manuver yang

<sup>80</sup> *How Did Darfur Happen?*, [http://www.sudantribune.com/article.php3?id\\_article=6003](http://www.sudantribune.com/article.php3?id_article=6003) diakses tanggal 26 Juni 2005

<sup>81</sup> *Op.Cit.*,

<sup>35</sup> *Darfur In Perspective*, <http://www.sudanvisiondaily.com/modules.php?>, diakses tanggal 14 Juli 2005



dilakukan Hasan Al-Turabi dengan *Popular Congress*-nya<sup>36</sup>. Dalam menanggapi semua tuduhan dari pemerintah Khartoum ini, JEM mengeluarkan *The Black Book : Imbalance of Power and Wealth in Sudan* yang menyatakan bahwa Sudan dikontrol hanya oleh satu Wilayah, yaitu Wilayah Utara yang hanya terdiri dari 5 % dari total populasi di Sudan. Di dalam wilayah hegemonik tersebut, kekuasaan dimonopoli oleh tiga kelompok etnis dari Wilayah Utara. Monopoli ini selanjutnya direfleksikan lewat ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan kekayaan<sup>37</sup>.

Inggris, yang pernah melakukan kolonisasi di Sudan, memberlakukan kebijakan yang memperbesar kepentingan bisnis kelompok-kelompok yang berpengaruh dari daerah Lembah Nile pusat dengan memberikan perlakuan istimewa terhadap mereka. Perlakuan istimewa tersebut diantaranya adalah memberikan alokasi terhadap aset-aset yang produktif (sebagian besar yang ada di daratan), kontrak-kontrak bisnis, dan memberikan pinjaman bank, dengan tujuan untuk mengurangi resiko perlawanan terhadap rezim kolonial. Kelompok-kelompok yang berpengaruh tersebut termasuk para pemimpin agama, para kepala suku dan para pedagang.

Kelompok-kelompok yang berpengaruh tersebut muncul sebagai faktor-faktor historis pra-kolonial yang berkaitan dengan dominasi kehidupan religius di kalangan masyarakat di wilayah Utara oleh ajaran religius Muslim sufi dan juga sebagai akibat tidak langsung dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Di era pasca kemerdekaan, kelompok-kelompok sosial yang berpengaruh tersebut memegang otoritas dan memiliki pengaruh politik. Hal tersebut mempersulit situasi mengingat perkembangan yang ada di wilayah Utara dan perkembangan yang terkait dengan relasi Utara dan Selatan sebab di kedua

<sup>36</sup> *The History and Origins of The Current Conflict in Darfur*, [www.sarpn.org.za/documents/d0001277/ PNADC475\\_Darfur\\_Febr2005\\_Chap2.pdf](http://www.sarpn.org.za/documents/d0001277/ PNADC475_Darfur_Febr2005_Chap2.pdf) diakses tanggal 12 Juli 2005.

<sup>37</sup> *The Black Book : Imbalance of Power and Wealth*, [http://sudanjem.com/english/books/blackbook\\_part1/20040422\\_bbone.htm](http://sudanjem.com/english/books/blackbook_part1/20040422_bbone.htm), diakses tanggal 14 Juli 2005.

wilayah ini, komposisi masyarakatnya sangat plural dan hal ini sudah eksis sejak dahulu kala<sup>39</sup>.

Berkaitan dengan latar belakang historis di atas, maka sejak masa kolonial, Darfur, sama seperti wilayah Selatan Sudan, harus berjuang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Terjadi ketidakseimbangan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta pendidikan di Darfur. Sejak tahun 1939 hingga tahun 1952, sedikit sekali sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang dibangun di Darfur, jika dibandingkan dengan yang dibangun di daerah-daerah yang berada di wilayah Utara maupun Tengah Sudan. Dan selama masa kolonial pula peraturan yang dibuat oleh Inggris membiarkan Darfur mengalami marginalisasi dalam bidang politik dan pengabaian serta kemandekan dalam bidang ekonomi<sup>40</sup>.

Kemudian pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, para pemimpin agama, para kepala suku dan para pedagang datang ke wilayah bagian Barat Sudan guna memperoleh pengaruh yang besar di dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Mereka mendominasi parlemen dan senat yang dibentuk pertama kali serta mendominasi keanggotaan dalam badan legislatif dan lembaga pusat. Kemunculan mereka, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, disebabkan karena faktor-faktor historis yang berkaitan dengan dominasi kehidupan religius oleh ajaran Muslim sufi dan juga karena akibat tidak langsung dari kebijakan yang diterapkan oleh Inggris sebagai negara kolonial. Pada masa itu pula, Darfur diperintah oleh komisioner-komisioner yang mengabaikan kebutuhan dasar warga Darfur dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pemerintah pusat<sup>41</sup>.

Masalah selanjutnya adalah terdapatnya “anggota-anggota yang diekspor”- yaitu para anggota parlemen dari Khartoum yang mewakili Darfur dalam *National Assembly* namun hanya memberikan sedikit perhatian terhadap keberlangsungan

<sup>39</sup> *The History And Origins Of The Current Conflict In Darfur, Op.Cit.,*

<sup>40</sup> *Op.Cit.,*

<sup>41</sup> *Op.Cit.,*

kehidupan di Darfur. Terkait dengan masalah ini, maka ada semacam sistem yang memungkinkan itu semua terjadi<sup>42</sup>.

Otoritas negara merupakan salah satu sumber dan alat untuk mencapai kemakmuran bagi semua orang dalam sebuah negara, tak terkecuali Sudan. Sejak merdeka tahun 1956, Sudan mendeklarasikan dirinya sebagai negara yg berdaulat dan mengibarkan benderanya bersamaan dengan pencanangan slogannya yg berjanji untuk berkomitmen penuh untuk bekerja demi kebaikan semua pihak dalam sebuah negara yg baru. Namun terjadi ketidaksesuaian antara slogan dan kenyataan<sup>43</sup>.

Perpolitikan di Sudan adalah politik aliran dan didominasi oleh dua kelompok agama, Mahdi dan Mirghani. Dua kelompok keagamaan ini identik dengan dua partai politik penting di Sudan, *Umma Party* identik dengan Mahdi dan *Democratic Unionist Party* identik dengan Mirghani. Dua kelompok keagamaan ini mendapatkan kekuasaan dari warisan kolonial. Untuk memonopoli kekuasaan di Sudan, kedua partai ini memberikan kepemimpinan partainya pada masing-masing kelompok agama mereka. Oleh karena itu pemimpin partai sekaligus merupakan pemimpin kelompok keagamaan. Strategi yg digunakan adalah pemimpin-pemimpin kelompok keagamaan harus berasal dari keluarga pendiri kelompok keagamaan tersebut. Selain itu, strategi berikutnya adalah dengan mengirim kandidat untuk mengikuti pemilu. Anggota-anggota partai yang penting yang berada di pusat diberikan dukungan untuk menjadi calon dalam pemilu di wilayah yang bukan wilayah mereka. Strategi ini terbukti secara efektif berhasil melahirkan wakil-wakil politik di tingkat lokal. Strategi semacam ini juga bisa menjamin adanya dominasi suara di wilayah Utara dan seluruh wilayah lain dan menjamin terbentuknya pola-pola yg mapan untuk berhubungan dengan daerah-daerah pinggiran. Pola-pola tersebut juga bisa berarti bahwa kekuasaan legislatif menyisakan orang-orang yang utamanya ditarik dari wilayah Utara. Pola-pola mapan yang sudah dijelaskan di atas memiliki percabangan yang banyak dalam perwakilan politik di Sudan. Perwakilan yang kuat dari wilayah

<sup>42</sup> *Op.Cit.*,

<sup>43</sup> *The Black Book : Imbalance of Power and Wealth in Sudan, loc. cit.*

Utara di pemerintah pusat menysikan pengabaian terhadap kekuasaan yang diperoleh di wilayah-wilayah lain dan mengubah lingkungan politik<sup>44</sup>.

Sepanjang sejarahnya, wilayah Utara memiliki perwakilan dalam pemerintah pusat lebih dari 50 %. Bahkan perwakilannya bisa mencapai 70 %. sejak kemerdekaan hingga saat ini, tidak ada satupun Perdana Menteri atau Presiden yang berasal dari daerah lain kecuali dari wilayah Utara. Seperti banyak negara dunia ketiga, Sudan memiliki beberapa pemerintahan yg terbentuk dari hasil proses kudeta. Bagaimanapun juga, beberapa upaya untuk menggulingkan pemerintahan dengan mudah dapat digagalkan karena para pemimpinnya bukan berasal dari wilayah Utara<sup>45</sup>.

Penjelasan di atas tentang masalah pendidikan pada masa kolonial sedikit banyak sudah menyinggung masalah ketidakseimbangan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Darfur. Pasca kemerdekaan, perbedaan yang mencolok terjadi dalam hal pelayanan pendidikan. Sementara daerah-daerah lain sudah merasakan dampak positif kemajuan pendidikan, yaitu dengan banyaknya jumlah anak yang memperoleh pendidikan tingkat menengah, anak-anak yang berasal dari wilayah terpencil hanya bisa sampai tingkat dasar. Di wilayah Darfur Barat, sekolah dasar yang ada ditutup selama dua tahun dan kekurangan buku dan dana untuk menggaji pegawai. Faktanya, disana tidak ada dana untuk membeli buku-buku. Ada lebih dari 1,5 juta orang di wilayah Darfur Barat, namun hanya 4.211 anak yang bisa mengikuti ujian akhir di sekolah tingkat menengah. Jumlah ini kurang dari jumlah lulusan sekolah dasar di sebuah Wilayah Administratif Lokal di wilayah Utara. Perbandingannya menjadi agak “menakjubkan” ketika kita menyadari salah satu Wilayah Administratif Lokal di Darfur mempunyai populasi yang sama dengan seluruh populasi yang ada di Darfur Barat<sup>46</sup>.

Pada level yang berbeda, wilayah-wilayah yang termarginalkan juga mendcrita ketika tersedia dana untuk mendanai proyek pengembangan wilayah-wilayah yang ada di Sudan. Sesuai dengan keputusan pemerintah, tidak ada yang boleh memperoleh dana tersebut tanpa membuat suatu penelitian. Untuk

<sup>44</sup> *Op.Cit.*,

<sup>45</sup> *Op.Cit.*,

<sup>46</sup> *Op.Cit.*,

sementara hal ini masuk akal dan bisa diterima, namun fakta berbicara lain ketika wilayah Utara memegang kendali atas kekuasaan tertinggi di Sudan. Wilayah-wilayah miskin tidak diberi dana untuk penelitian dan tidak memperoleh kesempatan untuk bersaing dalam kompetisi yang kredibel untuk memperoleh dana proyek tersebut. Hasilnya sudah jelas, *The National State Support Fund* menyalurkan seluruh dana tersebut untuk mendanai proyek-proyek yang ada di wilayah Utara ketimbang yang ada di wilayah Barat, Selatan, maupun Timur<sup>47</sup>.

- **Adapun sejarah tiap kelompok politik di Sudan adalah sebagai berikut<sup>82</sup>:**

#### **Partai Umma**

Selama periode terakhir demokrasi parlementer, Partai Umma merupakan partai terbesar di Sudan, dan pemimpinnya, Sadiq al-Mahdi berhasil menduduki posisi Perdana Menteri dalam seluruh pemerintahan koalisi antara tahun 1986 dan 1989. Didirikan tahun 1945, Partai Umma merupakan organisasi politik gerakan Islam Anshar. Para pendukungnya merupakan murid dari Mahdi, yang memerintah Sudan tahun 1880-an. Walaupun Anshar bisa ditemui di seluruh kawasan Sudan, namun sebagian besar tinggal di pedesaan sebelah barat Darfur dan Kurdufan. Sejak Sudan merdeka tahun 1956, Partai Umma telah berpengalaman sebagai sebuah partai politik yang ulung sekaligus keras sepak terjangnya. Pada tahun 1970 Sadiq al-Mahdi menjadi pemimpin Partai Umma sekaligus pemimpin spiritual Anshar, menyusul persetujuan antara Sadiq al-Mahdi dengan pemerintahan Numeiri. Akibat persetujuan itu, 3000 anggota

<sup>47</sup> *Op.Cit.*,

<sup>82</sup> *Major Sudanese Political Parties*, <http://www.sudan.net/government/parties.html>, diakses 4 April 2006

Anshar mati terbunuh. Kemudian menyusul rekonsiliasi singkat antara Sadiq al-Mahdi dan Numeiri pada pertengahan tahun 1970-an, Sadiq al-Mahdi dipenjara karena terbukti mengobarkan pemberontakan kepada pemerintahan asing dan kebijakan domestic, termasuk lontaran komentarnya pada tahun 1983 bahwa *September Laws* itu tidak Islami. Meskipun kritik-kritik Sadiq al-Mahdi terhadap Numeiri merupakan upaya untuk memunculkan sentiment agama, Partai Umma merupakan sebuah partai Islam yang mendedikasikan dirinya untuk mencapai agenda politik Muslim di Sudan. Sadiq al-Mahdi sendiri sama sekali tidak keberatan dengan penerapan syari'ah bagi Sudan, namun sangat tidak setuju jika syaria't Islam dijadikan alat politik, seperti yang dilakukan oleh Numeiri dengan *September Laws*-nya. Kemudian, ketika Sadiq al-Mahdi menjadi Perdana Menteri tahun 1986, dia tidak menghapuskan syari'at Islam. Karena gagal meyakinkan non Muslim yang antipati terhadap penerapan syari'at Islam, Sadiq al-Mahdi bekerjasama dengan Hasan al-Turabi untuk menyusun hukum legal Islam untuk Sudan. Saat Sadiq al-Mahdi menyadari bahwa mengakhiri perang sipil dan tetap membelakakan syari'at Islam akan menghambat pencapaian tujuan politik, kepercayaan public terhadap kredibilitas pemerintahannya hilang. Kemudian intervensi militer masuk untuk mengatasi kemelut ini. Nyaris berbarengan dengan terjadinya kudeta pada Juni 1989, Sadiq al-Mahdi kembali dijebloskan ke dalam penjara dan dikirim ke pengasingan selama beberapa bulan. Dia baru dibebaskan dari penjara tahun 1991. Selama ditahan, Sadiq al-Mahdi tetap menduduki posisi politik yang diberikan pada Parta Umma padanya. Kemudian dia memutuskan untuk bergabung dengan SPLA/SPLM serta partai politik di Utara di bawah

payung NDA, sebuah kelompok oposisi yang merupakan gabungan dari berbagai partai politik oposisi di Sudan.

### **The Democratic Unionist Party (DUP)**

DUP juga merupakan partai politik yang berdasarkan atas tatanan religius, yakni organisasi Khatmiyyah. Sejak Khatmiyyah melakukan oposisi terhadap Mahdi tahun 1880-an, otomatis Khatmiyyah menjadi musuh Anshar. Walaupun Khatmiyyah memiliki pendukung yang lebih banyak dari Anshar, secara umum sepak terjang politik Khatmiyyah tidak terlalu signifikan. Dalam sejarahnya, DUP dan para pendahulunya mengalami perpecahan. Perpecahan ini berakar dari terdapatnya perbedaan perspektif para kader partai yang berpikiran sekuler dan kader partai yang religius tradisional. Muhammad Uthman al-Mirghani, pemimpin DUP sekaligus pemimpin spiritual Khatmiyyah, mencoba untuk tetap mempertahankan perpecahan ini dengan menghindari sikap mental yang teguh dalam persoalan-persoalan politik yang kontroversial. Dia memilih untuk tidak ikut-ikutan melakukan oposisi terhadap pemerintahan Numeiri agar para pengikut Khatmiyyah tidak dialienasi. Pada Pemilu tahun 1986, DUP memenangkan suara terbanyak kedua setelah Partai Umma. Dengan begitu Muhammad Uthman al-Mirghani memperoleh posisi dalam pemerintahan koalisi. Seperti halnya Sadiq al-Mahdi, Mirghani menentang adanya upaya penghapusan syari'at dari bumi Sudan seperti yang dilakukan oleh SPLA/SPLM. Dan Mirghani mendukung ide revisi terhadap *September Laws* guna menghilangkan *content* yang tidak Islami yang dimasukkan oleh Numeiri.

Pada akhir tahun 1988, para pemimpin DUP mendesak Mirghani agar menghapuskan syari'at Islam di Sudan. Mereka beranggapan bahwa persoalan syari'at Islam merupakan penghalang utama tercapainya resolusi damai bagi perang sipil yang terjadi di Sudan selama belasan tahun. Mirghani sendiri menjadi yakin bahwa perang sipil yang tengah berlangsung memiliki bahaya yang lebih besar dibanding dengan berbagai macam kompromi soal syari'at. Sikap inilah yang kemudian membawanya pada satu pertemuan dengan John Garang di Etiopia. Di sana kedua pemimpin kelompok politik ini menegosiasikan soal persetujuan gencatan senjata berdasarkan komitmen untuk menghapuskan *September Laws*. Selama enam bulan hingga kudeta pada Juni 1989, Mirghani melakukan upaya-upaya guna mencari dukungan bagi kesepakatan yang dia buat bersama John Garang di Etiopia. Dan selama itu pula Mirghani kemudian menjadi figure seorang Muslim yang paling penting dalam memperjuangkan sebetulnya kompromi dalam penerapan syari'at. Seiring dengan terjadinya kudeta, Mirghani dikirim ke pengasingan dan menghabiskan sisa hidupnya di Mesir. Sejak 1989, RCC-NS mencoba untuk memanfaatkan perpecahan dalam tubuh DUP dengan cara merekrut kader-kader DUP yang bermasalah dengan kepemimpinan Mirghani, namun upaya tersebut gagal untuk melemahkan DUP sebagai kelompok oposisi.

### **The National Islamic Front (NIF)**

NIF merupakan metamorfosis dari *Muslim Brotherhood* yang berpusat di Mesir. Di Sudan sendiri, *Muslim Brotherhood* muncul pada tahun 1949.



Organisasi pergerakan Islam modern ini muncul dari kelompok-kelompok mahasiswa Muslim tahun 1940-an. Mereka mengembangkan serta menyebarkan organisasi ini ke berbagai universitas yang ada di Sudan dan basis dukungan terbesar mereka adalah berasal dari kalangan terpelajar (*well educated*). Tujuan utama *Muslim Brotherhood* di Sudan adalah melembagakan hukum Islam (*Syariah*) ke seluruh Sudan. Hasan Abdallah al-Turabi, mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Khartoum, menjadi Sekretaris Jenderal *Muslim Brotherhood* sejak tahun 1964. Turabi mulai bekerja bersama dengan Numeiri pada pertengahan tahun 1970-an dan sebagai Jaksa Agung pada waktu itu, dia terlibat secara intens dalam penerapan syari'at di Sudan. Setelah tergulingnya Numeiri, Turabi merupakan aktor utama yang berada di balik pendirian *National Islamic Front* (NIF), sebuah *Brotherhood*, yang menjadi organisasi dominan. NIF terdiri dari berbagai partai Islam yang kecil-kecil. NIF pulalah (dikomandoi oleh Turabi) yang menggagas *Sudan Charter* pada tahun 1987, sebuah "kertas kerja" untuk membangun sebuah bangsa yang bersatu dalam keragaman. Seiring dengan bergulirnya kudeta tahun 1989, *Revolutionary Command Council for National Salvation* (RCC-NS) menahan Turabi serta beberapa pemimpin partai lainnya, kemudian Turabi diasingkan selama beberapa bulan. Namun tindakan ini tetap saja tidak mampu menghilangkan kepercayaan yang beredar dalam masyarakat Sudan bahwa Turabi dan NIF berkolaborasi secara intens serta aktif dengan RCC-NS. Pengaruh NIF dalam pemerintahan terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta kehadiran beberapa anggota NIF dalam kabinet Omar al-Bashir.

### **Sudan People's Liberation Army/Movement (SPLA/SPLM)**

SPLA didirikan tahun 1983 ketika Letnan Kolonel John Garang dikirim untuk memadamkan pemberontakan di daerah Bor. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh 500 orang tentara yang berasal dari wilayah Selatan yang melawan perintah pemerintah Khartoum. Meskipun John Garang ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan para pengkhianat negara, pada akhirnya John Garang juga melakukan pemberontakan dan menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin pemberontak yang melawan pemerintah Khartoum. John Garang, yang berasal dari suku Dinka, lahir dalam keluarga Nasrani. Dia menempuh studinya di Grinnel College, Iowa, AS untuk kemudian kembali lagi ke AS untuk mengambil kelas khusus untuk endapat pangkat Letnan Kolonel di Fort Benning, Georgia. Dia juga sempat mengambil gelar sarjana ekonomi di Iowa state University.

Pada tahun 1986 SPLA diestimasi memiliki 12.500 pengikut yang dibagi dalam 12 batalion dan diperlengkapi dengan persenjataan ringan serta sejumlah mortir. Pada tahun 1989 kekuatan SPLA telah mencapai 20.000-30.000 orang; tahun 1991 diestimasi mencapai 50.000-60.000.

### **The Republican Brothers**

Republikan Brothers yang didirikan tahun 1950 menjadi partai kecil yang berpengaruh di era 1980-an. Mahmud Muhammad Thaha mendirikan partai ini sebagai sebuah gerakan reformasi Islam yang menekankan toleransi, keadilan dan memaafkan. Thaha menjadi figure yang menonjol ketika dia menjadi oposisi bagi Numeiri. Dia tidak setuju dengan penerapan syari'at yang dilakukan oleh Numeiri

sebab dia menganggap itu tidak sesuai dengan esensi Islam. Dia ditahan kemudian dieksekusi pada Januari 1985. Eksekusi tersebut menimbulkan perubahan yang amat signifikan di Sudan sebab Taha merupakan figure yang menonjol. Hal ini juga yang menyebabkan Numeiri terguling. Walaupun *Republikan Brothers* mampu bertahan tanpa pemimpinnya dan masih bisa berpartisipasi dalam ranah politik selama era parlementer, partai ini tidak lagi aktif dalam ranah politik sejak 1989.

### **The Sudanese Communist Party (SCP)**

SCP didirikan tahun 1944 dan sejak awal sudah mempunyai basis dukungan yang kuat di universitas-universitas dan persatuan buruh. Walaupun partai ini relative kecil, namun SCP menjadi salah satu partai politik yang paling terorganisir saat Sudan baru mendeklarasikan kemerdekaannya. SCP juga salah satu partai yang merekrut anggota dari wilayah Selatan. Berbagai partai yang berafiliasi menjadi satu melakukan perlawanan terhadap SCP dan sebagai konsekuensinya pemerintahan sipil maupun militer yang pernah memerintah Sudan sama-sama memberlakukan pelarangan dan pembekuan partai-partai tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1971 Numeiri Numeiri kemudian memerintahkan untuk menahan ratusan anggota SCP beserta beberapa pemimpinnya, termasuk sekretaris jenderal, yang ditahan atas tuduhan pengkhianatan, diadili dengan tergesa-gesa dan dieksekusi dengan cepat.

Seiring dengan tergulingnya Numeiri, SCP mulai bangkit lagi, dan memenangkan tiga kursi tahun 1986 pada pemilu parlementer. Sejak kudeta pada

Juni 1989, SCP muncul menjadi salah satu oposan paling efektif bagi pemerintahan Omar al-Bashir, terutama melalui publikasi dan sirkulasi surat kabar yang dikeluarkan SCP, *Al-Midan*. Pada November 1990, Babikr at Tijani at Tayib, sekretaris jenderal partai terlarang SCP melarikan diri dari tahanan rumah kemudian lari ke Etiopia.

### **Partai Baath**

Partai Baath di Sudan relative kecil dan sejaris dengan Partai Baath yang ada di Irak. Partai Baath berkomitmen untuk menyatukan Sudan dengan Mesir atau Libya sebagai sebuah langkah awal penciptaan sebuah bangsa yang meliputi seluruh negara yang berbahasa Arab. Namun ketidaksepakatan ideologis Partai Baath dengan rezim-rezim yang eksis di Sudan dan Irak menghalangi dukungan politik terhadap partai ini. Pemerintahan Numeiri dan Omar al-Bashir secara bergantian memberikan toleransi maupun tekanan terhadap Partai Baath. RCC-NS misalnya, menahan lebih dari 45 pengikutnya selama musim panas tahun 1990. Pembatasan-pembatasan yang diberlakukan terhadap Partai Baath diperingan pada akhir tahun 1990. Hal ini rupanya dikarenakan mengalirnya dukungan Sudan terhadap Irak selama Perang Teluk Persia.

## 2. Faktor Eksternal

### 2.1. Keterlibatan Pihak Asing

Sejak merdeka tahun 1956 kelompok-kelompok yang ada di Utara saling bersaing untuk mengendalikan negara dan mendominasi Selatan. Pemberian bantuan senjata dari AS dan Uni Soviet secara besar-besaran memperbesar perpecahan etnis dan politik. Kekuatan pemberontak di Selatan dipersenjatai (melalui Etiopia) oleh Israel tahun 1960-an dan Uni Soviet tahun 1970-an dan 1980-an. Kekuatan pemberontak ini kemudian dibenturkan dengan pemerintah Utara yang diberi bantuan persenjataan secara berturut-turut oleh Uni Soviet pada tahun 1960-an dan AS pada tahun 1970-an & 1980-an. Pada saat Numeiri memperoleh kekuasaan tahun 1969, dukungan yang pertama kali datang dari Uni Soviet dan kemudian AS turut memberikan dukungan.<sup>83</sup>

Sudan dan AS menjalin hubungan yang dekat selama akhir 1970-an dan awal 1980-an. Wakil Presiden George Bush pernah mengadakan sebuah kunjungan resmi ke Khartoum hanya satu bulan sebelum Numeiri digulingkan pada April 1985 dan selama Numeiri berkuasa, dia sering meminta bantuan AS ketika terjadi puncak demonstrasi massa yang hendak menggulingkan dirinya. Pemerintahan militer transisional maupun pemerintahan parlementer memandang dukungan AS terhadap Numeiri dengan rasa curiga, dan diputuskan untuk mengakhiri aliansi *de facto* yang berkembang setelah tahun 1979. Karena aliansi ini memakai simbol Operasi Bintang Besar, dan sudah banyak latihan militer yang diadakan setiap 2 tahun sekali yang berlangsung dalam teritori Sudan, maka salah

<sup>83</sup> *Sudan*, [http://www.fpiif.org/briefs/vol2/v2n41s\\_body.html](http://www.fpiif.org/briefs/vol2/v2n41s_body.html), diakses 12 Desember 2005

satu kebijakan yang pertama kali dikeluarkan adalah mengakhiri partisipasi Sudan dalam Operasi Bintang Besar. Walaupun demikian, hubungan antara Sudan dan AS saat Sadiq al-Mahdi menjadi Perdana Menteri tetaplah penting mengingat AS melanjutkan perannya sebagai negara pemberi bantuan yang signifikan bagi Sudan<sup>84</sup>

AS telah sekian lama memandang Sudan sebagai sebuah wilayah yang strategis karena luas negara, terdapatnya cadangan minyak yang besar serta menempati posisi yang strategis untuk melakukan serangan ke Timur-Tengah. Dengan kata lain Sudan memungkinkan sekali untuk dijadikan *base camp* bagi militer AS seperti yang AS lakukan di Saudi Arabia. Pemerintah AS lalu memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada pemerintah Sudan. Bantuan financial senilai 2 juta US\$ diberikan pemerintah AS, sebagian besar dalam bentuk persenjataan selama Perang Dingin dalam rangka meng-*counter* Uni Soviet dan sebagian lagi digunakan untuk melakukan perang etnis. Begitu juga dengan Uni Soviet yang mensortir persenjataan untuk mendukung pemerintah Sudan selama tahun 1960-an dan kemudian bersama-sama dengan Israel memberikan dukungan kepada para pemberontak selama tahun 1970-an dan 1980-an. AS selalu mempunyai keterlibatan yang besar di Sudan meski sifatnya pragmatis dan bisa berubah sewaktu-waktu.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> *Sudan-United States*, [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0132\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0132)), diakses 7 September 2005

<sup>85</sup> *Oil and The Crisis in Sudan*  
[http://groups.google.co.id/group/misc.activism.progressive/browse\\_frm/thread/bd5ba6e391570bc/05f9d1ad89b06d83?vc=1&q=backgroud+to+the+sudan+eritrea+conflict&hl=id#05f9d1ad89b06d83](http://groups.google.co.id/group/misc.activism.progressive/browse_frm/thread/bd5ba6e391570bc/05f9d1ad89b06d83?vc=1&q=backgroud+to+the+sudan+eritrea+conflict&hl=id#05f9d1ad89b06d83), diakses 25 Desember 2005

SPLM/SPLA merupakan kelompok oposisi bersenjata paling utama di Sudan. Jika pada tahun 1983 SPLM/SPLA melakukan oposisi terhadap Numeiri, maka pada tahun 1986 kelompok ini melakukan perlawanan di pegunungan Nuba, dan di Sudan Timur sejak tahun 1996. SPLM/SPLA mendapat bantuan serta dukungan dari negara lain, seperti pemerintah Etiopia yang saat itu berada di bawah Letnan Kolonel Mengistu Haile Meriam. Bantuan serta dukungan tersebut berupa perlengkapan semacam seragam militer, persediaan logistic, persenjataan, amunisi, pelatihan militer, dan bahkan arahan politik. Unit-unit SPLA yang berpusat di Gambela, sebuah wilayah di barat Etiopia berpartisipasi dalam operasi militer dengan kekuatan Etiopia yang sedang melawan pemberontak Oromo, dan kekuatan Etiopia memberi dukungan kepada SPLM/SPLA dalam kegiatan perlawanan terhadap tentara pemerintah Sudan. Ketika pemerintah Mengistu kolaps pada tahun 1991, SPLA dipandang sebagai seorang musuh oleh pemerintah Etiopia yang baru. Pemerintah Etiopia yang baru tiba-tiba berbalik menarik dukungannya bahkan menutup akses bagi SPLA di Etiopia. SPLM/SPLA dan ratusan pengungsi Sudan yang ada di Etiopia kemudian kembali ke Sudan. Setelah perpecahan yang terjadi di tubuh SPLM/SPLA, pada tahun 1992 pemerintah Sudan seolah mendapat energi baru untuk mendapatkan kembali kota-kota yang sebelumnya pernah direbut oleh SPLM/SPLA. Namun Setelah mendapat dukungan terus-menerus dari Uganda, bersama dengan Eritrea, pada tahun 1995 Uganda menopang sebuah aliansi oposisi yang besar, memberikan SPLM/SPLA kesempatan kedua untuk kembali bergerak, di sisi lain SPLA tetap berupaya untuk mengadakan rekonsiliasi antara SPLM/SPLA dengan pemerintah

Etiopia yang baru. Dan pada tahun itu (1995) SPLM/SPLA mendapat akses baru melewati Etiopia demi merebut wilayah-wilayah di selatan Sudan. Sejak tahun 1996, SPLM/SPLA juga memusatkan sebuah kekuatan militernya di barat Eritrea, yang dikenal dengan nama *New Sudan Brigade*<sup>86</sup>.

Pada perkembangan selanjutnya, SPLM/SPLA dibekingi oleh Eritrea.<sup>87</sup> Dukungan yang diberikan oleh Eritrea mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dan terdapat hubungan yang koheren antara Eritrea dengan NDA, yang menjadi payung bagi kelompok-kelompok oposisi di Sudan. Hubungan yang koheren antara *National Democratic Alliance* (NDA) dan orang-orang Eritrea serta pemerintahnya terjadi sejak Eritrea menjadi tuan rumah *NDA's Fundamental Issues Conference* di Asmara (Juni 1995) yang diselenggarakan oleh para pemimpin Eritrea. Peristiwa ini menjadi sebuah sumber atau titik awal bagi permusuhan dan peperangan yang timbul antara rezim NIF yang berkuasa dan Eritrea, walaupun normalisasi kadang kala diupayakan<sup>88</sup>.

NDA didirikan tahun 1992 oleh parta-partai kalah yang berkoalisi, serikat buruh dan individu-individu yang beroposisi terhadap NIF. NDA telah meminta agar dibentuk pemerintahan transisional dengan sebuah konstitusi baru yang akan menjamin diberlakukannya demokrasi multipartai, ditegakkannya HAM, serta diakuinya keragaman agama dan etnis. Sejak berdiri tahun 1992 NDA telah menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi dan pada tahun 1996 NDA

<sup>86</sup> *Sudan-The Civil War*, <http://www.hrw.org/reports98/sudan/Sudarm988-03.htm#TopOfPage>, 10 Januari 2006.

<sup>87</sup> *The SPLM/SPLA Evolution and Struggle for the New Sudan*, *Op.Cit.*,

<sup>88</sup> *Is Blasting Eritrea Hotels a New Offensive Against Sudan Peace Talks?* *Op.Cit.*,



bergabung dengan komando militer SPLA. Dipimpin oleh DUP, NDA mendapat tekanan AS serta bantuan politik dari AS<sup>89</sup>.

Hingga menginjak tahun 2003 SPLM/SPLA masih menerima pelatihan, persenjataan dan peralatan dari Eritrea.<sup>90</sup>

NDA telah menerima bantuan politik, militer serta logistic dari negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Sudan. Eritrea, Etiopia serta Uganda dengan sangat jelas serta terang-terangan berada di balik terdapatnya upaya-upaya penggulingan pemerintah Sudan yang sah serta membangun jaringan pemberontakan di Sudan. Mereka mempersenjatai dan melatih kekuatan oposisi Sudan. Uganda menyediakan akses serta *supply* untuk operasi-operasi militer yang dilakukan oleh SPLM/SPLA di wilayah selatan Sudan. Sementara itu kekuatan Uganda secara langsung terlibat di Sudan, bergabung dengan kekuatan SPLM/SPLA, melakukan perlawanan terhadap dua target utama mereka, yakni pemerintah Sudan sendiri serta pemberontak Uganda yang didukung oleh pemerintah Sudan. Etiopia juga turut memberikan dukungan bagi pemberontak SPLM/SPLA dan *Sudan Alliance Force* (SAF) di Etiopia barat serta telah mengirimkan *supply* bagi SPLA yang ada di Uganda utara. Eritrea sendiri menyediakan wilayahnya untuk kelompok-kelompok anti pemerintah Sudan yang tak terbatas hanya SAF, SPLA dan Beja Congress. Eritrea juga memberikan pelatihan militer (yang diperolehnya dari AS) bagi kelompok-kelompok pemberontak tersebut. Bantuan berupa tank serta pelatih tank juga diterima oleh SPLM/SPLA dari Eritrea. Pada serangan yang diadakan pada Maret-April 1997

<sup>89</sup> *Foreign Policy In Focus-Self Determination Conflict Profile Sudan, Op.Cit.*,

<sup>90</sup> *The Darfur Tragedy, Op.Cit.*,

terhadap wilayah-wilayah di selatan Sudan, SPLM/SPLA menggunakan unit-unit pengintai yang mereka dapatkan dari Eritrea. NDA memiliki markas besar di Eritrea<sup>91</sup>.

Ada beberapa pengaruh eksternal yang penting dalam konflik antara Arab dan Fur, khususnya konflik antara pihak Selatan (SPLA) dan *link-link* dengan Libya dan Chad, termasuk visi Khadafi soal Pan-Arabism yang bermain di Darfur selama tahun 1980-an<sup>92</sup>.

Hubungan Sudan dengan Libya, yang merupakan negara tetangga Sudan yang terletak di sebelah barat laut, mengalami pasang surut antara permusuhan dan perbaikan, yang terjadi sepanjang tahun 1980-an. Numeiri dan pemimpin terkemuka Libya, Muammar al-Qadhafi bertentangan satu sama lain. Numeiri mengizinkan *Libyan National Salvation Front* menyiarkan kecaman-kecaman anti Qadhafi dari pemancar radio yang terletak di Sudan. Pemerintah Libya menanggapi hal tersebut dengan memberi latihan terhadap kekuatan oposisi anti Numeiri yang ada di Libya dan memberikan bantuan financial serta dukungan material kepada SPLM. Memulihkan hubungan dengan Libya telah menjadi tujuan pemerintahan transisional, parlementer dan militer Sudan sejak tahun 1985. Pemerintahan Sadiq al-Mahdi mengizinkan Libya untuk meletakkan beberapa pangkalan militernya di Darfur, daerah yang mereka gunakan sebagai basis penyaluran bantuan mereka bagi para pemberontak Chad yang melancarkan serangan melawan kekuatan pemerintah Chad. Perluasan hubungan antara Sudan dan Libya tidak dipandang sebagai sesuatu hal yang menguntungkan bagi

<sup>91</sup> *Sudan-Global Trade*, <http://www.hrw.org/reports98/sudan/Sudarm988-02.htm#TopOfPage>, 10 Januari 2006.

<sup>92</sup> *Op.Cit.*,

pemerintah Mesir. Pada tahun 1988, untuk merespon tekanan yang datang dari Mesir dan AS, pemerintah Sudan meminta Libya menarik kembali pasukannya dari Sudan<sup>93</sup>.

Jalinan hubungan dengan Libya diperluas lagi setelah kudeta pada Juni 1989. Pada akhirnya Khartoum dan Tripoli menunjukkan ketertarikannya pada sebuah persatuan bangsa mereka. Pada Juli 1990, Libya dan Sudan bergabung dalam *General People's Committee*. Pertemuan pertama mereka pun kemudian dilangsungkan, dan lembaga kementerian kedua negara bertemu untuk mengadakan pembahasan mengenai rencana unifikasi kedua negara. Walaupun sebuah perjanjian untuk menyatukan kedua negara sudah dirundingkan oleh Sudan dan Libya pada tahun 1990, namun unifikasi yang dihasilkan bukan merupakan unifikasi politik tapi hanya sebuah kerjasama ekonomi yang lebih besar dari yang sebelumnya pernah dirintis. Sudan dan Libya menandatangani sebuah protocol dalam bidang perdagangan dan pembangunan. Dengan adanya protocol tersebut maka kedua negara saling memberikan keuntungan. Investasi Libya di bidang pertanian ditukar dengan jaminan akses bagi tersedianya *supply* makanan untuk Sudan. Kedua negara juga setuju untuk membentuk sebuah komite kerja untuk membuat rancangan atau konsep yang bisa mengurangi pembatasan-pembatasan perjalanan antara Darfur dan wilayah Al-Khalij di perbatasan Libya. Pada tahun 1990 Qadhafi mengadakan kunjungan resmi kenegaraan ke Khartoum. Walaupun Qadhafi menunjukkan kepuasannya atas

---

<sup>93</sup>*Sudan-Libya*, [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0128\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0128)), diakses 7 September 2005

kemajuan yang telah dibuat oleh kedua negara selama ini, namun dia juga menyatakan pandangannya terhadap RCC-NS, bahwa tertutupnya jalinan antara RCC-NS dengan NIF merupakan sebuah ketidakpatutan<sup>94</sup>.

Sepanjang tahun 1980-an, hubungan antara Sudan dan Chad, negara tetangga Sudan yang terletak di sebelah barat Sudan, dipengaruhi oleh perang sipil dalam negeri Chad, yang seringkali perselisihan tersebut melebar hingga ke Darfur, dan turut mempengaruhi hubungan Chad dengan Libya, dimana Libya melakukan intervensi terhadap konflik internal Chad. Saat terjadi kudeta yang dilakukan oleh Omar al-Bashir pada tahun 1989, Darfur barat digunakan sebagai sebuah medan perang oleh tentara yang loyal kepada pemerintah Chad yang saat itu diperintah oleh Hussein Habre dan pemberontakan terhadap pemerintah Chad dipimpin oleh Idriss Deby serta didukung oleh Libya. Deby berasal dari kelompok etnis Zaghawa yang hidup di perbatasan Chad dan Sudan, dan etnis Zaghawa yang terdapat di Darfur memberikan dukungan dan perlindungan. Ratusan etnis Zaghawa yang ada di Chad pergi ke Sudan dalam rangka mencari pengungsi yang lari ke Sudan akibat konflik internal yang terjadi di Chad. RCC-NS (*Revolutionary Command Council for National Salvation*) yang tidak dipersiapkan untuk berkonfrontasi dengan Chad, yang baru saja memberikan bantuan kepada SPLM, kemudian cenderung membabi buta saat kekuatan Chad

<sup>94</sup> NIF merupakan unsur utama yang berada di balik pembentukan RCC-NS dengan Turabi sebagai arsiteknya, lihat *Belajar dari Sudan, ISLAMIKA- Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, Nomor 6 Tahun 1995, *Op.Cit.*,

masuk ke wilayah Darfur dalam rangka mengejar para pemberontak yang lari ke Darfur<sup>95</sup>.

Pada bulan Mei 1990, tentara Chad menginvasi ibukota propinsi Al-Fashir, dimana mereka ingin menolong saudara mereka yang terluka yang dirawat di rumah sakit setempat. Selama musim panas, kekuatan Chad membakar 18 desa dan menculik 100 orang sipil. *Deby's Patriotic Movement for Salvation (Mouvement Patriotique du Salut)* memberikan persenjataan bagi orang-orang Sudan yang beretnis Zaghawa dan milisi-milisi Arab. Tindakan pemberontak Chad yang dimotori oleh Idriss Deby ini hanyalah tindakan pura-pura, agar mereka bisa melindungi gerakan mereka dari *sweeping* yang dilakukan oleh kekuatan Chad. Milisi-milisi yang didukung oleh gerakan pemberontak Chad, dengan menggunakan senjata memerangi lawan mereka, terutama etnis Fur, serta beberapa ratus orang sipil yang dibunuh dalam perang sipil yang terjadi sepanjang tahun 1990. Pemerintah merasa lega ketika akhirnya Deby mampu mengalahkan Habre pada Desember 1990. Pemerintahan baru yang berpusat di N'Djamena memberikan sinyal terhadap keinginannya untuk menjalin hubungan baik dengan Sudan. Sinyal-sinyal positif tersebut antara lain ditunjukkan dengan menutup kantor SPLM (*Sudan People's Liberation Movement*). Pada awal tahun 1991, Omar al-Bashir mengunjungi Chad dalam rangka mengadakan pembicaraan resmi kenegaraan guna merilis hubungan bilateral.<sup>96</sup>

Konflik Darfur membawa implikasi yang cukup besar bagi negara yang berbatasan dengan Sudan di sebelah Barat, dan secara langsung berbatasan dengan

<sup>95</sup> *Sudan-Chad*, [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0129\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0129)), diakses 7 September 2005

<sup>96</sup> *Op.Cit.*,

Darfur, yakni Chad. Konflik yang terjadi antara dua gerakan pemberontakan, SPLA dan JEM ini telah berhasil menciptakan krisis kemanusiaan yang menyebar hingga ke wilayah negara Chad. Terdapat fakta di lapangan bahwa solidaritas etnis lintas batas wilayah negara ternyata merupakan kekuatan yang lebih *powerful* dibanding nasionalisme. Sejak bulan Juli 2003, lebih dari 110.000 pengungsi Sudan melintasi sebagian besar perbatasan yang membatasi dua negara, Sudan dan Chad sepanjang 1.350 km yang tidak dijaga oleh petugas keamanan penjaga perbatasan. Namun tentu saja Chad bukanlah “tuan rumah” yang pasif begitu saja menyikapi fenomena membanjirnya pengungsi akibat pecahnya salah satu konflik terbaru di kawasan Afrika tersebut. Bersamaan dengan perannya sebagai mediator<sup>97</sup> antara pemerintah Sudan dan para pemberontak, pemerintah Chad juga telah memberikan *supply* bagi pasukan pemerintah Sudan yang beroperasi di Darfur. Namun pemerintah Chad secara diam-diam juga menyediakan wilayahnya sebagai sebuah arena untuk para milisi Sudan yang melakukan kegiatan membantu para pengungsi untuk melintasi perbatasan negara Sudan-Chad, dan pemerintah Chad juga menyediakan wilayahnya sebagai arena pertemuan antara para pemberontak dan keluarganya. Kelompok-kelompok etnis yang berbeda-beda yang eksis di Chad juga memberikan *supply* kepada kedua

<sup>97</sup> Chad sendiri ternyata tidak bisa menjembatani atau menjadi mediator konflik Darfur. Hal tersebut terjadi karena pengaruh perang, dimana suku-suku yang berasal dari Chad berperang di Sudan dan hal itu berpengaruh secara politis sehingga Chad tidak bisa mengambil tindakan secara independent  
*Sudan: The Escalating Crisis In Darfur,*  
[http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=38666&SelectRegion=East\\_Africa&SelectCountry=SUDAN](http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=38666&SelectRegion=East_Africa&SelectCountry=SUDAN), diakses 8 Juli 2005

pemberontak, SPLA dan JEM, layaknya para milisi yang bersekutu dengan pemerintah Sudan<sup>98</sup>.

Relasi kedua negara yang suram dan sering menimbulkan konflik ini tidak hanya mengancam stabilitas negara Chad (sebelumnya Chad merupakan negara yang relatif damai) namun juga bisa mengarahkan kedua negara pada konflik regional. Dan konflik regional ini terindikasi bernuansa etnis. Salah seorang pengamat dari PBB menyatakan bahwa konflik Darfur yang sedang berlangsung ini mampu menjelma menjadi ekspansi sentiment etnis dan akhirnya menjadi perang etnis (*tribal war*) antara kedua negara<sup>99</sup>.

Eritrea merupakan negara boneka AS serta menjadi perpanjangan kepentingan AS di Afrika. Negara Eritrea muncul dari hasil pemisahan diri dari Etiopia. Pada saat upaya pemisahan diri tersebut, AS memberikan dukungan yang besar terhadap para pemberontak Eritrea. Dan ketika negara Eritrea baru terbentuk serta butuh *recognition*, maka secara otomatis AS memberikan pengakuan. Adapun tindakan-tindakan Eritrea yang mencerminkan kepentingannya di Sudan antara lain<sup>100</sup>:

1. Eritrea secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap gerakan pemberontakan serta oposisi yang ada di Sudan, memutuskan hubungan diplomatic dengan pemerintah Sudan pada Desember 1994, memberikan bekas kedutaan besar Sudan bagi gerakan oposisi NDA pada Juni 1995, serta menawarkan pelatihan militer kepada SAF (*Sudan Alliance Forces*) di Eritrea barat tahun 1995.

<sup>98</sup> *Special Report II: Chad And the Darfur Conflict*  
[http://www.darfurinformation.com/p\\_chad\\_special.shtml](http://www.darfurinformation.com/p_chad_special.shtml), diakses 8 Juli 2005

<sup>99</sup> *Op.Cit.*,

<sup>100</sup> *Op.Cit.*,

2. Eritrea juga mengizinkan SAF menggunakan wilayah negaranya sebagai tempat pelatihan militer serta memberi dukungan terhadap aktivitas tersebut. Unit-unit militer Eritrea disebar ke beberapa kilometer di belakang unit-unit militer SAF yang berada di Tessenei, sebuah wilayah yang merupakan wilayah perbatasan sebelah Barat Eritrea-Sudan.
3. Kekuatan militer Eritrea pertama kali menyerang posisi pemerintah Sudan di wilayah Awad pada Februari 1996, dekat dengan perbatasan Eritrea-Sudan. Eritrea juga menjadi tuan rumah konferensi dua kelompok oposisi pada Juni 1995 sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Sudan.
4. *Beja Congress*, yang merupakan sebuah gerakan sosial yang mempunyai basis sosial diantara orang-orang yang tinggal di sepanjang perbatasan Eritrea-Sudan mendapatkan bantuan serta dukungan dari Eritrea. Dengan semua dukungan dari Eritrea tersebut, *Beja Congress* mampu mengoperasikan kekuatan militer di wilayah timur laut Sudan.
5. Dilancarkannya oposisi bersenjata di utara Sudan, yang awalnya berpusat di Eritrea kemudian pusat gerakan dipindah ke Etiopia yang beraliansi dengan oposisi di selatan Sudan, bergerak dengan mendapatkan bantuan logistic serta dukungan politik melalui Etiopia dan Uganda serta mengembangkan gerakan hingga ke wilayah timur laut Sudan berkat bantuan Eritrea. Kesemuanya itu merupakan ancaman bagi pemerintah Sudan.
6. Eritrea menanam ranjau darat di wilayah timur laut Sudan pada bulan Juli, Agustus, September serta Oktober 1996. Kemudian pada awal tahun 1997, Eritrea juga melancarkan serangan ke wilayah timur laut Sudan. Serangan Eritrea ini



merupakan wujud dukungan Eritrea terhadap gerakan pemberontak SAF yang beroperasi di timur laut Sudan. Tindakan Eritrea ini bertujuan guna melemahkan kekuatan pemerintah Sudan.

7. Pada Mei 1998 SPLM/SPLA mengakui bahwa personel militer Eritrea terlibat dalam kampanye yang diadakan SPLM/SPLA di selatan Sudan pada Maret 1997. Ini membuktikan bahwa Eritrea memiliki kepentingan strategis untuk menggerogoti kedaulatan pemerintah Sudan.

### 2.3. Perang Dingin AS-Uni Soviet

Sejak merdeka tahun 1956 kelompok-kelompok yang ada di Utara saling bersaing untuk mengendalikan negara dan mendominasi Selatan. Pemberian bantuan senjata dari AS dan Uni Soviet secara besar-besaran memperbesar perpecahan etnis dan politik. Kekuatan pemberontak di Selatan dipersenjatai (melalui Etiopia) oleh Israel tahun 1960-an dan Uni Soviet tahun 1970-an dan 1980-an. Kekuatan pemberontak ini kemudian dibenturkan dengan pemerintah Utara yang diberi bantuan persenjataan secara berturut-turut oleh Uni Soviet pada tahun 1960-an dan AS pada tahun 1970-an & 1980-an. Pada saat Numeiri memperoleh kekuasaan tahun 1969, dukungan yang pertama kali datang dari Uni Soviet dan kemudian AS turut memberikan dukungan.<sup>101</sup>

Sudan dan AS menjalin hubungan yang dekat selama akhir 1970-an dan awal 1980-an. Wakil Presiden George Bush pernah mengadakan sebuah kunjungan resmi ke Khartoum hanya satu bulan sebelum Numeiri digulingkan

<sup>101</sup> Sudan, [http://www.fpif.org/briefs/vol2/v2n41s\\_body.html](http://www.fpif.org/briefs/vol2/v2n41s_body.html), diakses 12 Desember 2005

pada April 1985 dan selama Numeiri berkuasa, dia sering meminta bantuan AS ketika terjadi puncak demonstrasi massa yang hendak menggulingkan dirinya. Pemerintahan militer transisional maupun pemerintahan parlementer memandang dukungan AS terhadap Numeiri dengan rasa curiga, dan diputuskan untuk mengakhiri aliansi *de facto* yang berkembang setelah tahun 1979. Karena aliansi ini memakai simbol Operasi Bintang Besar, dan sudah banyak latihan militer yang diadakan setiap 2 tahun sekali yang berlangsung dalam teritori Sudan, maka salah satu kebijakan yang pertama kali dikeluarkan adalah mengakhiri partisipasi Sudan dalam Operasi Bintang Besar. Walaupun demikian, hubungan antara Sudan dan AS saat Sadiq al-Mahdi menjadi Perdana Menteri tetaplah penting mengingat AS melanjutkan perannya sebagai negara pemberi bantuan yang signifikan bagi Sudan<sup>102</sup>

AS memberikan bantuan dana senilai US\$ 1 miliar kepada pemerintah Sudan yang baru terpilih dalam bentuk persenjataan pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an, biasanya dengan dalih membendung pengaruh Uni Soviet, setelah memberikan ratusan juta US\$ dalam bentuk persenjataan kepada Etiopia dari tahun 1952 sampai 1977. Pemberian bantuan persenjataan dengan skala besar yang dilakukan oleh AS kepada pemerintah Sudan pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an memperbesar perpecahan regional, etnis serta politik. Dengan terjadinya disintegrasi di Sudan, maka AS dapat lebih leluasa meng-*goal*-kan kepentingan

<sup>102</sup> *Sudan-United States*, [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0132\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0132)), diakses 7 September 2005

strategisnya untuk menjadikan Sudan sebagai *pivotal state* untuk membendung pengaruh Uni Soviet di kawasan Afrika.<sup>103</sup>

Pada masa Perang Dingin, Uganda menerima banyak bantuan persenjataan dari AS, Israel, Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, serta Korea Utara. Pada tahun 1997, kembali AS memberikan bantuan persenjataan serta pelatihan militer kepada Uganda sebagai balas budi atas partisipasi Uganda dalam *African Rapid Deployment Force*. Dengan alasan membantu Uganda dalam menghadapi kelompok oposisi bersenjata yang berpusat di Sudan, AS juga memberi bantuan berupa peralatan militer “yang tidak mematikan” kepada Uganda<sup>104</sup>.

Uganda memberikan perlindungan serta tempat persembunyian kepada para pemimpin SPLA, menyediakan *travel documents*, membantu SPLA merancang pelatihan militer, mengizinkan SPLA merekrut anggota dari kam-kam pengungsi yang ada di Uganda, mengizinkan SPLA menggunakan wilayah Uganda sebagai tempat untuk transit senjata-senjata dari Kenya dan Tanzania, serta menyediakan 2 wilayah di Uganda, yakni Nakangosola dan Luero sebagai pusat pembuatan ranjau.<sup>105</sup>

Pada era Perang Dingin tahun 1980-an Etiopia yang saat itu berada di bawah pemerintahan Kolonel Mengistu Haile Mariam menjadi negara *frontline-*

<sup>103</sup> *The US Role*, <http://www.hrw.org/reports98/sudan/Sudarm988-07.htm#TopOfPage>, diakses 10 Januari 2006.

<sup>104</sup> *The US Role, Op.Cit.*,

<sup>105</sup> *The Frontline States, Op. Cit.*,

nya Uni Soviet yang memiliki hubungan dekat dengan SPLA (menjadi pelindung SPLA).<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> *Op.Cit.*,

### BAB III

#### PROSPEK PENYELESAIAN PERDAMAIAN

Sebagai hasil perundingan yang dilakukan selama kurun waktu 2 tahun antara Pemerintah Sudan dan gerakan pemberontak SPLA/SPLM dan JEM, maka Pemerintah Sudan menyusun sebuah *draft* kesepakatan damai yang dinamakan *Darfur Peace Agreement* (DPA). Kesepakatan damai tersebut berisi tawaran kepada gerakan pemberontak sebuah posisi, yakni Pembantu Senior Presiden dalam *Government of Natinal Unity* (GONU). Jabatan tersebut merupakan jabatan tertinggi keempat dalam pemerintahan dan akan memperoleh kekuasaan yang besar dan pengaruh politik. SPLA/SPLM dan JEM akan mencalonkan tiga orang untuk memperebutkan jabatan Pembantu Senior Presiden. Seorang Penasehat Presiden dari Darfur juga akan diangkat oleh Pembantu Senior Presiden.<sup>107</sup>

Menurut *draft* GPA, sebuah *Transitional Darfur Regional Authority* (TDRA) akan dirancang sebagai implementasi DPA, bertugas melakukan pengawasan terhadap rekonstruksi dan perkembangan ekonomi, serta membantu mengembalikan dan menyelesaikan masalah pengungsi. TDRA rencananya terdiri dari Pembantu Senior Presiden, Gubernur Darfur di 3 wilayah, Kepala Rehabilitasi Darfur dan Komisi Transmigrasi, Anggaran Rekonstruksi dan

---

<sup>107</sup> *Darfur Peace Agreement: A Just Peace Or Peace At All Costs?*  
[http://www.sudantribune.com/article\\_impr.php?id\\_article=15343](http://www.sudantribune.com/article_impr.php?id_article=15343), diakses 13 mei 2006

Pengembangan Darfur, Komisi Tanah Darfur, Komisi Keamanan Darfur, serta Lembaga Perdamaian dan Rekonsiliasi Darfur. SPLA/SPLM dan JEM akan diberi porsi dalam TDRA. Selain itu, kandidat SPLA/SPLM dan JEM akan mendapat jabatan sebagai gubernur di salah satu dari tiga wilayah di Darfur, ditambah dengan dua jabatan di kementerian serta satu jabatan sebagai penasihat gubernur di tiap wilayah di Darfur. Pembantu Senior Presiden-lah yang akan diangkat menjadi Kepala TDRA. Gerakan pemberontak Darfur juga akan memperoleh 3 jabatan struktural dalam pemerintahan federal, satu jabatan sebagai menteri di negara bagian Khartoum, ditambah 4 jabatan menteri yang baru saja dipegang oleh orang-orang Darfur dalam pemerintahan persatuan nasional. Gerakan pemberontak juga akan mendapat 12 kursi di Badan Legislatif Nasional.<sup>108</sup>

Dalam hal pembagian kekayaan, bagian untuk Darfur akan diurus oleh sebuah lembaga baru bernama Komisi Alokasi Fiskal dan Finansial yang akan dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan ini. Komisi ini akan menjadi sebuah lembaga independen yang akan membuat rekomendasi mengenai formula yang digunakan untuk alokasi dana bagi Presiden dan Badan Legislatif Nasional. Dewan Juri yang terdiri dari para ahli membantu kerja FFAMC. Keanggotaan dewan juri tersebut akan diangkat oleh FFAMC dan disetujui oleh Badan Legislatif Nasional. Darfur akan diurus dengan baik. Mekanismenya telah

---

<sup>108</sup> *Op.Cit.*,

didesain oleh FFAMC guna melindungi independensinya melawan intervensi pemerintah.<sup>109</sup>

Dalam rangka mempercepat proses rekonstruksi wilayah akibat perang, Darfur akan menerima pembayaran sebesar US\$ 300 juta dari Anggaran Nasional 2006, serta dua pembayaran secara berturut-turut US\$ 200 juta pada 2007 dan 2008. Ini merupakan tambahan alokasi dari Anggaran Nasional yang akan ditetapkan oleh FFAMC.<sup>110</sup>

Akan diadakan referendum pada Juli 2010, yang pada akhirnya orang-orang Darfur akan memutuskan antara amalgamasi tiga wilayah dalam satu unit administratif bernama Wilayah Darfur, atau tetap menguasai status quo tiga Negara bagian berpemerintahan sendiri tanpa adanya status Wilayah. Juga akan dibentuk komisi perbatasan untuk menentukan kembali batas Utara-Selatan Darfur seperti pertama kali pada Januari 1956.<sup>111</sup>

Para milisi SPLA/SPLM dan JEM The SLM/A and JEM akan dilucuti dan didemobilisasi. Mereka akan dileburkan ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan. Kesepakatan damai meminta representasi yang adil bagi orang-orang Darfur di semua level Angkatan Bersenjata Sudan serta badan keamanan. Para milisi yang dileburkan dalam Angkatan Bersenjata Sudan tidak akan dipindahkan jauh dari Darfur pada 5 tahun mendatang dan akan dilindungi dari segala macam rencana baru dalam tubuh Angkatan Bersenjata Sudan. Pemerintah Sudan juga diharuskan untuk menarik pasukannya dari Darfur dan wilayah perbatasan dengan Chad.

<sup>109</sup> *Op.Cit.*,

<sup>110</sup> *Op.Cit.*,

<sup>111</sup> *Op.Cit.*,

Semua prosesnya akan dimonitori dan diawasi dengan ketat oleh Komisi Keamanan yang berada di bawah Misi Uni Afrika.<sup>112</sup>

Sejak April 2004, Pemerintah Sudan bernegosiasi dengan SPLA/SPLM dan JEM guna membawa angin perdamaian di Darfur. Pada Maret 2006 mediator PBB dan Uni Afrika memberikan *deadline* kepada pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kata sepakat pada 30 April 2006. Pada 25 April 2006, Ketua Mediator Uni Afrika, Salim Ahmed Salim memberikan *draft* kesepakatan damai kepada seluruh pihak dan mereka diberi tenggat waktu 48 jam untuk menanggapi *draft* dari Uni Afrika tersebut.<sup>113</sup>

SPLA/SPLM dan JEM meminta posisi wakil presiden (yang sekarang dijabat oleh Ali Osman Toha), gubernur Negara bagian Darfur, 8 menteri di cabinet, dan sebuah wilayah dalam Negara bagian Darfur. Sebagai tambahan, SPLA/SPLM dan JEM meminta kompensasi bagi tiap orang yang menderita akibat perang.<sup>114</sup>

Dalam hal ini, NCP yang mendominasi pemerintah Sudan siap membuat konsesi tanpa berkompromi dengan mayoritas 52% anggota yang ada di Badan Nasional, dan Wakil Presiden selanjutnya, dengan argument bahwa pembagian Darfur menjadi 3 wilayah akan memberi kekuasaan bagi warga Darfur.<sup>115</sup>

Pada 30 April 2006, Pemerintah Sudan mengumumkan akan menandatangani perjanjian damai guna mengakhiri perang saudara di Darfur. Seorang delegasi pemerintah dalam pembicaraan di ibukota Nigeria, Abuja

---

<sup>112</sup> *Op.Cit.*,

<sup>113</sup> *Op.Cit.*,

<sup>114</sup> *Op.Cit.*,

<sup>115</sup> *Op.Cit.*,



mengatakan semua hambatan telah diselesaikan dengan kelompok kelompok pemberontak. Para komandan pemberontak dilaporkan tidak mau melucuti senjata sebelum pembentukan angkatan bersenjata bersatu Sudan.<sup>116</sup>

Sebelumnya terdapat sebuah rancangan kesepakatan damai yang diedarkan pada 26 April 2006 yang meminta pemerintah menunjuk seorang penasihat yang paham masalah Darfur. Rancangan ini juga mencakup usulan Uni Afrika agar Sudan menggelar pemilu pada 2010 untuk menciptakan pemerintahan Sudan bersatu. Uni Afrika juga mendesak pemerintah agar melucuti milisi Arab Janjaweed dan meleburnya ke dalam tubuh tentara nasional dan badan keamanan negara lainnya. Selama ini Janjaweed dituding berada di balik aksi kekerasan di Darfur. Namun pihak pemberontak, SPLA/SPLM dan JEM, menunjukkan keengganan mereka. Keduanya kemudian menandatangani kesepakatan bersama untuk tidak menandatangani kesepakatan damai tersebut. Mereka tidak terlalu gembira dengan kesepakatan damai itu sebab dianggap tidak langsung menyentuh permasalahan.<sup>117</sup>

Kemudian pada 5 Mei 2006, Gerakan pemberontak terbesar di Darfur, SPLA/SPLM menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Sudan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung tiga tahun. Namun, dua kelompok yang lebih kecil mengatakan tidak puas dengan ketentuan perjanjian yang

<sup>116</sup> *Rebel Factions Spurn Darfur Deal*, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4957242.stm>, diakses 13 Mei 2006

<sup>117</sup> *Op.Cit.*,

ditawarkan. Pemerintah Sudan sendiri telah setuju untuk menandatangani naskah perdamaian.<sup>118</sup>

Tim perunding internasional mengatakan, kesepakatan itu merupakan peluang terbaik bagi perdamaian di Darfur. Namun, gerakan pemberontak terkecil, *Justice and Equality Movement* (JEM), meninggalkan meja perundingan dan menyatakan menghendaki perubahan mendasar pada naskah perjanjian. Kepala juru runding faksi itu, Ahmed Tugod, kembali menuntut diberi jabatan wakil presiden di pemerintah pusat dan Darfur memperoleh porsi pembagian kekayaan nasional yang lebih besar.<sup>119</sup> Dengan banyaknya tarik ulur kepentingan antara pemerintah Sudan dan gerakan-gerakan pemberontak, maka kesepakatan damai pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Darfur kemungkinan besar akan sulit dicapai.

---

<sup>118</sup> *Main Parties Sign Darfur Accord*, <http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/world/africa/4978668.stm>, diakses 13 Mei 2006

<sup>119</sup> *Op.Cit.*,

## BAB IV

### KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan dalam Bab II dan Bab III peneliti menyimpulkan bahwa beberapa hipotesis terbukti dan ada satu hipotesis yang tidak terbukti serta peneliti juga menemukan fakta-fakta baru di luar pembuktian hipotesis.

Beberapa hipotesis yang terbukti adalah sebagai berikut :

Sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan, Sudan mendapatkan banyak masalah internal. Seringnya pergantian pemerintahan menandakan bahwa Sudan memiliki legitimasi yang lemah. Legitimasi yang lemah ini mengakibatkan tidak efektifnya kontrol terhadap wilayah perbatasan, disfungsi berbagai institusi politik dan pemerintahan, serta mendorong destabilisasi sistem politik secara keseluruhan.

Kemudian ditambah lagi dengan kegagalan Pemerintahan Lokal (*Native Administration/idara ahlia*) juga makin menambah tidak stabilnya situasi dan kondisi politik Sudan. Situasi dan kondisi politik Sudan yang labil ini rentan terhadap keterlibatan pihak eksternal untuk melakukan manuver intervensi di Sudan, seperti yang pernah ditunjukkan oleh Lybia dan Chad. Pemimpin terkemuka Lybia, Muammar Qadhafi yang memiliki visi mengenai Pan-Arabisme bertentangan dengan pemimpin Sudan saat itu, Ja'far Numeiri. Kemudian Lybia memberikan pelatihan militer kepada oposisi anti Numeiri serta memberikan

dukungan finansial kepada SPLM/SPLA. Hal ini tentu saja menambah persoalan ke dalam negeri Sudan.

Ketidakmampuan pemerintah Sudan dalam mengontrol teritori negaranya secara politis dimanfaatkan oleh Chad yang saat itu sedang mengalami perang etnis untuk merekrut anggota dari Darfur, yang berbatasan langsung dengan Sudan di sebelah barat. Daerah perbatasan kedua negara tersebut banyak dihuni oleh etnis Zaghawa sehingga Idriss Deby, pemimpin oposisi Chad memanfaatkan sentimen etnis untuk merekrut anggota. Hal ini berarti pemberontak Chad bebas keluar masuk ke Sudan lewat daerah perbatasan kedua negara. Terlebih lagi ketika pada Mei 1990 tentara Chad menginvasi ibukota propinsi Al-Fashir dalam rangka melakukan *sweeping* terhadap kekuatan pemberontak Chad yang saat itu melarikan diri ke Al-Fashir, Sudan. Kemudian gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Idriss Deby memberikan persenjataan bagi orang-orang Sudan yang beretnis Zaghawa dan milisi-milisi Arab. Tindakan pemberontak Chad yang dimotori oleh Idriss Deby ini hanyalah tindakan pura-pura, agar mereka bisa melindungi gerakan mereka dari *sweeping* yang dilakukan oleh kekuatan Chad.

Kemudian pemberian bantuan senjata dari AS dan Uni Soviet secara besar-besaran kepada pemerintah Sudan maupun gerakan pemberontakan di selatan pada saat Perang Dingin juga memperbesar perpecahan etnis dan politik. Setelah memberi bantuan senjata kepada kedua belah pihak, Utara dan Selatan, dua negara yang saat itu sedang melakukan perebutan pengaruh kemudian membenturkan dua kekuatan tersebut. Dukungan politik pun turut diberikan oleh AS dan Uni Soviet. Pada saat Numeiri memperoleh kekuasaan tahun 1969,

dukungan yang pertama kali datang dari Uni Soviet dan kemudian AS turut memberikan dukungan.

Sebagian besar negara-negara yang paling melarat termasuk Sudan selama bertahun-tahun berada di bawah pengaruh program “penyesuaian struktural” yang dicanangkan oleh Washington. Kebijakan itu sungguh-sungguh telah membawa malapetaka bagi negara-negara tersebut. Kini, perekonomian mereka menjadi jauh lebih buruk ketimbang tiga puluh atau empat puluh tahun lalu. Kebijakan *Structural Adjustment Program* (SAP) yang disertakan dalam pinjaman IMF/Bank Dunia boleh jadi membantu negara-negara dalam membayar hutang mereka terdahulu, dan boleh jadi juga menciptakan sejumlah jutawan. Namun, mayoritas penduduklah yang jadi tumbalnya : upah yang rendah, berkurangnya pelayanan sosial, dan minimnya akses demokratis pada proses pembuatan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aga, Sekamdo M, *Membumikan Ikhwanul Muslimin-Studi Analisis Atas Proses Internasionalisasi Gerakan Ikhwan*, Solo : Era Intermedia, 2004.
- Baylis, John & Steve Smith. *The Globalization of World Politics*, New York : Oxford University Press, 1997.
- Brown, Michael E (ed), *The International Dimentions of Internal* Cambridge, MA and London : The Mit press, 1996.
- dan Summit Ganguly (ed), *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and The Pasific*, Cambridge, MA and London : CSIA, 1997.
- Esposito, John L & John Voll *Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, Penerjemah : Sugeng Hariyanto, Umi Rohimah, Sukono, Murai Kencana, Jakarta : 2002.
- FEWER Conflict and Peace Analysis and Response Manual*, the second edition, London : FEWER Secretariat, 1999.
- Griffiths, Martin and Terry O'Callaghan *International Relations : The Key Concepts*, Martin Griffiths and Terry O'Callaghan, London : Routledge, 2002.
- Harff, Barbara & Ted Robert Gurr, *Ethnic Conflict in World Politics*, Colorado : Westview Press, A Member of the Perseus Books Group, 2004.
- Kriesberg, Louis. *Constructive Conflicts:From Escalation To Resolution*, Lanham : Rowan & Littlefield Publishers, Inc, 1998.
- Mas'oed, Mochtar. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Yogyakarta : Pusat Antar Universitas-Studi Social Universitas Gajah Mada, 1989.
- . *Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi*, Jakarta : LP3ES, 1990.

Miall, Hugh dan Oliver Ramsbotham (Eds.), *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Agama, dan Ras*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Mitchell, C. R. *The Structure of International Conflict*, London : The MacMillan Press Ltd, 1981.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Rahmena, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Mizan : Bandung : 1995.  
Danaher, Kevin, *10 Alasan Membubarkan IMF dan Bank Dunia*, Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

Sisk, Timothy D., *Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts*, Washington D.C. : United States Nations Institute of Peace, 1996.

Viotti Paul R & Mark V. Kauppi, *International Relations Theory-Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, the third edition*, Massachusetts : Allyn & Bacon, 1999.

## JURNAL

*Islamika-Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, Nomor 6 Tahun 1995, Ihsan Ali Fauzi, "Belajar Dari Sudan".

\_\_\_\_\_, Nomor 6 Tahun 1995. Satrio Arismunandar, "Islamisasi Sudan dan Dimensi Internasionalnya".

\_\_\_\_\_, Nomor 6 Tahun 1995, A.Z. Al-Abidin, "Kesatuan dalam Keragaman".

*Jurnal Foreign Affairs*, January-February 2005, Volume 84, Number 1.  
Stuart E. Eizenstat, John Edward Porter, dan Jeremy M. Weinstein, "Rebuilding Weak States".

*Jurnal Foreign Affairs*, January-February 2005, Volume 84, Number 1.  
Stuart E. Eizenstat, John Edward Porter, dan Jeremy M. Weinstein, "Rebuilding Weak States".

## LAPORAN PENELITIAN

“Konflik Antara Suku Hutu dan Suku Tutsi di Rwanda 1990-1995”, disampaikan Endra Gunawan, mahasiswa FISIP-Universitas Airlangga Surabaya sebagai syarat kelulusan tahun 2000.

“Perubahan Kebijakan Luar Negeri RI Dalam Penyelesaian Status Timor-Timur – Studi Perbandingan Terhadap Kebijakan Luar Negeri RI Masa Pemerintahan Soeharto dan B.J. Habibie”, disampaikan Catur Prayitno, mahasiswa FISIP Universitas Airlangga Surabaya sebagai syarat kelulusan tahun 2001.

## INTERNET

*Sudan Hadapi Tantangan Besar dalam Membangun Nasionalisme*,  
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/19/utama/1217161.htm>, diakses tanggal 5 Januari 2005.

*How Did Darfur Happen?*,  
[http://www.sudantribune.com/article.php?id\\_article=6003](http://www.sudantribune.com/article.php?id_article=6003) diakses tanggal 26 Juni 2005

*Darfur-The Logic Behind The Conflict*.  
<http://www.mumbai.risq.org/article362.html>, diakses tanggal 3 Juli 2005.

*The Dilemmas of Darfur-The Politics of Disintegration, Oil, and Foreign Intervention*,  
[http://www.islamonline.net/English/In\\_Depth/Darfur/articles/10/article01.shtml](http://www.islamonline.net/English/In_Depth/Darfur/articles/10/article01.shtml), diakses tanggal 3 Juli 2005.

*British Envoy Optimistic About Peace in Sudan*,  
<http://splmtoday.com/modules.php?name=News&file=article&sid=282>, diakses tanggal 8 April 2005

*The U.S. Effort: Keep The Issue Of Humanitarian Intervention From Arising*  
[http://www.sudantribune.com/article.php?id\\_article=8801](http://www.sudantribune.com/article.php?id_article=8801), diakses tanggal 9 Juli 2005.

*British Lawmakers Urge Europe, U.S. To Do More For Darfur Victims*,  
[http://www.darfurinformation.com/ic\\_brit\\_law\\_urge.shtml](http://www.darfurinformation.com/ic_brit_law_urge.shtml), 6 Juli 2005

Robert O. Keohane, "Lilliputians' Dilemmas: Small States in International Politics," *International*



Organization, (Spring 1969), <http://www.ceu.hu/cps/bluebird/pap/aligica3.pdf>, diakses tanggal 5 Agustus 2005.

*The History And Origins Of The Current Conflict In Darfur*,  
[www.sarpn.org.za/documents/d0001277/  
PNADC475\\_Darfur\\_Febr2005\\_Chap2.pdf](http://www.sarpn.org.za/documents/d0001277/PNADC475_Darfur_Febr2005_Chap2.pdf), diakses 12 Juli 2005.

*Conflict in Darfur- A Different Perspective*, [www.htspe.com/pdfs/ConfDar.pdf](http://www.htspe.com/pdfs/ConfDar.pdf), diakses tanggal 22 Agustus 2005

*Causes and Solutions for Darfur*,  
[http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20040815/news\\_lz1e15darfur.html](http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20040815/news_lz1e15darfur.html), diakses 19 November 2005

*The Darfur Tragedy*, [http://72.14.207.104/search?q=cache:nguE-  
VDIM8J:www.mideasti.org/articles/doc269.pdf+darfur%2Bnative+administration%2  
BSudan+History&hl=id](http://72.14.207.104/search?q=cache:nguE-VDIM8J:www.mideasti.org/articles/doc269.pdf+darfur%2Bnative+administration%2BSudan+History&hl=id), diakses 19 November 2005

*Sudan-Libya*,  
[http://lweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0128\)](http://lweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0128)), diakses 7 September 2005

*Sudan-Chad*,  
[http://lweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0129\)](http://lweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0129)), diakses 7 September 2005

*Sudan: The Escalating Crisis In Darfur*,  
[http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=38666&SelectRegion=East\\_Africa&Sel  
ectCountry=SUDAN](http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=38666&SelectRegion=East_Africa&SelectCountry=SUDAN), diakses 8 Juli 2005

*Special Report II: Chad And the Darfur Conflict*  
[http://www.darfurinformation.com/p\\_chad\\_special.shtml](http://www.darfurinformation.com/p_chad_special.shtml), diakses 8 Juli 2005

*Sudan*, [http://www.fpif.org/briefs/vol2/v2n41s\\_body.html](http://www.fpif.org/briefs/vol2/v2n41s_body.html), diakses 12 Desember 2005.

*Sudan-United States*, [http://lweb2.loc.gov/cgi-  
bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0132\)](http://lweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0132)), diakses 7 September 2005.

*The Profile of Sudan*, <http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/bgnotes/af/sudan9506.html>, diakses 7 september 2005.

*The 'Sudan Peace Act': Perpetuating Africa's Longest War*  
[www.sudan.net/news/press/postedr/33.shtml](http://www.sudan.net/news/press/postedr/33.shtml), diakses 2 Januari 2006.

*Self-Determination Conflict Profile-*

*Sudan*, [http://www.fpif.org/selfdetermination/conflicts/sudan\\_body.html](http://www.fpif.org/selfdetermination/conflicts/sudan_body.html), diakses 20 September 2005.

*Oil and The Crisis in Sudan*

[http://groups.google.co.id/group/misc.activism.progressive/browse\\_frm/thread/bd5ba6e391570bc/05f9d1ad89b06d83?ivc=1&q=background+to+the+sudan+eritrea+conflict&hl=id#05f9d1ad89b06d83](http://groups.google.co.id/group/misc.activism.progressive/browse_frm/thread/bd5ba6e391570bc/05f9d1ad89b06d83?ivc=1&q=background+to+the+sudan+eritrea+conflict&hl=id#05f9d1ad89b06d83), diakses 25 Desember 2005

*SPLA/SPLM,*

<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/images/ssudan2.gif>, diakses 12 Desember 2005.

*The Sudan—Contested National Identities*, <http://iupress.indiana.edu/textnet/0-253-33432-2/0253108713.htm>, diakses 10 Juli 2005.

*Sudan-The Civil War*, <http://www.hrw.org/reports98/sudan/Sudarm988-03.htm#TopOfPage>, 10 Januari 2006.

*Is Blasting Eritrea Hotels a New Offensive Against Sudan Peace Talks?*

[http://www.sudantribune.com/article Impr.php?id\\_article=2027](http://www.sudantribune.com/article Impr.php?id_article=2027), diakses 6 Januari 2006.

*The SPLM/SPLA Evolution and Struggle for the New Sudan,*

<http://splmtoday.com/modules.php?name=Splm&page=cvlwar&sect=3>, diakses 8 April 2005

*Foreign Policy In Focus-Self Determination Conflict Profile Sudan*

<http://www.fpif.org/selfdetermination/index.html>, diakses 5 Agustus 2005.

*Sudan-Global Trade*, <http://www.hrw.org/reports98/sudan/Sudarm988-02.htm#TopOfPage>, 10 Januari 2006.

*Military Support For Sudanese Opposition Forces,*

<http://www.hrw.org/reports98/sudan/Sudarm988-07.htm#TopOfPage>, 10 Januari 2006.

*Sudan-The Economy*, [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0071\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0071)),

diakses 7 September 2005.

*Sudan-Economic Development*, [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0072\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0072)),

diakses 7 september 2005.

<http://www.answers.com/topic/year>, 2 Januari 2006.

*Economy of Sudan*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Economy\\_of\\_Sudan](http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Sudan), diakses 4 Desember 2005.

*Sudan-Foreign Aid*, [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0073\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0073)), diakses 7 September 2005.

*Sudan-Prices, Employment, Wages, and Unions*, [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+sd0074\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sd0074)), diakses 7 September 2005.



**LAMPIRAN I**

***SUDAN CHARTER***

## **SUDAN CHARTER: NATIONAL UNITY AND DIVERSITY**

**Issued by National Islamic Front, January 1987**

### **First: religious affiliation and the nation**

#### ***1. The People***

##### **A) Sudanese are one nation:**

- United by common religious and human values, and by the bonds of coexistence, solidarity and patriotism,
- And diversified by the multiplicity of their religious and cultural affiliations.

##### **B) The Bulk of Sudanese are Religious:**

The following principles shall therefore be observed in consideration for their dignity and unity:

1. Respect for religious belief, and for the right to express one's religiousness in all aspects of life. There shall be no suppression of religion as such, and no exclusion thereof from any dimension of life.
2. Freedom of choice of religious creed and practice, and sanctity of religious function and institutions. There shall be no coercion in religious affiliation, and no prohibition of any form of religious practice.
3. Benevolence, justice, equality and peace among different religious affiliates. They shall not prejudice or hurt any another by word or deed. There shall be no hostility in religion - none shall excite antagonism, impose domination, or commit aggression among religious individuals or communities.

**C) The Muslims are the majority among the population of the Sudan:**

The Muslims are unitarian in their religious approach to life. As matter of faith, they do not espouse secularism. Neither do they accept it politically. They see it as a doctrine that is neither neutral nor fair, being prejudicial to them in particular: it deprives them of the full expression of their legal and other values in the area of public life, without such detriment to those non-muslim believers whose creed is exclusively relevant to private and moral life. Historically, the Muslims are not familiar with secularism, which developed from a peculiar European experience - arising from the conflict between the Christian Church and secularists in politics, economics and science. The doctrine is, therefore, of little relevance to the historical development or the legacy of the Islamic civilization.

The Muslims, therefore, have a legitimate right, by virtue of their religious choice, of their democratic weight and of natural justice, to practice the values and rules of their religion to their full range - in personal, familial, social or political affairs.

**D) In the Sudan there is a large number of those who adhere to African religions, a substantial number of Christians and a few Jews:**

These have their particular beliefs, and do not believe in Islam, and should in no way be prejudiced or restrained only for being in minority. That is their due by virtue of their own creed, in concurrence with the Islamic Sharia and the fundamental rights of all men to freedom and equality.

Non-Muslims shall, therefore, be entitled freely to express the values of their religion to the full extent of their scope - in private, family or social matters.

**2. The State**

The State is a common affair among all believers and citizens of the Sudan. It observes the following principles:

**a) In the Sphere of Freedom & Equality:**

1. Freedom of creed and cult for all is guaranteed, (in a context of the prevalence of general freedom, of the supremacy of the constitution, of the rule of law and of government that is judicially and religiously responsible).
2. The privacy of every man is also guaranteed; his intimate personal

affairs are immune against the powers of government; every one may conduct his devotional life in the manner he chooses.

3. None shall be penalized for any act or omission, if such is a recognized ceremonial or mandatory practice of his religion.
4. None shall be legally barred from any public office only because of his adherence to any religious affiliation. But religiousness in general may be taken into consideration as a factor of the candidate's integrity.
5. The freedom of religious dialogue and propagation is guaranteed; subject to any regulation that may ensure social tranquility and regard for the respective religious sentiments of others.

#### **b) In The Sphere of Law:**

The state shall establish a legal system in full consideration of the will of the Muslim majority as well as the will of the non-muslims. Wherever the entire popular mandate is harmonious, a basis of national consensus is thereby provided for all laws and policies. Where mandates diverge, an attempt shall be made to give general, if parallel, effect to both. In common matters where it is not feasible to enforce but one option or system, the majority option shall be determinative, with due respect to the minority expression.

The Sudan does not conform to the doctrine of centralism or absolute universality of law. (Its people have in fact been simultaneously governed by various legal systems, Islamic, civil or customary, applied according to person, subject matter or district). The scope of some laws can be limited as to particular persons or places - such that a general legal order is established intersected by personalized or decentralized sub-orders.

#### **Thus:**

6. Islamic jurisprudence shall be the general source of law: - It is the expression of the will of the democratic majority.
  - It conforms to the values of all scriptural religions, its legal rules almost correspond to their common legal or moral Teachings.
  - It recognizes, as source of law, the principles of national justice and all sound social customs.
  - It specifically recognizes the principles of religious freedom and equality in the manner mentioned above; and allows for partial legal multiplicity in regard to the religious affiliation of persons or to the predominance of non-muslims in any particular area, in the

manner detailed below.

7. Family law shall be personal, as rules of conduct intimately relating to a person's private religious life, where - in a variable legal system can be practically administered with reference to the specific religious affiliation of the parties in a limited, stable social unit: the family.

Thereby the privacy and the religious and cultural autonomy of the family is safeguarded.

**Thus:**

- a) Every parent is entitled to bring up his issue in the religious manner of his liking. The freedom of religious education and its institutions is ensured.
  - b) The rules relating to marriage, cohabitation, divorce, parenthood, childhood and inheritance shall be based on the religious teachings of the couple. To the Muslims shall apply the Sharia. To scriptural religious denominations shall apply their respective church laws. To the followers of local cults shall apply their special customs. Any of these or others can of course choose to be governed by Sharia.
8. The effectiveness of some laws shall be subject to territorial limitations, considering the prevalence of certain religions or cultures in the area at variance with the religion dominant in the country at large, and regarding matters where an exception can be made from the general operation of the legal system - not according to each person's or family's choice but to the dominant choice in the area. In these matters exclusive local rules can be established in the area based on the local majority mandate - any local minority remaining subject to the democratic principle.

Thus the legislative authority of any region predominantly inhabited by non-muslims can take exception to the general operation of the national law, with respect to any rule of a criminal or penal nature derived directly and solely from a text in the Sharia contrary to the local culture. The said authority can instead opt for a different rule based on the customs or religion prevailing in the area.

9. The general presumption, otherwise, is for law to be effective country-wide over all persons and regions, except for any limitation deriving from the requirement of the constitutional decentralization



system or from the very letter and purpose of a particular law.

## **Second: ethnicity and nationhood**

### ***The Sudan is one country:***

- Whose people are bound by one common allegiance to nation and land.
- But are diverse as to ethnic origin, local custom or cultural association.
- Wherein Arab origin is mixed with African origin, Arab culture with African culture, with inputs from other origins or cultures.
- Ethnic and tribal origin shall be duly respected. Customary rules of solidarity and conduct, special to a specific tribal or local precinct may be observed. But ethnicity is a natural trait not deriving from human attainment and no good as a basis for discriminating between people or citizens in socio-political or legal relations. Moreover the expression of ethnic arrogance, rancour or strife should not be allowed.
- Local subcultures (tongues, heritages, ways of life, etc....) are respected and may be freely expressed and promoted -without deviation towards the excitement of animosity between fellow country-men, or the hampering of free dialogue and interaction , between subcultures towards the development of a national human culture, and without derogation from the national education policies or from the status of the official language.
- In its foreign and domestic policy, the state shall show consideration for the import of its different cultures. It shall pay regard in its international relations to the sense of cultural attachment or geographical neighborhood of the different sub-nationalities or inhabitants of the Sudan. It shall, for example, allow for no discrimination between nationals of different origins in policies of information or housing, and shall not show bias in foreign relations towards the development of pan-Arab rather than pan-African ties.

### Third: the region and the country

#### *The Sudan is a united state:*

- Independent by virtue of its own national sovereignty,
- Whose people are mobilized in one central political allegiance,
- But diverse as to its far-flung regions inhabited by heterogeneous populations wherein prevail different needs, circumstances and standards of life.
- The nature of the Sudan generally calls for an increased national effort to reinforce the unity of the land and to strengthen the central national allegiance.
- It requires also with respect to the governance of the country due consideration from regional remoteness and socio-political disparity.
- In consideration for the identity of the different regions and the special needs, conditions and cultures of their inhabitants, and for the difficulty of administering the Sudan from one centre, there shall be established separate regions governed autonomously in certain regards and integrated into the national government otherwise.
- For the same considerations the composition of the central government Leadership shall incorporate elements from all regions. Government shall be organized in collegial and composite forms to allow for this representation. Some regional balance shall also be observed as far as possible in public service enterprises and in the different institutions of national government and administration.
- In consideration for the unity of the land, the national constitutional system shall preserve the integrity of those national powers necessary for maintaining a united sovereign country and for promoting the development and resurgence of the nation or coping with the states of national emergency.  
The general laws and policies shall also ensure the oneness of the national territory by regulating and facilitating contact, communication and intercourse as well as the free circulation of persons, goods and information across regions towards a closer interaction and a more perfect union of the entire nation.

## A) The Sharing of Power

- The regional self-government system established in the South by virtue of the Self-Government Agreement of the early seventies, and by constitutional amendment in the North since the early eighties, is based on the principle of assigning to regional authorities the right of the legislative initiative and executive autonomy with respect to certain matters, without restraining the central authority from legislating on the same matters with absolute authority that overrides regional laws.

- A federal system would transfer to the federated regions matters of an even wider scope, but, more importantly, attribute to regional measures immunity from interference by central authorities through participation or abrogation, except with regard to a matter specifically designated as concurrent.

- In view of the scope and degree of federal autonomy, federalism requires the setting up of adequate infrastructure - material and human, and presumes the provision of sufficient financial resources independently raised by or transferred to the regions. All this may not be possible except through a process or a period of preparation and gradual transition to be duly conceived.

The detailed evaluation of the respective government powers and relationships in the Sudan may lead to preference for a mixed system - comprising federal and regional elements in any equation or with respect to different matters. Besides this system of decentralization, a measure of deconcentration may be introduced. This is an administrative policy that merely broadens the scope of delegation to regional departmental branches with full central political control.

- Some of the major powers normally reserved for the centre to be administered with high centralization or with administrative deconcentration are: national defence and security, foreign relations, nationality immigration and aliens, trans-regional means of communication and transport, the judicial system and the general legal codes, the financial order and its institutions, external and inter-regional trade, the natural resources - fluvial subterranean and atmospheric, the general education and economic plans,... etc.

- Some of the matters normally assigned to the regions to enjoy thereto the initiative or the monopoly of legislation, according to the regional or federal principle respectively, are: regional security and administration, local government, culture, social affairs, tourism, education, health and social services, agriculture and

industry, regional commerce,... etc.

- Some of these matters or of any other residual powers may be concurrent, for joint action by the centre and the regions.

- Provision should be made for a sharing formula between the centre and the regions with respect to land, internal revenue resources, joint major economic projects, the organization of professions and trades, the institutions of higher education, ... etc.

- Provision should also be made for safeguards of the freedom of communications, traffic and the passage of information, persons and goods, for the immunity of lands, projects, institutions and functionaries belonging to one authority as against the interference of another authority.

- Provision should likewise be made for a defined emergency regime that permits the national authorities to transgress the normal limits and equations, of power sharing to the extent of the necessity (wars, calamities, constitutional collapse...).

- Provision should finally be made for the participation of the regions in all constitutional amendments that relate to their legal status.

- Consideration for regionalism can also be confirmed by special arrangements in the composition of central agencies response for the planning of national policies. The political traditions and the financial means of the Sudan may not make a bicameral legislature commendable as long as the national deputies are in fact representatives of regional constituencies. As to the leadership of the executive branch of government, the parliamentary system of government might be preferred, as it is based on collegiate executive power and allows for any political convention or usage governing regional representation or balance.

The balanced presence of regions may also be observed in any consultative councils or permanent committees under the auspices of the executive, or even in the civil service.

- The National Islamic Front stands for the adoption of a federal system in the constitutional regulation of decentralization in the Sudan, with equal regard to all regions, or with special arrangements for some, and through any process of gradual transition.

## **B. The Sharing of Wealth:**

- In view of the wide discrepancy in the relative economic standard of the regions, and in order to ensure a fully integrated economic development, so that no region in the land would claim exclusive rights to natural resources within its borders, the national government would not be deprived of the means necessary for the upkeep of the common weal, no region would be left too far behind in the general progress of the country and no region would be left too far behind in the general progress of the country and no region would develop without positive contributions for the development of the country at large - through contributions to central state resources, the attraction of emigrant labour and the intensification of economic exchange in the national market:

1. The state shall adopt a comprehensive plan for economic development with a view of promoting general prosperity and ensuring the balance of regional development through the encouragement, direction and dispensing of projects towards depressed sectors and areas.
2. In the transfer of national funds in support of regions, the state shall take into consideration the relative size of the population and the feasibility of utilization as well as a positive preference for less developed regions to further their growth towards parity.
3. Notice should be taken, in the composition of national economic and planning agencies for the balance representation of the different regions.
4. The persons and the institutions of the private sector should be encouraged to intensify their economic initiatives in those regions that are disadvantaged. The same should be observed in the extension of administrative, funding or taxation concessions.
5. The state shall endeavour to link all the regions of the country through roads and other means of communication and transport, so that the economic movement should freely and evenly roll on across the national territory.
6. Every region where a national project is situated, may retain a reasonable share of the opportunities and returns provided thereby, without prejudice to the due share of the state as a whole in all national opportunities and resources.

## **Peace, transition and constitution**

In the pursuit of peace and stability the substantive issues which have always been in dispute among Sudanese are better taken up first for dialogue and resolution. Only thereafter should procedures and measures necessary for implementing any national consensus be dealt with. The most important of the latter is an agreed arrangement determining the destiny of the present political institutions, of the various national political forces as to participation in public life.

The national concord and the program for its implementation shall be decided upon in a general constitutional conference whose legal resolutions shall be ultimately put before the constituent authority for adoption in the permanent constitution or in appropriate legal measures. Political resolutions shall be the subject-matter of a national charter.

A national body, agreed upon by all parties concerned, shall be charged with preparation for the conference - undertaking studies, organizing the paper work and extending invitations to participants. A government agency shall handle the necessary technical and administrative work under the supervision of the above-mentioned body.

The various political forces shall conduct preliminary consultations and dealings designed to coordinate stands and points of view, and shall promote a favorable political climate to ensure the success of the conference.

Participation in the conference is open to all national political forces, whatever the respective weight and irrespective of recognition of, a participation in the present government or political set-up or otherwise and of operation inside or outside the Sudan. (The participation of Sudan People Liberation Movement is subject to an agreed cease-fire arrangement).

Observers from African countries as well as international regional organizations and the United Nations Organization may be invited to attend the conference.

The conference shall determine all the issues of substance concerning the ordering of public life in the Sudan, especially its justice as to differences of religious association and cultural identity or as to distribution of power or wealth, and shall consider any constitutional or political matter relating thereto.

The conference shall also settle the issues of transition, including:

- The completion of the Constituent Assembly as to full regional

representation.

- The form of government during the transition.
- The administration of southern and northern regions pending the establishment of a final constitutional system.
- The plight of those citizens who were displaced, or who incurred damage, deserted the public service or left the country because of the state of fighting and insecurity.

The resolutions of the conference shall be adopted by unanimity, while recommendations may be adopted by majority.

**(THE NATIONAL ISLAMIC FRONT)**

Khartoum: JUMADA I, 1407  
JANUARY, 1987.



**LAMPIRAN II**

***NDA Conference on Fundamental  
Issues: Final Communique***



## NDA Conference on Fundamental Issues: Final Communique

*Below is the Asmara NDA's Declaration of principles. I made a few editorial additions (the words "article" and "section") for clarity. Editor*

The National Democratic Alliance (NDA) convened an extra ordinary conference in the city of Asmara, the capital of the State of Eritrea under the motto "Conference on the Fundamental Issues of the Nation", in the period between the 15th and 23rd of June, 1995. The Conference was attended by leaders and delegates representing the Democratic Unionist Party, the Umma Party, the Sudan Communist Party, Union of Sudan African Parties, Sudan Peoples' Liberation Movement and Sudan Peoples' Liberation Army, Legitimate Command of the Sudanese Armed Forces, Sudanese Alliance Forces, The Beja Congress, Sudanese Trades Unions and Independent National Personalities.

The Conference deliberated extensively on the following fundamental issues:

(Article) I. Ending of the civil war and restoration of peace in the Sudan : In order to realize this objective, the conference recognized the need to address and resolve the following issues:

Sectiona) Right of self determination,

Sectionb) Relationship between religion and politics

Sectionc) System of rule during the interim period

(Article) II. Programs and modalities for the intensification of the struggle to overthrow the NIF regime.

(Article) III. Arrangements and tasks of the interim period

(Article) IV. Foundational bases for the future Sudan

(Article) V. Humanitarian issues

(Article) VI. Structuring of the National Democratic Alliance

The NDA held its conference in full awareness of the hard and oppressive conditions currently endured by the Sudanese people as a result of the policies of the illegitimate fascist National Islamic Front (NIF) regime which has degraded the dignity of our people, tarnished and put in disrepute the image of the Sudan in the outside world, threatened international and regional peace and security, caused instability in neighboring countries and exported and continued to sow discord in more than a country. The NIF aggressive policies have led to their rejection of all peace initiatives and the escalation of civil war in the country. Pursuant to the declared objectives and principles of the NDA as enshrined in its charter;

Inspired by our people's struggle against successive dictatorial regimes; Guided by

**(Article) I. Ending of the civil war and restoration of peace in the Sudan**

Section a) Self Determination

- 1) Affirms that the right of self determination is a basic human, democratic and people's right which may be exercised at any time by any people.
- 2) Recognizes that the exercise of the right of self determination constitutes a solution to the problem of ending the ongoing civil war, and facilitates the restoration and enhancement of democracy in the Sudan.
- 3) Affirms that this right shall be exercised in an atmosphere of democracy and legitimacy and under regional and international supervision. 4) Affirms that the areas afflicted by war are Southern Sudan, Abyei and Southern Sudan, Abyei District, the Nuba Mountains and Ingessena Hills.
- 5) Declares that the people of Southern Sudan (within its borders as they stood on 1.1.1956) shall exercise the right of self-determination before the expiration of the interim period.
- 6) Resolves that the views of the people of Abyei District as regards their wish to either remain within the administrative set up of Southern Kordofan region or join Bahr El Ghazal region shall be ascertained in a referendum to be held within the interim period but before the exercise of the right of self-determination for the South. If the outcome of the referendum establishes that the majority of the people of this district wish to join Bahr El Ghazal, the people of Abyei shall accordingly exercise the right of self-determination as part of the people of Southern Sudan.
- 7) Resolves that with respect to the Nuba Mountains and Ingessena Hills a political solution to redress the injustices suffered by the people of these areas shall be sought by the interim government and that a referendum to ascertain their views on their political and administrative future shall be organized and carried out within the interim period.
- 8) Reaffirms its commitment to a just peace, democracy and unity based on the free will of the people of the Sudan and to resolving the present conflict by peaceful means through a just and lasting settlement. To this end the NDA endorses the IGADD Declaration of Principles (DOP) as a viable basis for such a just and lasting settlement.
- 9) Reiterates that true peace in the Sudan cannot be viewed within the framework of the problem of the South but rather from the standpoint that our problem is of a national origin.
- 10) Affirms that our national problems cannot be solved except through clear, serious and continuous dialogue among all Sudanese national groups.

11) Asserts that the nature and history of the Sudanese conflict has proved that permanent peace and stability in the country can not be achieved through a military solution.

a) II. The constituent members of the NDA shall adopt a common stand on the options to be presented in the referendum in the South, which options shall be a) unity (confederation I federation) and b) independent statehood.

a) III. The NDA affirms that the Central Authority shall within the interim period devise and implement the necessary confidence-building measures and the appropriate restructuring of the State and socio-economic institutions and processes, so that the exercise of the right of self-determination could have the best chances of upholding the unity option.

b) Relationship between Religion and Politics

1) All human rights norms and principles enshrined in regional and international human rights instruments and covenants shall be an integral part of the constitution of the Sudan, and any law, decree, executive order or policy measure contrary thereto shall be considered null and void and unconstitutional.

2) All laws shall guarantee full equality of citizens on the basis of citizenship, respect for religious beliefs and traditions and without discrimination on grounds of religion, race, gender or culture. Any law contrary to the foregoing stipulation shall be considered null and void and unconstitutional.

3) No political party shall be established on religious basis.

4) The state shall acknowledge and respect religious pluralism in the Sudan and shall undertake to promote and bring about peaceful interaction and coexistence, equality and tolerance among religions and noble spiritual beliefs, and shall permit peaceful religious proselytisation and prohibit coercion in religion, or the perpetration in any place, forum or location in the Sudan of any act or measure intended to arouse religious sedition or racial hatred.

5) The NDA undertakes to preserve and promote the dignity of the Sudanese woman, and affirms her role in the Sudanese national movement and her rights and duties as enshrined in international instruments and covenants without prejudice to the tenets of prevailing religions and noble spiritual beliefs.

6) National programs in the fields of information, education and culture shall be formulated and disseminated in accordance with the regional and international instruments and covenants on human rights.

c) System of Rule During the Interim Period:-

1) The Sudan shall be ruled during interim period on the basis of decentralization. The interim constitution shall stipulate the powers and competence of the central and regional entities and the manner of their distribution.

- 2) The NDA shall formulate a law for the decentralized system of rule in the Sudan.
- 3) The decentralized system of rule shall be based on the distribution of powers and competence, as agreed upon between the Center, Northern Entities and the Southern Entity. An agreement as to the names to be applied to those entities shall be reached subsequently.
- 4) The role of local government and the system of native administration shall be taken into account in the formulation of the law on decentralization.
- 5) In organizing the interim administrative set up the following issues shall be put into account:
  - a) Redressing injustices and root causes of the war and the creation of a conducive atmosphere for the rehabilitation, reconstruction and rebuilding of the country.
  - b) Gauging the wishes of the people of the various areas as regards the evolving democratic process in the country.
- 6) In implementing the system of decentralization, due regard shall be given to the difficult economic conditions of the country, austerity measures shall be taken with the view to reducing unnecessary public spending. It is also emphasized that wide-based popular participation at all decision-making levels should be ensured within the framework of democratic decentralization.

**(Article) II. Programs and modalities for the intensification of the struggle to overthrow the NIF regime**

- 1) The legitimacy of the armed struggle being waged by the various forces of the NDA with a view to overthrowing the NIF regime in accordance with agreed upon mechanisms.
- 2) Provision of material and other means required to execute this program.
- 3) Establishment of a high politico-military committee to undertake the task of coordination, supervision and implementation of the programs of intensifying the struggle to overthrow the regime.

**(Article) III. Military and security arrangements during the interim period**

The conference adopted all the recommendations proposed by the ad hoc technical committee on this matter.

(Article) IV. Foundational bases of the New Sudan For the purposes of laying down the foundations of the New Sudan the conference adopted the following programs for the interim period:

- a) Economic Program for the interim period

- b) Foreign policy and regional and international cooperation
- c) Eradication of the vestiges of the NIF regime
- d) Laws governing political parties
- e) Trades Unions code of ethics
- f) Press and Publications law

**(Article) V. Humanitarian issues**

The erroneous economic policies of the regime and its escalation of the civil war have resulted in unprecedented internal migration and displacement. These have, in turn, caused a serious damage to the environment and subjected large sections of the population, especially women, to untold suffering. Furthermore war, instability, political subjugation and violation of human rights have all combined to force huge numbers of citizens to seek refuge abroad. Out of concern for the welfare of the Sudanese people and their right to free movement inside and outside the country, and in an attempt to address some of the urgent problems facing displaced people and refugees, the conference adopted a practical program of action to be implemented during the interim period. The conference also decided that measures shall be taken to assist refugees and victims of the regime's brutal policies both in the short and long terms, in cooperation and coordination with the international community and the appropriate organizations in the Sudan.

**(Article) VI. The Structuring of the National Democratic Alliance and amendment of its charter**

The conference adopted the new organizational structure of the NDA which shall consist of the conference, the Presidency, The Executive Bureau, The General Secretariat, The Specialized Departments, and The Branches. The conference also adopted the program of external action and the proposed Amendments to the NDA charter with a view to accommodating the new and intervening political developments. By successfully addressing these fundamental issues and adopting the above-mentioned programs the NDA Conference on National Fundamental Issues has reached a consensus formula to which all its forces are committed. These programs include the removal of the regime, the ending of the civil war and realization of peace, the restoration of democracy and the creation of a conducive atmosphere for the establishment of the new Sudan. In order to enable it realize these objectives, the NDA earnestly appeals to the international and regional communities, sisterly and friendly countries, peace-and democracy- loving states to come to the help of the Sudanese people in their legitimate struggle to rid themselves of the pariah regime and thus enable the Sudan assume its natural position within the family of nations. The NDA calls upon all the Sudanese compatriots inside and outside the country to unify their ranks and rally around the banner of the NDA in order to enhance the implementation of its programs. The NDA, having been honored in holding its conference in the land of Eritrea, would like to extend its heartfelt gratitude and thanks to the sisterly and heroic people of Eritrea under the leadership of the Popular Front for Democracy and Justice. The NDA salutes the stand of the Eritrean people in support of the

Sudanese cause and the fundamental issues affecting the Sudanese nation. The NDA specially salutes the gallant hero, President Isais Afwerki, for his comprehensive understanding of the Sudanese problem and for the heroic stand he has taken in support of the Sudanese people. The NDA would like to take this opportunity to commend the positive role being played by the IGADD countries, led by President Daniel arap Moi, and Friends of IGADD countries in their endeavors to bring about a speedy end to the war and to restore peace and democracy in the Sudan.

The NDA also commends the positive stands taken by the sisterly and friendly countries which have special historic and close relations with the Sudan and its people, namely Egypt, Kingdom of Saudi Arabia, the Gulf states, all the neighboring countries and all other friends in the world at large. The NDA cannot help but also express its appreciation and thanks to all those friends who cabled the conference to convey messages of support and encouragement.

**LAMPIRAN III**

***THE BLACK BOOK :***  
**Imbalance Of Power And Wealth**  
**In Sudan**

***The Black Book:***  
**Imbalance of Power and Wealth in Sudan**

**Authors: Seekers of Truth and Justice**

**Translator: Anonymous**

**March 2004**

**General Translator's Introduction:**

In 2000, a mysterious book appeared in the streets of Khartoum under the title "The Black Book: Imbalance of Power and Wealth in the Sudan". The mystery of the book was strengthened by its impeccable method of distribution necessitated by the Regime's firm grip over information in the country. The launch of the work consisted of a once-off distribution at gates of major mosques, following Friday prayers. Soon after, the circulation of the Book gained momentum. Spontaneous photocopying made the Book available all over the country and abroad. The book soon became the most talked about document in the country. It was an envy of any writer, the world over. Most readers had never seen the original copy of the book. Illiterate people too became familiar with the Book as it was debated in every gathering.

The thesis of the Book is simple but disturbing. Using statistics, the authors claim that Sudan is controlled by only one Region (Northern Region) with just over 5% of Sudan's population. Within this hegemonic Region, power is monopolised by only three ethnic groups. The Book then gave detailed statistics about the hegemony of the Northern Region over the whole the county. All Sudan's Presidents and Prime Ministers came from this Region. Members of this Region also controlled all key positions in the country ranging from ministerial posts to heads of banks, developmental schemes, army, police, etc.



Part Two of the Black Book did not appear until August 2002. Unlike Part One, this one joined the global world and appeared in a website (Sudanjem.com). Part two has less talk but more statistics. Altogether, there are more than 200 Tables in it.

As of last year (March 2003), some of the activists involved in the preparation of Book took arms against the government. The armed uprising, referred to as Darfur Conflict, constitutes Africa's youngest civil war. To date, this war has resulted in 800,000 displaced, 120,000 refugees and no less than 100,000 fatalities.

In translating the Book from Arabic, I did my best to remain faithful to the text. Passages that are of no value for the English reader have been eliminated. These passages are either steeped in Arabic metaphors, or elsewhere presuppose some knowledge that is particular to Sudan's history, folklore and traditions. Retaining them in the text requires substantial explanation that lies beyond my role as a translator.

22/03/2004

Translator

**Dedication:**

To those who filled themselves of haughtiness, arrogance and feeling of superiority, wishing to silence our Black Book or elsewhere replace it with their White Book.

To the Sudanese people who have endured oppression, injustice and tyranny

To the majority of the Sudanese people who still suffer marginalization of power and wealth

To those, who work for justice and equality with extreme honesty and self-denial.

### **Introduction to Part 1.**

We present our work “The Black Book; Imbalance of Power and Wealth in the Sudan” as a document that exposes the performance of successive governments which ruled the Sudan in its recent history. This book is not driven by narrow motives that seek to incriminate or blame certain circles in the country. Rather, it is a critical work that documents objective facts that are hard to overlook.

This book is an exposé of the injustice that was visited on the Sudan by successive governments which ruled it since independence –(1956). The pattern of injustice remained almost the same throughout irrespective of the political orientation of incumbent government: secular, theocratic, dictatorial or –presumed- democratic. They all displayed blatant favouritism of one particular circle in the Sudan to detriment of all others. The favoured part of the Sudan attracted disproportionate attention, care, services and developmental resources from those successive governments. That favoured part of the Sudan is the Northern Region where most of the ruling elite come from.

For the purpose of this Book, we have divided the Sudan into five Regions:

1. Northern Region: Current River Nile and Northern States.
2. Eastern Region: Gadharif, Kasala and Red Sea States
3. Central Region: Gezira, Sinnar, Blue Nile and Khartoum States
4. Southern Region: Upper Nile, Bahr Alghazal and Equatorial States
5. Western Region; Kordofan and Darfur States

In its blatant favouritism for the Northern Region, successive governments in the Sudan have systematically breached rights of its other citizens. They deviated from the principle of treating all citizens as equal. They have accused others of racism, a crime that they have themselves practised every single day of their reign.

Successive governments of the Sudan have thus lost their credibility and have, therefore, disqualified themselves in so far as support of the Sudanese citizens is concerned.

In presenting this Book, we intend to shed light on this unfortunate reality and make it crystal clear for all.

The new Millennium is now approaching, full of hope and optimism. Due to its recent history, Sudan meets the new Millennium steeped in poverty, illiteracy, disease and lack of development. Despite, the Sudanese citizens are invited to rise to the challenge by appropriating the same powers which have so far crippled them. Let them do that in collaboration with other global citizens whose rulers have delivered and have prepared them for the new area.

### **Introducing Sudan**

Sudan lies between lines 14 and 38 Latitudes East, and 4 and 22 longitudes North of Equator. It occupies 968,000 square miles. The White Nile, the Blue Nile and River Nile zigzag their way through it and provide rich source of water and food. Sudan is surrounded by nine countries: Chad, Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, Uganda, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Egypt and Libya. The position of Sudan between these countries is source of wealth but equally of trouble. Sudan also touch the Red Sea with a shore that extends to 309km. Sudan has three distinctive geographical zones. North of Latitude 16 is barren desert. Below Latitude 16 is a region rich in equatorial climate. In between is a savannah belt that gets drier the further you move to the north. These distinctive climatic variations have their impact on Sudan's populations and their cultures.

The last National Census, 1993, put Sudan's population at 24,940,703 with annual growth of 2.6. For the purpose of this document, we divide Sudan into five regions. Each of these Regions has its historical, cultural and administrative particularities. Furthermore, each Region consists of a number of provinces – see Table 1.

**Table 1**  
**Populations of Sudan Regions**

Region	States	Population	%
Eastern	Kasala, Gadharif, Red Sea	3,051,958	12.2%
Northern Region	Northern, River Nile	1,291,620	5.3%
Central Region	Gezira, Sinnar, White Nile Blue Nile, Khartoum	8,829,367	35.4%
Western Region	Kordofan, Darfur	7,912,285	31.7%
Southern Region	Upper Nile, Bahr Alghazal Equatorial	2,845,480	11.4%
Total	-	24,940,703	100%

Khartoum, the capital, which we include within the Central Region has a population of 3,413,034. More than half of this population come from deprived Regions of the West and the South, primarily fleeing lack of development and war.

#### **Natural Resources:**

Sudan is rich in natural resources, particularly agriculture and forestry. It has no less than 120,000,000 acres suitable for agriculture. Only 16,000,000 of that are currently under use. Agriculture is still dependent on rainfalls despite ample underground water. The economy of Sudan now rests on rain-fed agriculture. Major products include peanuts, hibiscus, sesame seeds, watermelon seeds and gum Arabic. Animal resources, like camels, sheep and cattle also feature in Sudan export economy. Recently, petrol and gold have been added to the export wealth while the country still awaits exploitation of other minerals like copper and natural gas.

#### **Administrative Division of the Country:**

A recent constitutional Decree, 1996, divided the Sudan into 26 States. These are then grouped into five Regions: three in the East, two in the north, five in the centre including the capital Khartoum, six in the west and ten in the south. Each State has its government and its legislative council. If we exclude the south which is still a war zone, whatever development we can find in the country has been confined to the

north, Khartoum, part of the Central Region and an even smaller part of the Eastern Region. The entire Western Region now lacks a single developmental scheme which could support one province for a single week. The oil refinery in Alobeid, Western Region is now classified as a national project. As such, its proceeds are controlled by the central government in Khartoum. The oil wells at Abu Jabra and Maglad, also in the Western Region have also come under similar strategy. Employment of local people is confined to digging these wells. All jobs from drivers and above are filled by labour imported from outside the area. Officers of the security personnel and most of their foot soldiers are carefully selected from one known ethnic category, so that not a single Dinar goes to those who do not deserve.

#### **Defining the state and its authority:**

Scholars rarely agree on how to define the state. Nonetheless, a consensus occurs regarding its essence and constituents. Calson refers to the state as “a constellation of the nation”. Others like Degi stress the constituent elements of the state like territory, population and authority. Gamal Albanna, another scholar in this field identifies five requirements for an Islamic state:

- a) Primary aim is to develop the land (*Allah said I am making a Khalifa on the land. Koran, Albaqra Sura, Chapter X, verse mm*)
- b) An environment that guarantees freedom (no compulsion on faith)
- c) Justice as the main axis of state operation (*be just for justice is the essence Almaidah Sura of piety; Prophet Mohamed said: I have declared injustice haram <strongly disallowed> for myself. I also made it haram for all of you so never be unjust*)
- d) Decision making rests on consultation (seek views of stakeholders first and when you act trust on Allah)
- e) Rule based on Allah’s diktat ( Let the rule be based on Allah’s words and let Allah be the sole God to be worshiped in the land)

In our modern understanding, a state must display the following:

- a) **Territory:** A defined territory that is endorsed by relevant international authorities.
- b) **Population:** People who live in the specified territory.
- c) **Ruling authority:** The power that is legitimated to administer the territory and its people according to specified laws and institutions. The ruling authority must demonstrate its commitment to work for peace and for meeting basic needs of all within its domain.

Conditions for accepting the authority of the ruler/ governing power:

The authority must demonstrate its commitment to maintain sovereignty of land against foreign intruders; treat its citizen equally; afford them peace and protection; guarantee dignified life; spread freedom and dignity, and must enable its citizens to fully participate in conducting their public affairs. All that is to take place within an environment that is conducive for participation of all without religious, ethnic, skin colour and gender discrimination.

The state authority can not only implement that without commitment to its national laws that regulates and divides powers among different state organs. Most important here is the separation between state powers, and in particular the political, the judicial and the legislative.

#### **Reflection on state Authorities:**

##### **Executive Powers:**

These are vested in specified offices that are delegated to implement state policies regarding economy, politics, social needs, security and general state-citizen relationship. Executive state organs must be subordinate to and committed to state legislative authorities.

##### **Legislative Authorities:**

Duty of these bodies is to enact laws regarding state policies in the political, social, economic and ethical areas. Legislative authorities draw their laws from religious, traditional, natural and legal conventions. Legislative authorities should be

committed to observe these laws which they make and ensure that state and the public will do like-wise.

**Judicial Authorities:**

Their main function is to implement the law, protect the state constitution and restore justice when disputes occur. These authorities can only function adequately if they maintain and respect their neutrality and independence. Independence of the judiciary should be maintained throughout its entire hierarchy ranging from its lowest level like the village court to its highest level, the Constitutional Court.

**Media:**

Media has only recently surfaced as an important player in modern state apparatus. It has since carved itself a space that has become indivisible from any democratic state. The media now plays an important role in guarding state laws and constitution, similar to the role traditionally played by legislative powers. Moreover, it has become the avenue for channelling complaints regarding abuse of power, infringement of law by the powerful, corruption and injustice at large. It has also become a voice for the powerless and a guardian for the dispossessed.

**Examples of Imbalance of Division of Powers:**

State authority is a source of power and a tool for achieving prosperity for all within the nation. Sudan state is no exception in this regard. At its independence, 1956, it declared itself a sovereign state and raised its flag together with other slogans promising full commitment to work for good of all within the new nation. Discrepancy between slogans and actions however appeared as early as the birth of the new state. Politics in Sudan was sectarian and dominated by the two religious houses, the house of the Mahdis and the house of the Mirghani. These two Houses corresponded (still do) to the two leading political parties: the Umma Party of the Mahdis and the Democratic Unionist Party of the Mirghanis. In some ways, these two Houses inherited colonial powers on golden plates. In order to monopolize power in the country, both of these parties pegged leadership of their parties to that of their respective religious sects. Hence party leader were also sect leaders. The trick was that sect leaders had to come from families of the founding fathers of these religious

sects. Moreover, a second strategy was also devised for the same purpose that was of exporting electoral candidates. Important party members from the centre were encouraged to stand for elections in areas other than their own. The practice effectively made it impossible for emergence of locally borne political representatives. These practices ensured domination of the Northern Region over all other Regions in the country and established a pattern for dealing with so-called marginalized areas. The pattern also meant that legislative powers remained under personnel who were primarily drawn from the Northern Region.

The pattern described above had (still has) wide ramifications on political representation in the country. High representation of the Northern Region in the central government remained the same irrespective of knowledge gains in other Regions and changes in the political environment. Throughout its recent history, the Northern Region was represented by well over 50% at the central government. Its representation occasionally climbed over 70%. From independence to this day, not a single Prime Minister/ President came from any Region other than the Northern Region. Like many 3<sup>rd</sup> World countries, Sudan was ruled by several governments which came to power through a coup. However several attempts to overthrow governments failed simply because their leaders came from Regions other than the Northern Region.

In the coming pages, we will examine the influence of state on distributions of power in the country. Figures and statistics will be used to explain that, and here they follow:

#### **Ministerial Representation:**

For the period 1954 to 1964, 73 ministerial positions were served in central government in Khartoum. Share of different Regions are presented in Table 2.

**Table 2**

#### **Ministerial Positions 1954 – 1964.**

No	Region	Positions	Overall %
1	Eastern Region	1	1.4%
2	Northern Region	58	79%
3	Central Region	2	2.8%



4	Southern Region	12	16%
5	Western Region	0	0%

To place Table 2 within perspective, we have to refer to Sudan's population some decades ago. 1986 census was the mostly reliable for our purpose.

**Table 3**

**Sudan Population Distribution, 1986**

No	Region	Population	%
1	Eastern Region	2,212,779	11.8%
2	Northern Region	1,016,406	5.4%
3	Central Region	4,958,033	26.5%
4	Southern Region	4,407,450	23.7%
5	Western	6,072,872	32.6%

Note that 5.4% of Sudan's population were represented at 79.5%, executive/ministerial posts in the Khartoum, the seat of the central government. During that period, five different governments took office but the pattern remained the same.

**Table 4**

**National Governments 1954-1964**

No	Government	Years	Leader
1	1 <sup>st</sup> National Government	Jan. 1954	Alazhari
2	2 <sup>nd</sup> National Government	1955	Alazhari
3	3 <sup>rd</sup> National Government	1956	Alazhari
4	Kkaleel Government	1958	Khaleel
5	1 <sup>st</sup> Military Government	1958-1964	General Aboud

All of the above governments based their powers on the afore-mentioned religious sects. General Aboud was no exception.

Following national uprising in October 1964, Abud was removed from office, thus giving way for a democratic government 1964-1969. Let us now see what happened to executive representation under democratic Sudan.

**Table 5**  
**Ministerial Positions 1964-1969**

Region	Positions	%
Eastern	2	2.05%
Northern	55	67.9%
Central	5	6.2%
Southern	14	17.3%
Western	5	6.2%

Total of constitutional posts for this period was 81 positions. Strangely enough, Western and Southern Regions contributed a lot to bringing the interim Government under Presidency of Sir Alkatim who prepared the country for 1964's elections. Those who were selected as ministers from the Central Regions were of Northern Region origin.

#### **The Reign of Nimeiri, 1969-1985.**

Nimeiri's military rule was characterised by internal instability leading to numerous cabinet reshuffles. In total, 115 ministers served in his different cabinets with the following regional distribution (see Table 6):

**Table 6**  
**Ministerial Positions, 1969-1985**

Region	Positions	%
Eastern	4	2.5%
Northern	79	68.7%
Central	19	16.5%
Southern	9	7.8%
Western	4	3.5%

Despite tremendous differences between the politics of Nimeiri's and what went before him, domination of the Northern Region seemed to have persevered. Continuous flow of new ministerial blood and the reputation of Nimeiri as a man for all Sudan did not dent the supremacy of the Northern Region. This situation increased the hegemony of the Northern Region and sabotaged all attempts to attract development projects for non-Northern Regions. A good example was the defunct Kafra road which was meant to connect Libya with Alfashir the capital of the Darfur in the Western Region. The desert highway road was to be financed wholly or partially by Libyan aid. Obstruction against construction of this road is well known to all and had caused tremendous loss of faith in the central government in the Western Region.

Following demise the of Nimeiri, a transitional military government took over for a year to prepare the country for election. The new government operated under what came to be known as Transitional Military Council headed by Swar Aldahab. Table 7 shows the constitution of the Transitional Military Council.

**Table 7**  
**Transitional Military Council, 1985-1986**

Region	Positions	%
Eastern Region	0	0%
Northern Region	21	70%
Central Region	3	10%
Southern Region	5	16.7%
Western Region	1	3.3%

Please note that the Sudanese Army has always been a national institution. That aspect of the army faired rather poor with the regional representation of the Council.

The Transitional Military Council was aided by senior members of the Transitional Government but imbalance remained as before.

#### Second Democracy 1986-1989:

The Transitional Military Council kept its words. It organized democratic elections and handed down power to the new elected Prime Minister, Sadiq Almahdi whose cabinet are presented in Table 8.

**Table 8**

**Ministerial Positions of Almadhi's government 1986-1989**

Region	Positions	%
Eastern Region	3	2.6%%
Northern Region	55	47.4%
Central Region	17	14.7%
Southern Region	15	12.9%
Western Region	26	22.4%

Almahdi was the only leader who came close to perfection in the sense of forming a government in which all Regions were reasonably represented, notwithstanding the evident over representation of the North. Although the North was also over represented and the cabinet did not reflect the regional distribution of Sudan's population, we would like to acknowledge that Almadhi deserve praise for having gone further than any other Sudanese leader. Almahdi was also the first head of state who allowed the important Ministry of Finance and Economy to be headed by some from the Western and the Central Region. These were Ibrahim Mansour and Omer Bashir from the Western Region and Omer Nur Aldayim from the Central Region.

#### Albashir's Government of National Salvation, 1989 to date:

Almahdi wa : overthrown in a bloodless coupe, 1989 and a new government under took office under the name "Revolution/Government of National Salvation". As the West has been instrumental in the formation of the ideology which inspired Albashir to take over, the Westerners were rewarded without challenging the domination of the

North. This was reflected in the constitution of the Military Command Council which controlled Sudan for Albashir's early years (see Table 9):

**Table 9**  
**Revolutionary Command Council, June 1989**

Region	Positions	%
Eastern	0	0%
Northern	10	66.7%
Central	0	0%
Southern	2	13.3%
Western	3	20%

When the power was settled in favour of the new government, the domination of the Northern Region was restored in line with previous political traditions. The new government operated under the slogans: Civilizational Project, Islamization of life, equality and justice and the principle of citizenship. Unfortunately, these slogans soon gave way to unchallenged hegemony of the Northern Region. The evidence for that can be seen in the cumulative high office positions which continued until the last cabinet reshuffle 1999. A total of 202 personnel are computed in Table 10.

**Table 10**  
**Constitutional/ Ministerial Positions, July 1989-December 1999.**

Region	Positions	%
Eastern	6	3%
Northern	120	59.4%
Central	18	8.9%
Southern	30	14.9%
Western	28	13.8%

As Table 10 shows, representation of the Northern Region reached 59.4% for a population that constituted 12.2% only. As such, the destiny of the remaining 87.8%

of the population was subordinate to the will of the 12.2% who came from the Northern region. The Northern Region itself was not (still is not) a homogeneous entity. In fact, the North contained many groups that were subject to same level injustice and marginalization like the Manaseer and Mahas. The first claimed Arab descent while the latter were of Nubian origin. In fact the entire Northern Region was dominated by only three ethnic groups which also dominated the whole country. These were the Shaygia, the Jaalyeen and the Danagla.

Table 10 also indicates that the National Salvation government had come to wreck what it had formed before during its first Military Command Council. In so doing, the government demonstrated its inability to deviate from established patterns of injustice, despite the slogans which it raised during its inception. Even in situations when the government appointed some personnel from other regions, it opted for those migrants from the Northern Region. Appointing those of Northern origin resident in other region was a blatant attempt to deceive people and give the illusion of some air of regional representation.

In December 1999, and following power struggle between Albashir and his ideologue Turabi, the government rushed in a number of Presidential Decrees. Changes contained in these Decrees showed little attempt to avoid tribalism and regionalism as promised in earlier slogans. This was (still is) evident from the choice of new recruits to high offices ranging from the Republican Palace to ministers and State governors. To dispel any accusation of bias in our analysis, we present below a list of their new appointees indicating their portfolios and regions. We will start with the Republican Palace (see Table 11)

**Table 11**

**Staff of the Republican Palace (December 1999)**

No.	Name	Position	Region
1	F. Marshall Omer A. Albashir	President	Northern
1	Ali Osman M. Taha	First Deputy President	Northern
3	George Kangoor Arop	Deputy President	<b>Southern</b>
4	Dr. Riak Mashar	Assistant President	<b>Southern</b>
5	Dr. Ibrahim Ahmed Omer	Assistant President	Northern

6	Lt General Bakri Hasan Salih	Minister for presidency Of the Republic	Northern
7	Dr. Ahmed Ali Imam	Presidential Advisor	Northern
8	Dr. Nafayi Ali Nafayi	Peace Affairs	Northern
9	Dr. Altayib Mohamed Kheir	Security Affairs	Northern
10	Dr. Suaad Alfatih	Women and Children	Northern
11	Abdel Basit Sabdarat	Legal Politics	Northern
12	Salah Mohamed Salih	Water Resources	Northern

Following defection of Riak Mashar to SPLM, the Palace remained with 11 members one of them from South Renk (Southern Region) while the rest originated north of Aljaile (town north of Khartoum). Those 11 were left to rule a country that extended from Geneina to Port Sudan and from Nimuli to Halfa. One wonders how those people could have imagined the rest of the country and how many of them had seen a third of it, let alone its entirety.

Where was the justice promised by the government in the field of division of power and where was the transparency often reiterated by official media? What was the role of this immense army of advisors? Had these appointments any purpose other than appeasing relatives and fellow members of ethnic groups? What are the jobs that they could and which could not be accomplished by Ministers of the Federal Government (as distinct from State governments)?

Below are names of the Ministers of the Federal government for Post-Turabi Period (12/1999 onwards; see Table 12)

**Table 12**  
**Federal Ministers**

Name	Region
F. Marshall Omer Ahmed Albashir	Northern
Ali Osman Taha	Northern
George Kangoor Arobe	Southern

Dr. Riak Mashar	Southern
Ibrahim Ahmed Omer	Northern
Dr. Mustafa Osman Ismael	Northern
Lt. general Abdel Rahman Siralkhatim	Northern
Dr. Mohamed Kheir Alzibair	Northern
Dr. Awad Ahmed Aljaz	Northern
Dr. Zibair Bashir Taha	Northern
Dr. Abdalla Hasan Ahmed	Northern
Dr. Qutbi Almahti	Northern
Abdel Basit Sabdarat	Northern
Dr. Abdalla Mohamed Seed Ahmed	Northern
Ali Ganmar Osman Yasin	Northern
Kamal Ali Ahmed	Northern
Badria Sulaiman	Northern
Abdel Haleem Almuaafi	Central
Abul Gasim Mohamed Ibrahim	Central
Dr. Ghazi Salah Aldin Atabani	Central
Ahmed Ibrahim Altahir	Western
Lt. General Tigani Adam Tahir	Western
F. Marshall Ibrahim Sulaiman	Western
Mekki Ali Bilal	Western
Dr. Alhaj Adam Yousif	Western
Mohamed Tahir Bilal	Eastern
Dr. Lam Akol	Southern
Alison Manafi Magaya	Southern
Joseph Malwal	Southern

Reading the Table above, the regional representation of the Federal Government is summarised below.



**Table 13****Regional Representation of the Federal Government, 1999.**

Region	No of Positions	%
Eastern Region	1	3.3%
Northern Region	18	60.1%
Central Region	2	6.6%
Southern	4	13.3%
Western Region	5	16.7%

**Chapter 4****Examples of Imbalance of Division of Wealth:**

Division of wealth in any society is an important barometer of the legitimacy of its political system. A political system that thwarts its laws to preside over an unfair distribution of wealth is bound to witness rapid erosion of its legitimacy. Modern Sudan is a case in point here. We have carefully monitored the division of wealth in this country over a long time and have come to conclusions that are neither assuring, nor comfortable to confront. We have handed our leadership to those with whom we have fought together for our common national objectives. We have paid our allegiance and put our trust behind the appealing slogans which they raised and continued to do so until the present time. We have finally come to the conclusion that as we demand restoration of our rights, we are demanding the impossible. We are like a person who tries to straighten a shadow without thinking about the crookedness of the object that casts it in the first place

During his reign 1958-1964, General Aboud extended the railway line to Nyala, opened two technical schools in Geneina and Nyala and two secondary schools in Alobeid and Port Sudan. Having done that, he then proceeded to redirect the rest of Sudan's wealth for the development of Central and Northern Sudan. Agricultural schemes of Khasm Algirba and New Halfa were given special attention, having been reserved for those who were displaced by the construction of Oswan dam. Population of New Halfa were compensated for losing their original homeland and for

the mistakes that were committed by previous rulers. However, had they not been indigenous to the Northern Region, they would not have been compensated.

Since independence, Sudan has known several development plans. Among them we mention Ten Years Strategic Development Plan, Five Years Development Plan and Three Years Development Plan. Billions of dollars have been spent on these Plans, forming our present foreign debts and a burden on current and future generations. Most of these Plans have been located in the central and northern Sudan and we are yet to see a return that benefits all those who are responsible for its costs. Many of the schemes which emerged within these developmental plans have remained a drain on the national economy at the expense of all but the Central and the Northern Regions. A critical look at government budget allocations in recent years shows the perils of such development investment and the special place northern Sudan occupies in the hearts of Sudan's ruling elite. Not a single state in non-northern Sudan exceeded 36% of its already budgeted allocations. The Northern States were different. Actual disbursement shows that they never dropped below 60% of their planned budget allocations. Apparently, there is a story behind that. The Ministry of Economy and Finance has always been dominated by the Northern Region. Top positions like Minister, the Deputy Minister, Secretary Generals and chief administrators usually come from the Northern. Even the positions of drivers are also reserved for school drop outs from then north. The rest of the country has to contend with jobs in the Ministry as cleaners, tea makers, guards, etc. In such an environment, it is not surprising that non-northern States find it impossible to receive their allocated budgets while the Northern States have their facilitators at every venue inside the Ministry. This is very clear when you look at how universities and higher institutes have been performing. In particular, that is evident from the growth of Universities of Kasala and Kadugli (Eastern and Western Region respectively) with their peer Universities of Shandi and Atbara (Northern Region). The first category experienced difficulties while the last prospered even when the economy was facing major difficulties. Universities of the north benefited from substantial donations from public companies which were headed by officials from the Northern Region. Their donations were in fact borne by the same tax payers who come from the whole of the Sudan.

For our purpose here, we will focus on the major characteristics of the Three Years Programme which was ratified by the Government of National Salvation for the years 1999 to 2002.

#### 4.1. The Agricultural Sector.

The irrigated sector, as distinct from rain-fed sector of agriculture is an important component of the Sudanese economy. It has been developed with dual aims in mind. Firstly, to boost the export sector through increase in cash products like cotton, peanuts, sesame seeds, etc. Secondly, to augment food production as a strategic sector, thus increasing production of millet, maize, rice, lentils, etc. This sector has been fortunate in attracting substantial fund both from national resources as well as borrowed capital from abroad. Substantial expenditure in this sector also goes for infrastructure like dams, roads, bridges, etc. Despite substantial investment in this sector, its revenue to the nation is minuscule compared to rain-fed agriculture. The latter has remained a back bone of the export sector contributing peanuts, sesame, gum Arabic, hibiscus and animals. The high cost and low return aspect of the irrigated sector led to its continuous subsidization by the rain-fed sector. We note here that the irrigated sector dominates in Central and Northern Sudan while rain-fed agriculture features mainly in other parts the nation.

Lack of investment in areas of rain-fed agriculture has been a major cause of migration to cities including the capital Khartoum. The North has however been protected against population depletion. Production of wheat has been moved from central Sudan to the north. Movement of wheat to the north has led to the emergence of new dams like Kajabar, Hamadab and Marawi and God knows what other dams follow. Palm trees that were displaced by these dams have been compensated for and many of them have been transported for transplantation in Khartoum. Compare this level of care with the impact of similar dams and irrigated schemes in the East like Algash, Tokar and Sitait. Displacement in these areas still remains unaided to this day. This is despite the fact that the east is among the least underdeveloped parts of the country. Its population suffer disease, hunger, illiteracy and drought.

#### 4.2. Rain-fed Agricultural Sector

Two broad sub-sectors can be identified here; these are the traditional rain-fed sector and the mechanised rain-fed sector. This sector plays important role in food production. Its programme of work is intended to include investment in agricultural services, pest control, provision of seeds and agricultural extension in general. A number of schemes were established within this sector with the aim of developing deprived areas and rehabilitating drought stricken savannah belt. Rather than augment this sector, the government ordered liquidation of a number of them. These schemes are:

1. Nuba Mountain Agricultural Corporation
2. Blue Nile Agricultural Corporation
3. White Nile Agricultural Corporation
4. Agricultural Machinery Corporation
5. South Kordofan Agricultural Corporation
6. Mechanised Agriculture Corporation]
7. Jebel Mara Rural Development Scheme
8. Western Savannah Corporation

Note that none of these schemes were in the north and that these schemes were liquidated and not sold or privatised. We add that these schemes were developmental and their contribution was not confined to economic gains. As such we are bound to conclude that scrapping of these schemes indicates that development work is a preserve of north Sudan. Others have to contend without it. None of those in power who are calling for equality and development in the county had noticed the plain fact: that since Independence, Darfur has not secured a single developmental scheme which could finance a single Local Administrative Area for three months. Moreover, most agricultural schemes in central Sudan are headed by personnel from the north or otherwise those whose origin is in the north. Examples here include the Gezira Scheme, Rahad Scheme and the Blue Nile Scheme.

In addition to liquidation of public amenities, the government also resorted to aggressive privation that benefited certain circles. Below is a list of privatised public properties:

1. Abu Naama Jute Factory
2. Sata Company
3. Blue Nile Cardboard Factory
4. Port Sudan cotton Spinning Factory
5. Rabak Ginnery
6. Sudan Mining Corporation
7. Red Sea Hotel
8. Kosti Guest House
9. Sudan Cotton Company
10. White Nile Tannery
11. Ria Sweets Factory
12. Kirrikab Factory for Sweets
13. Khartoum Tannery
14. Kuku Company for Milk
15. Sudan Hotel
16. Atbara Guest House
17. Sudan Trade Bank

Some of these companies were sold to certain institutions and for logical reasons. For example, there was nothing wrong in selling Sudan Hotel to the National Fund for Social Insurance. Other sales were however of dubious nature. Abu Naama Jute Factory was sold for Ls 800m, a sum that was well below its commercial value at the time, considering land, assets and machineries included in the sale. We were less surprised when we realised that the buyer was none other than Hashim Haju . Other sales also followed the same pattern. In sharp contrast to Hashim Haju, the Sudanese businessman Mohamed Jar Alnabi who is from the Western Region had to struggle exceptionally hard to survive with the regime. His effort to establish an oil refinery, a strategic acquisition at the time did not endear him to the system. Had it not been for his resilience, he would have been driven into exile like the Ex-Governor of Darfur, Ibrahim Draig.

Sadly, the above shows how the country is run and how the public coffer is manipulated to serve certain individuals and certain areas. Barriers are also erected to prevent leaders from other parts of the Sudan to succeed. A good example is the endemic problem of drinking water in Atobeid city. It was the governor Ibrahim

Alsanusi who decided to confront this problem and had tirelessly worked for a final solution. As an indigenous to the area, he was not allowed to reap the result of his work. At the last moment, he was replaced by one of those who deserve to succeed, a governor from the Northern Region.

We all remember the case of Alshafay Ahmed Mohamed who worked together with his predecessor Hasan Mohamedain to establish the National Council. Both of them are from the west and hence had to give way to a northerner to preside over the established Council.

Dr. Ali Alhaj is another example of the manner in which leaders are penalised for not originating in the north. He was the dynamic figure in the peace negotiations as well as establishment of the Federal Government System. In each of these successes, he was removed to allow other to crown his success. Despite continuous character assassination, Dr. Alhaj remained national in his work and did not give way to racist, regional or nepotistic temptations.

#### **4.3. Agricultural Services**

Sudan has great agricultural potentials that are yet to be adequately explored and properly exploited. So far, expenditure on agricultural and horticultural extension has been confined to the irrigated sector. For the farmers in the west, east and southern Sudan, agricultural extension is a riddle for which they do not qualify. Other agricultural services directed at small farmers have also been available only to farmers in northern Sudan. Using the Emergency Law which has been enacted recently, even the meagre resources available to the Western Region have been further eroded. Its only pest control plane has been removed on the account that pests did not pose real threat to agriculture in Sudan. Definition of what constitute pests and grass-hoppers as provided by the Agricultural Pest Control Office in Darfur was not convincing enough for the bureaucrats in Khartoum. The result is that the Office lost the plane and its running cost and kept the grass-hoppers and other pests.

#### **4.4. Natural Resources:**

Environmental protection and reversal of desertification have been among the salient stated strategies of natural resource policies in the Sudan. Policies have been drafted

with the aim of arresting desertification, protecting and promoting forests, locating new sources of cooking fuel and other similar measures. However, actions on the ground followed a different trend. Jebel Mara forests, rich savannah grass in western Darfur, Blue Nile natural endowment and the gum Arabic belt are all directed to serve the overseers of the Federal government and their affiliates in the north.

#### **4.5. Anima Resources:**

As a desert plain, the Northern Region has no significance in the field of animal export. Nonetheless, amid international concern about animal disease, the north was declared – internationally- by the government as an area free of animal diseases. Soon after that, centres of animal exports in the west were moved to the north together with appropriate infrastructural rehabilitation to facilitate that. Officials who contested that were either subjected to threats or enticement to buy into the new policy of the day. Custom tax centres were also moved to the north. Despite difficulties, truck drivers involved in animal export had no choice but to clear their departing products in Dongula in the north. Financial services also had to follow suit. The Branch of Sudan Bank in Alashir in the west had to give way to a Bank Branch in Dongula despite the fact that Alafshir is a capital of animal producing Region, while Dongula is a capital with no land to support animal wealth and a population that is half of that of Alfashir.

#### **4.6. Industrial Sector:**

Rural industry and industrial villages have been among the fundamentals of development in India and China. The pattern of development is different in the Sudan. Rural areas are emptied of their labour force in favour of bloated cities where the meagre industrial development is concentrated. In these industrial centres, power is firmly placed under the grip of northern elite who in turn continue depleting other Regions of their wealth. This is despite the fact that substantial natural wealth like iron, petrol, gas, gold, etc. is found in these non-Northern Regions. As long as we continue along this road, it will be a long time before we can see a single industrial scheme outside Central and Northern Sudan. It is in these Regions that we find military industry, currency coinage, Bank Notes Printing Houses, electricity, sugar industries, etc.

#### **4.7. Water and Energy:**

It is hard to write about expansion in oil drilling and development in the Sudan without a deep feeling of embarrassment. The Ministry of Energy is now, more or less, a homestead of extended families belonging to one ethnic group from the north. This group and its commercial companies have monopolized all the high paying posts in the venture down to that of drivers. The local people who supposedly own the oil land are to be content with digging trenches and laying the oil pipelines.

Water development is currently reserved for the ever-expanding capital Khartoum. The rest of the country is left out dying of thirst as well as of diseases like malaria, **kalazar, bilharsiasis, and other water borne diseases.**

#### **4.8. Transport and Communication:**

Current state strategies in the field of transport and communication state the following objectives:

- a) Integration and improvement of transport and communication services through continuous maintenance of existing national roads and constructions of new national networks which are geared towards economic development.
- b) Orientation of new investment towards schemes and projects that have clear objectives, leading to increased production.
- c) Encouragement of the private sector to invest in transport and communication through sales of public amenities or joint ownership with the state.
- d) Making full use of available opportunities, resources and potentials to that effect.

Despite the obvious importance of transport and communication and their centrality to any developmental plans, they have been relegated to marginal ministries that have no power in the allocation of national budgets. As such, the Department of Transport and Communication has remained subordinate to other ministries like Economic and Finance which operate under different and often contradictory agenda.

While the principle of integrated transport network is agreeable, the term itself has remained either ill defined or simply meaningless. It is not at all clear whether the



policy of integration is meant to feature at the level of the nation, the State or a combination of both.

The strategy refers “correctly” to projects and schemes that have clear objectives without being specific as to the delineation of these objectives. Lack of clarity in these issues leaves options open for individual ministers to tune national budgets to their regional and ethnic interests. For example, the Saudi Islamic Bank earmarked fund for the Western Road (Alobeid- Alfashir). That fund was later redirected by the Ex-Minister of Finance Dr. Abdel Wahab Osman to the Wheat Project in the north. This project came as a policy of indigenising production of wheat in northern Sudan, a project poorly compete with national economic gains of the Western Road. This is despite the fact that previous economic feasibility studies had been in favour of the Alobeid – Alfashir Road and equally the Southern Kordofan Nuba Circular Road..

#### **4.9. Education and other Developmental Services:**

Tremendous disparities obtain with regard to educational services. While certain areas have seen progressive increase in the number of children who have progressed to secondary schools, pupils in the marginalized areas have been grounded at the primary level. In the State of Western Darfur, primary schools remained closed for two years for lack of books and staff pay. In fact, books rotted in their stores due to lack of funds. There were more than one a half million people in the State of Western Darfur. Only 4,211 children were able to sit for the final Primary School Examination. This number is less than the number of primary school leavers in a single Local Administrative Area in the Northern Region. The comparison becomes somewhat bizarre when we realise one Local Administrative Area in the Darfur has population that is equal to that of the entire Northern Region.

At a different level, marginalized Regions also suffer at the hand of the State Support Fund. This is a national fund expected to fund State developmental projects. As decreed, no State is to access the fund without sound feasibility studies . While this principle makes sense, it is here that northern control reigns supreme. Poorer states are deprived of costs of feasibility studies and hence credible competition for funding. The result is obvious. Its entire budget to funding projects other than those in the Western, Southern and Eastern Regions.

**National Financial Institutions:**

Stat financial sector is one of those sectors that have remained off limit for Regions other than the Northern Region. For example since the establishment of the Bank of Sudan in 1956 and to this day, not a single manager of this Bank came from the Eastern, Western or Southern Region. Those managers who came from the Central Region were in fact members of ethnic groups that originate in the Northern Region. The case of the management of the Bank of Sudan can equally be said for other major Sudanese banks like Khartoum Bank, Sudan Agricultural Bank and the Industrial Development Bank. Appointment of managers for newly created banks and other recent public financial institutions in the country also followed same patterns.

## a- Chamber of Zakat (Islamic Tax):

Although this institution is essentially religious, it too could not escape the process of northern ethnification, i.e. bringing it under the control of the Shaygia, the Jaalyeen and the Danagla. Recent power struggle between the Secretary General and the Manager General of the Chamber of Zakat can be seen within the same process.

## b- Sudan Development Corporation:

No Manager General of this institution ever came out of the three ethnic groups (Shaygia, Jaaliyeen and Danagla).

## c. Islamic Trust.

Throughout the life of Albashir's government, this institution has never been led by any manager from outside the Northern Region.

## d. Integration Fund.

This fund was originally established for noble reasons. However, when it was placed under directorship of someone from a region other than the favourite one, hell broke loose. All obstacles were placed in front of the non-northern director in order to ensure his failure. This went on despite the impressive profile of the Director who succeeded in attracting Libyan firms for Red Sea fishing, provided badly needed school uniforms, and created employment for substantial number of people. Despite appeals of many prominent people, the Fund was liquidated and the Fund was replaced by Sineen Corporation under the same directorship. When Sineen proved its success like its predecessor under the same previous manager of

Integration Fund, opposition was revived. A new manager from the right Region was put in charge. His school drop-out relative now works there and is paid in Dollars, not in Sudanese Dinars, in a UN sponsored project.

Control of the Northern Region over public finance also features in other institutions including the following:

- Application of Sharia (Islamic Law) Fund
- Philanthropic Corporation for Support of Armed Forces
- Martyr's Organisation
- Call for Jihad
- Bir (Charity) International
- Martyr Zibair Charity Organisation
- Marine Lines
- Philanthropic Insurance Fund

**National Insurance Fund:**

This Fund was originally headed by Major General Mahir Sulaiman who is not from the Northern Region. His success attracted attention of his relevant Federal State Minister who was not pleased by what he saw. Confrontation followed and the Fund was subsequently restored to the control of the Northern Region.

When we raise issues of injustice, corruption and mismanagement, we get accused of racism. Others are free to abuse their position and enrich themselves at the expense of the tax payers in the open. Let us give one exam known to many in the country. A General Director of a well known public company was moved to head another public company. He requested payment of \$17,000 as travel expenses for himself and his family against his new company. He also demanded payment of the same expenses from the previous company insisting payment be made outside the state. He also applied for two years house rent in cash, 7 million Sudanese pounds for furniture, in addition to his salary of 10 million pounds a month. All was paid to him to the last penny. Now, this explains why higher jobs have to be reserved only for those from the Northern Region and that there is little or nothing left for other Regions.

**Committee for Division of Resources:**

The discovery of petrol and resumption of its export introduced a new type of wealth into the nation. This new wealth was territory bound and could not be simply relocated to the Northern Region. Something had to be done to ensure flow of wealth to the North and there was no dearth of genius thinking in our leadership. It was easy. A Presidential Decree was to take care of it. Here is the Decree in full:

“Decree No 334, Year 1999: Creation of a National Committee, for drafting proposal for division of national wealth between Federal Government and State governments.

Following examination of the recommendations of the Minister for Federal Relations and the decision of the Council of Ministers No. 839, Year 1998 regarding constitution of a National Committee for division of national resources between the Federal Government and state governments, and in accordance with Constitutional Articles 113, 114, and 115, The President decrees the following: Establishment of a National Committee for the purpose of drafting proposals for division of national wealth between the Federal and State Governments. The committee consists of the following:

**Table 14****National Committee for Division of National Wealth:**

No	Name	Position	Region <added by authors>
1	Abdel RahimMohamed Hamdi	Chair	Northern
2	Dr. Taj Alsir Mahjoub	Secretary And Member	Northern
3	Dr.Taj Alsir Mustafa	Member	Northern
4	M. General Abul Qasim M. Ibrahim	Member	Northern
5	Dr. Kha.id Sir Alkhitim	Member	Northern
6	Farah Hasan	Member	Northern
7	Dr. Ahmed Majzoub Ahmed	Member	Northern
8	Abdel Wahab Ahmed Hamza	Member	Northern
9	Dr. Jumaa Kindi Komi	Member	Western
10	Dr. Swar Aldahab Ahmed Iesa	Member	Northern

11	Jamie Leemy	Member	Southern
12	Dr. Ali Abdalla Ali	Member	Northern
13	Dr. Awad Alseed Alkarsabi	Member	Northern
14	Moses Mashar	Member	Southern
15	Ahmed Ibrahim Turuk	Member	Eastern
16	Dr. Izzaldin Ibrahim Altigani	Member	Northern
17	Dr. Mohamed Kheir Alzibair	Member	Northern
18	Gindeel Ibrahim	Member	Northern
19	Fareed Omer Medani	Member	Northern
20	Badr Aldin Taha	Member	Central
21	Sheikh Beesh Kore	Member	Southern
22	Omer Taha Abu Samra	Member	Northern
23	Dr. Bidoor Abu Affan	Member	Northern
24	Tariq Mubarak	Member	Northern
25	Hasan Jiha Ali	Member <end of Decree>”	Northern

Table 15

## Summary of Table 14, Division of National Wealth

Region	Seats	%
Eastern	1	4%
Northern	19	76%
Central	1	4%
Southern	3	12%
Western	1	4%

The hegemony of the Northern Region over all other Regions is obvious (Table 15). Such a powerful position enables the committee to become yet another tool for furthering interests of the Northern Region.

**Future Visions:**

The injustice and mal-division of power and wealth in the Sudan have eroded the sense belonging to a unified society where all could aspire to share benefits as well duties and responsibilities. The situation in which citizens compromise their personal interests in return for peaceful co-existence with others in their society is what early philosophers called "social contract". Inability of our leaders to respects this simple fact has undermined the very fabric of our Sudanese society. Ensuing problems includes the following:

**I. Internal Immigration:**

Emigration is not natural and is rarely built into the culture of most Sudanese societies. Most rural Sudanese prefer to remain in their homes surrounded by their familial human and non-human surroundings. However, rural people are also thinking individuals who have to evaluate their options and ensure reasonable future prospects for themselves and their future generations. The current pattern of development in country consists of continuous transfer of surplus from rural areas to cities and from marginalized Regions to the Northern Region. Not surprisingly, rural villages, particularly in marginalized Regions are emptied of their human resources. Young people in particular vacate these rural centres in their desperate attempt to flee poverty, illiteracy and ill health. At he same time, shanty towns continue growing forming belts of poverty around every city in the country. This has serious implications at both ends.

Rural areas have been depleted of their human resources, particularly the young, energetic and creative. Cities in turn cannot cope as their resources, employment opportunities and services collapse under pressure of an ever growing populations.

**II. Education Loss:**

Educational services have so far been concentrated in Khartoum, the Northern Region and certain parts of the Central Region. Within these locales, the cost of education has been beyond the rich of the average citizen. In fact, education has become more and more confined to the rich, including families of high government employees. Much more recently, education has been devolved and placed under State authorities. Many States rose to the challenge and used the then rationed sugar to finance their own State education. That policy did not last

for long. The government moved to remove sugar from the list of rationed items and left it to the open market. Obviously, that deprived States of the revenue raised by tax on sugar, thus resulting in the collapse of the educational system in all marginalized States. To this day, not a single leader called for examination of this costly problem with a view to overcoming it. We are bewildered about previous slogans of compulsory education and free education that preceded it and equally free medicine. It is our contention that the Northern Region is deliberate in inflicting illiteracy and ignorance on others as part of its project of hegemony over the Sudan.

### III. Spread of Diseases:

The Eastern Region gives a good example of the collapse of the health system in the Sudan and the impotence of those who are in charge in Khartoum. Kasala and Gadharif cities offer health services to patients that are four times their capacity – by national standards. They both depend on internally generated and charity funds in offering their services. National health system and national disease prevention have receded to feature only on National TV programmes. Instead, the government introduced the so-called national health insurance for those who can pay for it. The policy led to mushrooming of health hotels, some rated at five stars and above for the haves and forget about the have-nots.

The entire State of Western Darfur has two medical specialists in the field of obstetrics and gynaecology, one in Geneina and the other in Zalengay. They are to serve a population of 1,650,000 aided by few medical students who visit the area for training and for escaping mandatory Military Service.

Let us give one example to highlight the dearth of health services in Darfur. The city of Geneina got its first x-ray machine in 1978. It lasted for seven or so years. Since the 1980s, patients requiring x-ray had to leave for Nyala or Khartoum for x-ray, a trip of two to six days for those who could not afford air tickets.

### **Erosion of Peace and Harmony:**

Continuous feeling of injustice, favouritism in job allocations, removal of employees from their jobs to leave rooms for designated individuals, etc, have all created a sense of exclusion and lack of belonging. This has led marginalized people either to opt out

of the society or to turn to violence to redress their perceived maltreatment. Loss of faith in authority and leadership is eating fast on the very fabric of the Sudanese society.

**Regional Associations:**

Continuous marginalisation of certain groups and loss of faith in all those in power have resulted in new ways of campaigning for basic rights. Among others, this has led to mushrooming of ethnic and regional groups acting in desperate attempts to remind leaders of their role regarding distribution of power and wealth in the country, albeit in a peaceful manner. Thus we have the Bija Association, the Nuba Mountain Associations, Darfur Associations, in addition to lobby groups from within the National Parliament.

**Alliance**

**Armed Movements:**

Over the years, various regional armed movements appeared in the Sudan in response to injustice perpetrated by successive Khartoum governments. These movements include Anyana I and II, Sudan Liberation Movement, Sudan's People Liberation Force, Ingessana Coalition and Nuba Mountain Freedom Movement. For all of these groups, independence of the country was no more than a replacement of one master by another.

**Loss of Credibility:**

Loss of credibility is certainly the worst outcome of imbalance of power of wealth in the Sudan. Lack of faith in Khartoum government has been a phenomenon felt in all Regions, with the North being the only exception. Since Independence, the last of Government of Sadiq Almadhi was perhaps the only exception whereby some efforts had been shown in its mild attempt to be somewhat inclusive. Other governments have simply pursued policies of entrenching domination of the north and few areas in the centre over all other Regions. The last government (Albashir's National Salvation) is certainly the worse of them all. It combined politics with ethnicity and Islam to concentrate power and wealth in the North. In this project, regionalism goes hand in hand with racism, and often disguised under an Islamic flag to realise government goals. Not only that Sudan is further dissected into clearly power



demarcated Regions, cities too are falling under the same onslaught. They are to be ruled by their inhabitants who originate in the North.

### **Islamic Rule:**

Since its accession to power, this government has been selling itself as a champion of Islam. Its major slogan has been to construct a state built on "Knowledge/Science and Submission to Islam". Such a state is expected to be a model of justice, equality and faith. We hereby offer our understanding of the five major criteria for an Islamic State:

#### **I. Land Development (I'mar Alarad):**

As stated in the Koran, man is the successor of God on earth and is entrusted with its development (I'mar). The state or the government is the body which is in charge of this, and is thus obliged to devise and implement and monitor all relevant policies. In so doing, the state is to guarantee equality of all in front of the laws in the designated land. In accordance with God's Decrees, the state should ensure prevalence of justice, protection of the weak and eradication of oppression and excesses of the powerful. The state is obliged to fight nepotism, favouritism and unfair enrichment of the few at the expense of the many. Only through this can the state claim to be an adequate representative and a true successor to God.

#### **II. Freedom**

The second criterion of an Islamic state is freedom as enshrined in the Koran ("Let there be no compulsion in religion: Truth stands out Clear from Error" The Cow, Verse 256). The divine order presupposes freedom treating the individual as a thinking citizen capable of making his/her own choice. Only through enabling people to make their choice that we can guarantee true debate and exchange of different views that can lead to effective use of resources and continuous development. Islam teaches us to exchange view in a free environment that is cleared of autocracy and arrogance of rulers; an environment in which the ruler is subordinate to the consensus based on views of ordinary citizens. This was the method used by the Prophet and his immediate Successors. Abu Bakr, the first successor of the Prophet once said: "Support me if I do well and correct me when I make mistakes". His successor Omer also followed the same philosophy. As narrated, a woman opposed one of his

decisions and quoted the Koran to support her argument. Omer listened and obliged saying “Omer erred while a woman delivered the right view. All of you are more knowledgeable than Omer”. This is why early Islamic states prospered and extended their borders from the Indian to the Atlantic oceans.

Arrogant leaders who refuse to listen to their subjects are ultimately bound to depend on oppressive institutions if they are to preserve their power. In their pursuit of remaining in power, these leaders, hypocritically, preach the word of God and His Prophet amid corruption, injustice and tyranny. They however never recall the words of the Prophet “If Fatima, the daughter of Mohamed is to steal, I will certainly amputate her hands as we do to other thieves”. Such a level of justice requires an environment of freedom and in which citizens guide their leaders in the fight against corruption, nepotism and injustice.

### III. Justice

The third criterion of an Islamic state is working for justice. Justice is the essence of good leadership. With its presence, a non-Muslim king can guarantee his success in a Muslim community. In its absence, even the most Muslim king is bound to fail. The high place accorded to justice is indicated by its use as one of the Most Beautiful Names of Allah.

Justice that we require in the Sudan is that which includes division of resources in accordance with equality of all citizens as members of the same country. resources are to be divided according to clearly laid down priorities that are transparent and evident to all. Such an approach ensures consensus and evades feeling of deceit. Control over public wealth should be open to all according to their experience, qualifications and commitment to national interests. It should not be a preserve of a select minority whose members collaborate to protect the corrupt and shield the incompetent. While stories of corruption in many public financial institutions are rampant in the state, response of the government seems to have focused on limited number of Banks. So far all of these Banks and financial institutions seem to have links to Regions other than the Northern Region.

Justice presupposes opening high offices to all qualified citizens. This is not the case in the Sudan. The presidency of the state, for example, has always been monopolized by certain ethnic groups. This has been the case throughout the independent history of the Sudan. The position of the head of the Judicial System has also fallen under the same menace of ethnic domination.

#### VI. Shura (Consultation)

We introduce shura or consultation as the fourth criteria of Islamic rule. Islam stipulates the use of consultation for all public decision, small and big alike. The shura is a right of all citizens in an Islamic state, and the ruler is clearly instructed to avoid monopoly over decision-making. The following are clearly stated in Islamic jurisprudence:

- a) The ruler is obliged to consult widely prior to taking any major decision. Consultation allows the ruler to examine various views that are not available to a single individual, no matter how wise he or she is. Consultation also allows the ruler to avoid pitfalls of emotional and personal inclinations.
- b) Absence of consultation leads to abuse of power and breeds arrogance. Major decisions are public matters and should not be left to a single individual. The duty of all citizens to contribute to such consultation is so crucial in Islam that it is elevated to the level of Jihad: "The best of Jihad is a word of truth to an unjust ruler". In a modern state, civic societies, organisations, media, etc are all obligated to speak out and contribute to the decision making process.

#### IV. Adoption of Divine Governance:

Our fifth criteria of an Islamic rule is its conformity with divine laws as enshrined in the Koran, the prophetic traditions and other good sources of Islamic jurisprudence. In this system, submission must be made to God alone and this applies to the ruler and ruled alike. The rule here is nothing but a means towards entrenchment of the rule of God. Islam grants the ruler rights but equally that comes with corresponding responsibilities. So heavy are these responsibilities and that is what led Omer, the second successor of Prophet Mohamed to lament: "I wish the mother of Omer had never given birth to me", or elsewhere: "You are all shepherds and every one of you is responsible for his flock, (i.e. subjects) in front of Allah".

The ruler must constantly remember that he has to defend himself on the Day of Judgement. Those who are related to the ruler should not abuse that relationship. Early Islamic rulers had always seen such relationship as a liability and never an asset. A relative of a ruler is the first to be called to action and first to be scrutinized for mistakes. Such was the case with Abdullah, the son of Successor Omer who was the first to be investigated and the last to receive his legitimate share in his community.

### **Harvest of Destruction**

We would like to step back and contemplate on our rulers and assess the reasons behind their incessant control over power and their use of every possible means to retain it. Here are our conclusions:

- I. Those who are in charge seem to have succumbed to their inner instinct for power and domination over others. Their thirst for power has gone out of control as they have lost the most important bridle and that is fear of God and the After Death punishment.

Success in monopolising power for so long gave members of this group an illusion that their rise to power is natural and is a direct result of their superior capabilities, tribes and regional origin. Nothing better illustrates this more than their popular saying that they will never hand in the Sudan to anybody except to Jesus and the Messiah at the end the current world (Biblical story about end the world). Despite their deceptive talk about Islam, those people have never learnt the simple Islamic teaching that it is God that gives power to some and takes it from others; that it is God's kingdom that lasts, not hat of His creatures.

- II. In the last ten years or so, corruption has become so widespread that it has acquired semi legal status. Corrupt government officials are often described as being involved in establishing themselves or forming personal wealth. Public office has become a means of acquiring villas, expensive cars or extra wives. Corruption has become indivisible from the state that the judicial powers have to

be tuned to protect the inner circle of the favoured ruling elite. Thus sharia (Islamic) laws are interpreted to strike those who encroach on private property and spare those who steal from the public coffer. The result is obvious. Amputation, flogging and extended prison sentences became the punishment of the destitute and dispossessed who are likely to steal a transistor radio, a watch or a camel. The same laws and hence punishment do not apply to those who steal public money no matter how huge are their unlawful gains. The latter group of thieves consists of government officials, mostly among the favoured few. Not surprisingly, poverty of the many grew in tandem with growth of wealth as illustrated by substantial increase in new villas, expensive cars and luxurious life style. This trend is very much facilitated by the unwritten code which enabled a small minority to control almost all key financial positions in the country and at the same time preside over the judicial system.

III. While enriching themselves, our ruling elite also devised a system where no body else succeed in the economic sphere. The rule is simple: "starve your dog and he will follow you", forgetting that it is God who provides sustenance and that He can change fortunes overnight. Moreover, the ruling elite also made sure that success in any public office can only be achieved if the occupant is a Northerner. Otherwise all obstacles are erected to guarantee failure of the government official. This pattern has been clear in the following cases:

A) The old colonial dictum: "divide and rule" has been refashioned by our leaders and used in various ways to achieve their objectives. It is combined with other tactics including rewards and punishment, character assassination and embellishment of poppets. Turning ethnic groups against each other has been a dominant feature of this current regime. Examples here are the Hadandwa against the Beni Amir , the Ara'ar against the Bashshareen and the Halanga against the Rashida in the Eastern Region. The Southern

Region has also been placed under the same destructive policy. Thus you witness the Dinka against the Nuer, the Nuer against the Shiluk, the Manari against the Zande and so forth. The Western Region also has its share of this divisive policy culminating in conflicts between the Nuba and the Misairiya, the Slammat and the Silaihat, the Zaghawa and the Rizaigat and so forth. Much more recently, a broader gulf has been created in Darfur between the so-called Arab alliance on one hand, and the Zurga (black) on the other. The national security offices and media have also been employed to stimulate such conflicts. This has often appeared in the form of false statements attributed to certain groups threatening their neighbours.

- B) Character assassination of leaders who raise their voices against injustice has also been a favoured tactics for this government. The case of Colonel Malwal, the southern leader, is known to all in the Sudan. He was removed from the Command Council of the government following false accusations staged-managed by the certain circles within the regime.

When this government came to power, General Bakri Almak rose to become the Governor of the Eastern Region. False accusations similar to those Colonel Malwal received were devised to remove him from office. Only reason we can come up with is that he comes from the wrong Region (Central).

Khartoum State also saw similar dirty plays. Khartoum has always been seen as an extension of the Northern Region. That became clear when Badr Aldin Yhia who is Khartoumese became State Governor of Khartoum. He was subjected to vicious attack using the might of the government controlled media. Attacks continued until he was finally driven out of office. He was replaced by Dr. Majzoub Alkhalifa who is a

Northerner, and even better, famous for his chauvinistic inclination to the Jaalyeen ethnic group.

## CONCLUSION

This document which is factual in its data and clear in its representation is compiled under the slogan: "Justice". Our choice is inspired by the fact that "Justice" is derivative of one of the 99 Names of Allah. Justice and equality are our demand. Remaining within Islamic slogans which this government claim to raise, we indicate that Justice and equality are essential to full realisation of Islamic rule. That can only be realised if we are prepared to speak out for justice. Prophet Mohamed once said: "Support your brother whether he is just or otherwise". In so saying, he does not mean standing with injustice. Rather, what he meant is that you take your unjust brother by the hand, and direct him to where justice lies. This is our approach to our brothers in the Northern Region.

Sudan was not ideal at its Independence in 1956. Resources were poorly divided among different provinces at the time. By the 1970s some progress was made and gaps between provinces started narrowing. The last two decades have been different. Resources were moved to concentrate in the Northern and Central Regions leading to impoverishment of other Regions. As a result, marginalized Regions became zones of out migration. People had to move in search of food, work and services, all of which concentrated in the Central and Northern Regions.

Destruction of marginalized Regions has become a feature of Sudan, particularly during the reign of current Regime. Much worse are the marginalized Regions that are governed by Governors who do not come from the Northern Regions. The State of Western Darfur and the State of Southern Kordofan provide a good example in this regard. They were both brought to their knees simply because their governors happen to be from within these States. When they were replaced by Governors of the "right northern ethnic groups", funds were released and the States became somewhat functional. So acute this problem was that a pillar of the government in Khartoum declared Federal funding for western states can only be released following his

personal approval, verbal or written. Such policies are bound to lead to alienation and subsequent loss of faith in Sudan as a united country. We hereby appeal to those who are in charge to think hard. We understand that justification has always been made to behave in specific way but the road to move forward is clear. Our northern brothers must be ready to compromise and be fair in dealing with national issues. They must open up government positions to all according to their qualifications, competence and experience. They must stop abusing their positions and halt directing illegitimate resources to their own home areas. Finally, they must follow the –just- slogans which they raise in their public speeches.

This Regime took over (1989) to augment the project of Sudan as a model of an Islamic state. Muslim countries everywhere are looking at our experience. Its failure is a failure of Islam as much as it a failure of Sudan as a nation. It is time to set things right. We appeal to those who are in charge to unite and commit themselves to justice, protection of individual rights and promotion of the national interest.

Lastly, we would like to promise our readers more detailed information in Part II of this work.

#### **References:**

1. Directory of Federal Rule, Sudan.
2. People Councils Publications.
3. Presidential/Republican Decrees
4. Public Administration Regulations
5. Sudan National Census, 1993.
6. Mekki Othman, 1997. Finance Ministers Whom I knew. (No Publishing House).
7. IMF Publications.
8. Institute for Arab Planning. Kuwait. March 1997.
9. National Fund for Social Insurance, Sudan.
10. Sudan Sea Lines Publications.